



LAPORAN AKHIR

PROFIL POTENSI UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI KABUPATEN MUARA ENIM



KERJASAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Tim Penyusun dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, sehingga Laporan Akhir dari kegiatan penyusunan Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan akhir ini berisikan tentang hasil analisis terhadap potensi-potensi komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim, yang dilanjutkan dengan hasil analisis terhadap peluang investasi pada potensi-potensi unggulan tersebut. Pengukuran dan analisis terhadap potensi dan peluang ini dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan panduan yang tertera dalam Keputusan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Dalam penyusunan hasil kajian ini, tim penyusun didukung oleh beberapa unsur tenaga ahli sesuai bidangnya dari Universitas Sriwijaya. Dengan demikian informasi dan masukan yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan lebih tepat sasaran. Untuk kolaborasi yang baik itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi diucapkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim atas kepercayaannya kepada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya untuk menyusun hasil kajian ini. Semoga kerjasama yang baik seperti ini dapat dilanjutkan pada masa mendatang. Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim serta bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dan program sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terus meningkat di Kabupaten Muara Enim ke depan.

Muara Enim, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Dasar Hukum.....	5
1.5. Sistematika Laporan.....	7
II. KONSEP PENYUSUNAN POTENSI UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	9
2.1. Konsep Dasar Potensi Unggulan Daerah	9
2.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Potensi Unggulan Daerah	10
2.3. Konsep Dasar Peluang Investasi Daerah	12
2.4. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peluang Investasi Daerah	13
III. METODOLOGI PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI UNGGULAN DAERAH	15
3.1. Metodologi Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Daerah.....	15
3.1.1. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Location Quotient (LQ).....	15
3.1.2. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Shift-Share Analysis	16
3.1.3. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor.....	19
3.1.4. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Klassen.....	20
3.1.5. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah.....	21
3.2. Metodologi Penentuan Peluang Investasi Daerah	27
3.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Klaster	28
3.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri	31
3.2.3. Studi Kelayakan Usaha	32

	Halaman
IV. POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KABUPATEN	
MUARA ENIM.....	42
4.1. Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim	42
4.1.1. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Location Quotient (LQ) Sektor Basis dan Non Basis (LQ dan DLQ).....	42
4.1.2. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Shift-Share Analysis	47
4.1.3. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor Menggunakan Analisis Klassen.....	52
4.1.4. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah.....	57
4.2. Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim	75
4.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Kluster	77
4.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri	94
4.2.3. Studi Kelayakan Usaha	103
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	224

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Klasifikasi Sektor Ekonomi Menurut Tipologi Klassen	21
3.2. Data Aspek Makro dan Regional	26
4.1. Indeks <i>Statistic Location Quotient</i> Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023.....	43
4.2. Indeks <i>Dynamic Location Quotient</i> Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023.....	45
4.3. Komparasi Sektor Unggulan SLQ dan DLQ Kabupaten Muara Enim ..	46
4.4. Perhitungan Shift Share Analysis Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023.....	49
4.5. Kuadran Shift-share Sektor Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023.....	50
4.6. PDRB Menurut Sektor Kabupaten Muara Enim, 2019-2023.....	53
4.7. Persentase kenaikan dan penurunan masing-masing sektor PDRB Kabupaten Muara Enim dari tahun 2019-2023	54
4.8. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Muara Enim, 2019-2023.....	58
4.9. Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Muara Enim, 2019-2023	60
4.10. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	62
4.11. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muara Enim, 2019-2023.....	63
4.12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	64
4.13. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023	65
4.14. Aksesibilitas Transportasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	66
4.15. Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	67
4.16. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	68
4.17. Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan PDAM di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	69
4.18. Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	69
4.19. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023	70

	Halaman
4.20. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	71
4.21. Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	73
4.22. Realisasi Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Muara Enim, 2019-2023	74
4.23. CAPEX Investasi Perkebunan Kelapa Sawit	112
4.24. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit.....	112
4.25. Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Kelapa Sawit.....	113
4.26. Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk Usaha 1 Hektar ...	114
4.27. CAPEX Investasi Perkebunan Karet.....	123
4.28. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Karet	123
4.29. Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Karet	125
4.30. Kelayakan Usaha Perkebunan Karet untuk Usaha 1 Hektar	125
4.31. CAPEX Investasi Perkebunan Kopi	136
4.32. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Kopi.....	137
4.33. Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Kopi.....	137
4.34. Kelayakan Usaha Perkebunan Kopi untuk Usaha 1 Hektar	138
4.35. CAPEX Investasi Peternakan (Penggemukakan) Sapi.....	146
4.36. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Peternakan Sapi.....	146
4.37. Operational Expenditure (OPEX) Peternakan Sapi.....	147
4.38. Kelayakan Usaha Peternakan Sapi untuk Usaha 100 Ekor Sapi.....	147
4.39. CAPEX Investasi Perkebunan Kentang	155
4.40. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Usahatani Kentang	156
4.41. Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Kentang	157
4.42. Kelayakan Usaha Perkebunan Kentang per Hektar.....	157
4.43. CAPEX Investasi Perikanan Budidaya	164
4.44. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Perikanan Budidaya	165
4.45. Operational Expenditure (OPEX) Perikanan Budidaya.....	165
4.46. Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya	166
4.47. CAPEX Investasi Industri Batik	172
4.48. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Batik.....	173

	Halaman
4.49. Operational Expenditure (OPEX) Industri Batik	174
4.50. Kelayakan Usaha Industri Batik	175
4.51. CAPEX Investasi Industri FABA Ready Mix dengan Pembangunan Batching Plant.....	182
4.52. CAPEX Investasi Industri FABA Pembangunan Pabrik Precast	182
4.53. Biaya Produksi Ready Mix Beton.....	183
4.54. Biaya Produksi Ready Mix pengganti Sub Base Jalan	184
4.55. Skema Analisis Biaya untuk Produk Paving Block.....	185
4.56. Skema Analisis Biaya untuk Produk Batako	185
4.57. Rekapitulasi untuk nilai NPV setiap Skema dan Produk	186
4.58. Rekapitulasi untuk nilai Payback Period setiap Skema dan Produk	186
4.59. CAPEX Investasi Jamur Tiram.....	194
4.60. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Jamur Tiram	195
4.61. Operational Expenditure (OPEX) Jamur Tiram	196
4.62. Kelayakan Usaha Industri Jamur Tiram	197
4.63. CAPEX Investasi Industri Kopi Bubuk.....	203
4.64. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Kopi Bubuk.....	205
4.65. Operational Expenditure (OPEX) Industri Kopi Bubuk	205
4.66. Kelayakan Usaha Industri Kopi Bubuk.....	205
4.67. CAPEX Investasi Industri Serat Nanas	212
4.68. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Serat Nanas	212
4.69. Operational Expenditure (OPEX) Industri Serat Nanas	213
4.70. Kelayakan Usaha Industri Serat Nanas	213
4.71. CAPEX Investasi Ikan Asap.....	219
4.72. Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Ikan Asap	220
4.73. Operational Expenditure (OPEX) Industri Ikan Asap	221
4.74. Kelayakan Usaha Industri Ikan Asap	221

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Teoritis Penyusunan Sektor Unggulan dan Peluang Investasi Daerah	10
3.1. Alur Penyusunan Potensi Sektor Unggulan Daerah	15
3.2. Matrik Tipologi Sektor	19
3.3. Alur Proses Penyusunan Peluang Investasi Daerah.....	27
3.4. Diamond Cluster Model Porter.....	30
3.5. Diagram Manajemen Risiko	38
4.1. Klaster Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Muara Enim	79
4.2. Klaster Perkebunan Karet di Kabupaten Muara Enim.....	80
4.3. Klaster Perkebunan Kopi di Kabupaten Muara Enim	81
4.4. Klaster Sapi Potong/ Penggemukan di Kabupaten Muara Enim	82
4.5. Klaster Industri Kopi Bubuk di Kabupaten Muara Enim	84
4.6. Klaster Industri Serat Nanas di Kabupaten Muara Enim	85
4.7. Klaster Industri Batik di Kabupaten Muara Enim	86
4.8. Klaster Industri FABA di Kabupaten Muara Enim	88
4.9. Klaster Perikanan Budidaya di Kabupaten Muara Enim	89
4.10. Klaster Perkebunan Kentang di Kabupaten Muara Enim	90
4.11. Klaster Ikan Asap di Kabupaten Muara Enim	92
4.12. Klaster Jamur Tiram di Kabupaten Muara Enim	93
4.13. Pohon Industri Kelapa Sawit.....	95
4.14. Pohon Industri Karet	96
4.15. Pohon Industri Kopi.....	97
4.16. Pohon Industri Sapi.....	98
4.17. Pohon Industri Nanas	99
4.18. Pohon Industri Batik.....	100
4.19. Pohon Industri FABA.....	100
4.20. Pohon Industri Ikan	101
4.21. Pohon Industri Kentang	102
4.22. Pohon Industri Jamur Tiram.....	102
4.23. Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	108

	Halaman
4.24. Lokasi Perkebunan Karet yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	120
4.25. Lokasi Perkebunan Kopi yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	132
4.26. Lokasi Pengusahaan Penggemukkan Sapi yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim.....	144
4.27. Lokasi Perkebunan dan Industri Kentang yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim.....	154
4.28. Lokasi Perikanan Budidaya yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	162
4.29. Lokasi Industri Batik yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	171
4.30. Lokasi Usaha FABA yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	180
4.31. Lokasi Usaha Jamur Tiram yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	193
4.32. Lokasi Industri Kopi Bubuk yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	202
4.33. Lokasi Industri Serat Nanas yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim	210
4.34. Lokasi Usaha Industri Ikan Asap (Ikan Sale) yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim.....	218

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi pada suatu daerah merupakan salah satu pendorong pembangunan daerah. Salah satu langkah untuk mendorong masuknya investasi di suatu daerah yaitu dengan memberikan Informasi yang memadai kepada pelaku usaha dan calon investor yang juga merupakan bentuk peningkatan peran serta pihak swasta dalam pembangunan daerah. Salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi investasi, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang investasi daerah. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah yang *ready to invest* yang sesuai ketersediaan sumberdaya alamnya, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan daerah dan pusat.

Kabupaten Muara Enim secara geografis terletak antara 30 3' 21" sampai 40 15' 14" Lintang Selatan dan 1030 18' 18" sampai 1040 42' 4,99" Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 Km², terbagi menjadi 22 kecamatan, terdiri dari 246 desa definitif dan 10 kelurahan. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim berjumlah 630.809 jiwa. Ibukota kabupaten ini terletak di Kecamatan Muara Enim. Topografi Kabupaten Muara Enim cukup beragam mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang memiliki banyak potensi investasi di berbagai sektor antara lain sektor Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Peternakan dan sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor dimaksud perlu adanya pemetaan potensi dan peluang investasi melalui kegiatan penyusunan peta potensi investasi

serta promosi investasi baik melalui sistem informasi maupun berbagai media promosi lainnya.

Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim merupakan suatu pemenuhan kebutuhan publik agar dapat memberikan informasi yang jelas untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang potensi dari berbagai sektor strategis yang ada di Kabupaten Muara Enim serta peluang pengembangan investasinya. Informasi ini diharapkan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan para perencana di daerah dalam penyusunan alokasi anggaran dan bahkan dapat digunakan diharapkan dapat memberikan informasi bagi dunia usaha dan investasi di daerah, dengan demikian di harapkan dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Pada dasarnya tujuan penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Muara Enim adalah untuk memberikan informasi secara jelas mengenai, sumber daya potensial yang mendukung investasi, rencana pengembangan investasi ke depan, sekaligus profil investasi, prosedur perizinan dan pelayanan investasi di Kabupaten Muara Enim. Untuk itu diperlukan kajian tentang komoditas unggulan dari masing-masing sub sektor, dengan harapan hasil ini akan dapat dipromosikan untuk menarik minat para investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya pada berbagai komoditas tersebut. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk dokumen profil dan booklet melalui Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian ini dilaksanakan dengan maksud agar tersedia data dan informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang potensi unggulan dari berbagai sektor strategis yang ada di Kabupaten Muara Enim serta peluang pengembangan investasinya yang dapat dijadikan bahan promosi dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Muara Enim. Disamping itu, untuk memberikan kemudahan juga kepada publik khususnya calon investor dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Tujuan Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ini, yaitu:

Menyusun dokumen tentang potensi unggulan dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Muara Enim, mulai dari perhitungan *Location Quotient* (LQ) sampai dengan penilaian/ hitungan *break even point* (BEP) investasi terhadap potensi unggulan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan potensi unggulan dan peluang investasi tersebut serta sebagai bahan promosi dan dokumen kajian investasi bagi para investor.

1.3. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah, terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder; pengumpulan data bertujuan untuk memetakan kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Muara Enim. Pengumpulan data ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari institusi terkait, *survey* ke lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer dilakukan melalui *visual survey*, pemetaan, kuesioner dan wawancara kepada *stakeholders* terkait.
2. Studi Kepustakaan; studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dasar teori tentang kajian optimalisasi potensi sumber daya yang terkait dengan peningkatan investasi Kabupaten Muara Enim.
3. Identifikasi dan Analisis Data :
 - a) Potensi unggulan di Kabupaten Muara Enim
 - b) Gambaran umum potensi unggulan;
 - c) Peluang Investasi yaitu Potensi unggulan yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon investor.
 - d) Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim yang dapat menghasilkan Informasi :
 - Jumlah produksi bahan baku, produktivitas, bentuk hilirisasi / pemanfaatan dan UMKM / Perusahaan yang telah melakukan pemanfaatan;
 - Peluang pasar hilirisasi;

- Surplus bahan baku di Kabupaten Muara Enim;
 - Titik koordinat lokasi potensi unggulan dan peluang investasi, pemanfaatan peta letak peluang investasi dan peta letak potensi berdasarkan peta RTRW Kabupaten Muara Enim;
 - Gambaran peluang Investasi ; bahwa peluang investasi relevan dengan dokumen pembangunan daerah (RPJM/P, RTRW, dll)
 - *Multiplier effect* peluang investasi pada ekonomi daerah (lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, usaha pendukung, ada peluang kemitraan dengan pelaku ekonomi daerah).
 - Uji kelayakan produk hasil pemanfaatan dan nilai investasi
 - Kelayakan ekonomi (LQ, Payback, NPV, BC Ratio, IRR);
 - Infrastruktur pendukung (jalan, listrik, dll);
 - Keberlanjutan yang baik;
 - Dukungan stakeholders daerah.
4. Penentuan lokasi peluang investasi / hilirisasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 5. Analisis nonfisik (menganalisis masalah, potensi, peluang, hambatan dan tantangan) dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Analisis fisik (menganalisis masalah pembangunan ekonomi Kabupaten Muara Enim dari aspek lanskap, bangunan, utilitas dan ruang kabupaten antara lain dengan mengidentifikasi karakteristik kabupaten secara fisik, sosial, budaya dan ekonomi)
 6. Analisis terhadap azas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanaman modal yang meliputi :
 - a. perbaikan iklim penanaman modal;
 - b. persebaran penanaman modal;
 - c. fokus pengembangan pasar, infrastruktur dan energi;
 - d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - e. pemberdayaan UMKMK;
 - f. pemberian fasilitasi, kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
 - g. promosi penanaman modal.
 7. Peta panduan implementasi penanaman modal.
 8. Analisis data potensi unggulan yang meliputi :
 - a. sektor perkebunan;

- b. sektor tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. sektor peternakan;
 - d. sektor pertambangan;
 - e. sektor energi;
 - f. sektor pariwisata;
 - g. sektor keciptakaryaan; dan
 - h. peluang dan investasi.
9. Rekomendasi.
 10. Penyusunan Buku Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim
 11. Penyusunan Booklet Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 12. Pemilihan gambar potensi unggulan dan peluang investasi, cover buku dan gambar untuk buku profil dan booklet dikemas dalam bentuk yang menarik.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
5. Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 No 5);
11. DPA SKPD Nomor : 2.18.02.2.02.0004 Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Februari 2024;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim Nomor : 01/KPTS/DPMPSTSP/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024;

13. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Muara Enim Nomor : 45/KPTS/DPMPTSP-2/2023 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksana Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Muara Enim pada Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2024.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim ini disusun berdasarkan pedoman yang tertera dalam Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah, yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Laporan

BAB II. KONSEP PENYUSUNAN POTENSI UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

- 2.1. Konsep Dasar Potensi Unggulan Daerah
- 2.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Potensi Unggulan Daerah
- 2.3. Konsep Dasar Peluang Investasi Daerah
- 2.4. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peluang Investasi Daerah

BAB III. METODOLOGI PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI UNGGULAN DAERAH

- 3.1. Metodologi Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Daerah
 - 3.1.1. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Location Quotient (LQ)
 - 3.1.2. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Shift-Share Analysis
 - 3.1.3. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor
 - 3.1.4. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Klassen

3.1.5. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah

3.2. Metodologi Penentuan Peluang Investasi Daerah

3.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Klaster

3.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri

3.2.3. Studi Kelayakan Usaha

3.2.3.1. Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

3.2.3.2. Aspek Teknis

3.2.3.3. Aspek Pasar

3.2.3.4. Aspek Keuangan

3.2.3.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

3.2.3.6. Aspek Risiko

BAB IV. POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

4.1. Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim

4.1.1. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Location Quotient

4.1.2. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Shift-Share Analysis

4.1.3. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor

4.1.4. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Klassen

4.1.5. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah

4.2. Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim

4.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Klaster

4.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri

4.2.3. Studi Kelayakan Usaha

4.2.3.1. Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

4.2.3.2. Aspek Teknis

4.2.3.3. Aspek Pasar

4.2.3.4. Aspek Keuangan

4.2.3.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

4.2.3.6. Aspek Risiko

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

Bab 2

KONSEP PENYUSUNAN POTENSI UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

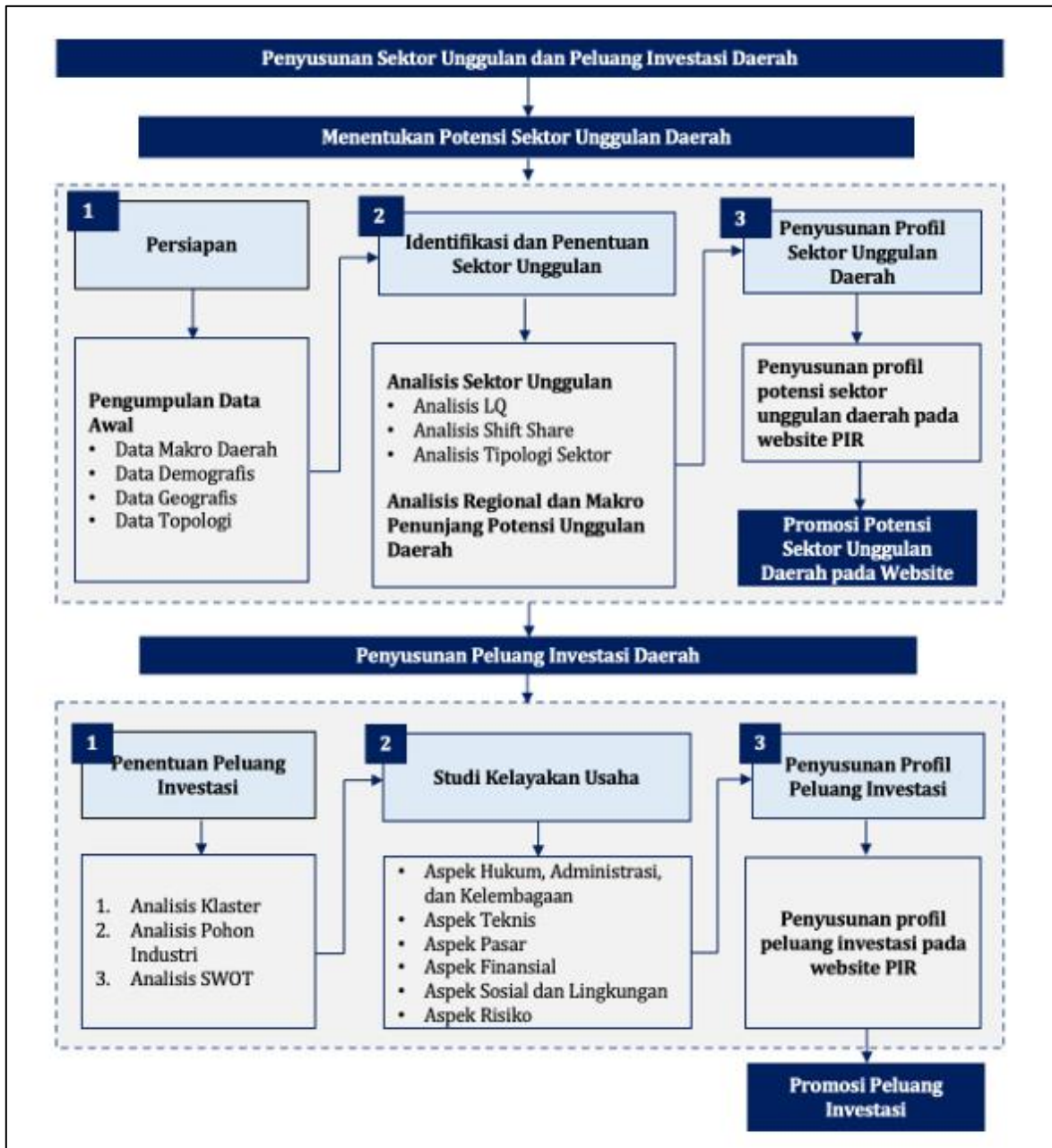
2.1. Konsep Dasar Potensi Unggulan Daerah

Pembangunan ekonomi regional saat ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Menentukan sektor usaha unggulan potensial dapat diperoleh dengan mengukur seberapa besar kontribusi diberikan oleh sebuah sektor usaha dan seberapa besar pertumbuhan sektor usaha tersebut terhadap kinerja perekonomian daerah/regional yang diukur dari Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Sementara menentukan peluang investasi dilakukan dengan mengukur kelayakan usaha dari usaha tersebut. Menyusun potensi dan peluang investasi dapat dilakukan dengan mengikuti alur prosesnya, dari mulai persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, pembahasan dalam FGD, hingga publikasi pada hasil penyusunan pada Website.

Alur proses untuk menyusun potensi dan peluang masing-masing telah disederhanakan menjadi tiga bagian. Proses yang pertama adalah perlunya pemahaman bahwa menyusun potensi sektor unggulan daerah pada dasarnya adalah menghitung dan menganalisis dari data PDRB yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS, ditambah dengan informasi makro daerah, demografi, geografis, dan topografi. Selanjutnya, pada penyusunan peluang investasi daerah, dimulai dari penentuan peluang investasi dengan tiga analisis untuk menghasilkan suatu peluang usaha yang sangat spesifik yang akan ditawarkan kepada investor.

Dari satu usaha spesifik tersebut kemudian disusun kelayakan usaha agar dapat memberikan gambaran Investasi dari mulai aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar, aspek finansial, hingga aspek risiko dari usaha tersebut. Gambaran

proses alur penyusunan potensi sektor unggulan dan peluang investasi dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.

Kerangka Teoritis Penyusunan Sektor Unggulan dan Peluang Investasi Daerah

2.2. Pengertian Potensi Unggulan Daerah

Keberagaman kondisi geografis dan demografis setiap daerah membuat sumber daya yang dimiliki oleh daerah juga berbeda-beda. Dalam pengembangan perekonomian daerahnya, pemerintah perlu melihat seberapa besar sumber daya yang mereka miliki dan potensi perekonomian yang ada didalamnya. Sumber daya

yang dimiliki oleh daerah perlu dikembangkan secara optimal karena secara alamiah memiliki keunggulan komparatif yang mampu meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan sumberdaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah tersebut perlu diawali dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan daerah. Pembangunan ekonomi daerah akan lebih cepat tercapai jika pemerintah mengetahui potensi unggulan daerahnya serta berupaya mengembangkan potensi unggulan tersebut guna mempercepat peningkatan perekonomian daerah.

Potensi unggulan daerah diartikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki wilayah itu sendiri yang diolah dan di produksi sehingga menjadi produk unggulan daerah. Potensi ini bisa dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Potensi unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

Terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi unggulan daerah menurut Meidayani *et al.*, (2021), yaitu:

1. Sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun belum memiliki daya saing yang baik.

Sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa datang atau biasa disebut sektor unggulan Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah. Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001)

2. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006)

Menurut Rachbini (2001), ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor sektor lainnya.

Pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000).

2.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Potensi Unggulan Daerah

Tujuan penyusunan potensi unggulan daerah adalah sebagai dasar untuk memahami kondisi daerah dengan mengenali potensi, sumber daya dan keunggulan daerah tersebut. Identifikasi kondisi daerah ini diperlukan agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan penyusunan potensi unggulan, daerah dapat merencanakan pembangunan daerah dengan memilah potensi terbarukan dan tidak terbarukan sebagai modal pembangunan daerah tersebut.

Manfaat yang didapat daerah setelah menyusun potensi unggulan daerah adalah memiliki perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selanjutnya, hasil penyusunan potensi unggulan daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam merumuskan strategi peningkatan dan pengembangan potensi unggulan dari masing-masing daerah.

Potensi-potensi ini berperan sebagai modal dan panduan bagi instansi terkait untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, memaksimalkan potensi unggulan tersebut untuk bersaing di pasar nasional dan internasional serta pemeratakan hasil pembangunan. Dengan penyusunan sektor unggulan daerah, diharapkan daerah mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan serta

meningkatkan pendapatan melalui investasi yang diterima oleh daerah tersebut. Penerimaan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat dimanfaatkan dalam pembangunan masing-masing sektor. Sektor-sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan dan dikembangkan diharapkan dapat membangun ekonomi dengan meningkatnya daya saing daerah dalam pasar dunia.

2.4. Konsep Dasar Peluang Investasi Daerah

Peluang investasi daerah merupakan tindak lanjut dari analisis potensi unggulan daerah sehingga terdapat proyek yang siap untuk ditawarkan kepada investor. Peluang investasi (*investment opportunity*) merupakan hasil dari sekumpulan analisis yang memberikan petunjuk yang lebih luas, dimana nilai suatu perusahaan/proyek sebagai tujuan utama investasi tergantung pada pengeluaran perusahaan/proyek di masa yang akan datang.

Secara teknis, penilaian investasi dilakukan dengan kerangka-kerangka yang terkumpul dalam feasibility study sesuai dengan proyek atau sektor potensialnya. Pemerintah daerah sebagai aktor utama pembuat kebijakan di daerahnya perlu melakukan perencanaan strategi untuk menyusun serta membuat profil peluang investasi dengan potensi sumber daya daerah yang dimiliki.

Peran pemerintah daerah adalah menyusun sebuah metode dengan menentukan indikator-indikator atau parameter yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi peluang investasi di daerahnya sampai pada tahap membuat profil investasi yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi peluang-peluang investasi hingga hal tersebut dapat terinformasikan serta dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam sebuah profil investasi daerah.

2.5. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Peluang Investasi Daerah

Penyusunan peluang investasi daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan serta menekankan pada pengintegrasian investasi dan pengambilan keputusan regional.

Manfaat dari penyusunan peluang investasi daerah adalah untuk: (1) Dapat mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan daerah, serta tercapainya target investasi nasional ; (2) Membantu pemerintah

daerah dan investor dalam ketersediaan informasi investasi serta kerjasama bagi pemerintah dan swasta, (3). Memberikan gambaran peluang investasi regional kepada investor berdasarkan keunggulan masing-masing daerah, sehingga mampu mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, (4) Mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

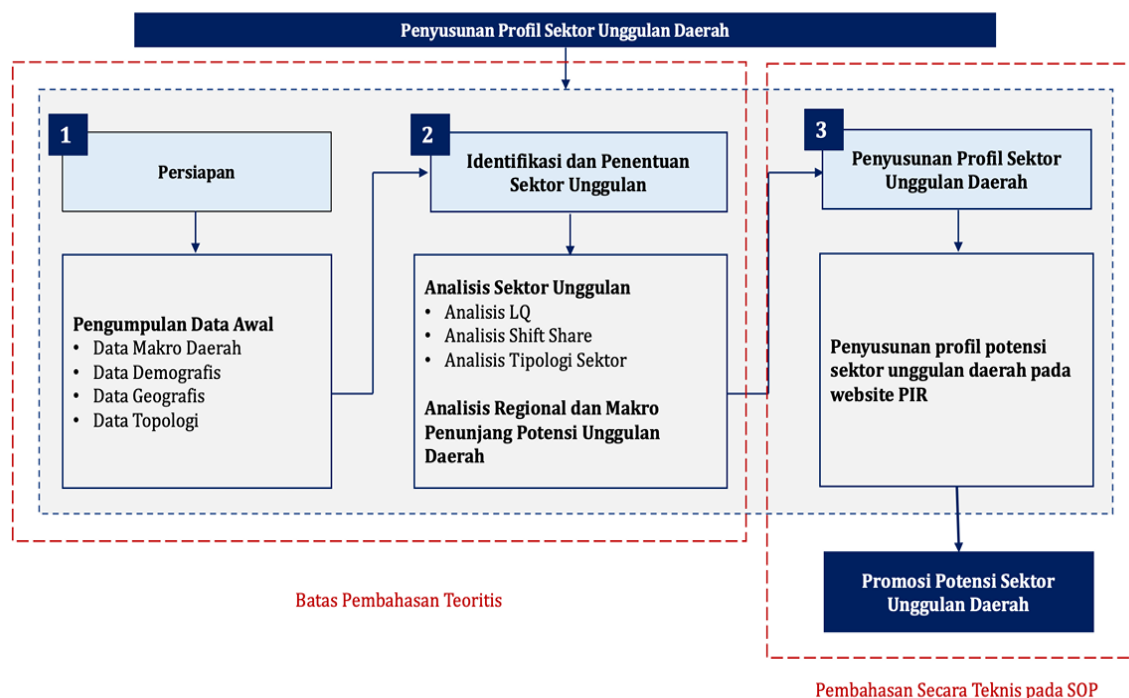
Bab 3

METODOLOGI PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI UNGGULAN DAERAH

3.1. Metodologi Penentuan Potensi Unggulan Daerah

Alur penyusunan potensi unggulan daerah diawali dengan tahap persiapan, tahap identifikasi dan penentuan sektor unggulan daerah hingga penyusunan profil sektor unggulan daerah. Pada tahap persiapan, daerah perlu melakukan pengumpulan data yang terdiri atas data makro daerah, data demografis, geografis dan topologi daerah. Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses identifikasi dan penentuan sektor unggulan daerah dengan menggunakan alat analisis sehingga penentuan sektor unggulan daerah memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah sektor unggulan daerah diketahui dan ditentukan, maka selanjutnya menyusun profil sektor unggulan daerah sebagai bahan promosi kepada para investor. Proses secara rinci disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Alur Penyusunan Potensi Sektor Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kabupaten Muara Enim diidentifikasi dengan menggunakan beberapa alat analisis berikut ini :

1. Analisis Location Quotient (LQ)
2. Shift-Share Analysis (SSA)
3. Analisis Tipologi Sektor
4. Analisis Klassen
5. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah

3.1.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ didefinisikan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis. Tarigan (2014) mendefinisikan LQ sebagai perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara PDRB suatu provinsi dan PDB nasional berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Atau antara PDRB suatu kabupaten/kota dan PDB provinsi berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Untuk perhitungan LQ di Kabupaten Muara Enim, analisis ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV_i}$$

dimana:

LQ = Indeks/koeffisien Location Quotient dari sektor i di Kabupaten Muara Enim

X_{ij} = PDRB sektor i pada Kabupaten Muara Enim j

X_i = PDB sektor i (Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan)

RV_j = Total PDRB pada Kabupaten Muara Enim

RV_i = Total PDB (Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan)

3.1.2. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan *Shift-Share Analysis*

Analisis *Shift Share* (SS) dikembangkan untuk menganalisis perubahan ekonomi dan memperkuat analisis penentuan potensi dan prioritas pengembangan

ekonomi sektoral secara terperinci. Metode ini menggambarkan kinerja sektor perekonomian di suatu kabupaten terhadap perekonomian provinsi dengan melihat aspek daya saing dan pertumbuhan suatu sektor. Analisis ini juga dapat melihat perkembangan dalam membandingkan besar aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah (Priyarsono, dkk., 2007). Teknik ini banyak digunakan dalam menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya pertumbuhan lapangan kerja, diterapkan untuk menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas (Rice & Horton, 2010).

Metode analisis ini bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah (Dij) dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan satu sama lain, yakni *Regional Share* (regional growth component), pertumbuhan sektoral (*Proportional Shift*), dan pertumbuhan daya saing wilayah (*Different Shift*) (Muta'ali, 2015)

3.1.2.1. Komponen Pertumbuhan Regional/ Regional Share (Nij): ditujukan untuk mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum. Komponen pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan output agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan output dari sektor yang sama di wilayah yang besar yang digunakan sebagai acuan yaitu nasional/provinsi;

3.1.2.2. Komponen Pertumbuhan Sektoral/ Proportional Shift (Mij): yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh pergeseran proporsional (*Proportional Shift*) yang mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dibandingkan perekonomian nasional/provinsi. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan (nasional/provinsi) bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.

3.1.2.3. Komponen Keunggulan Kompetitif/Different Shift (Cij) : komponen pertumbuhan ekonomi daerah terjadi karena pergeseran diferensial (*Differential Shift*) yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor di daerah/kabupaten dibandingkan sektor yang sama secara nasional/provinsi. Jika pergeseran positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada sektor yang sama pada perekonomian nasional/provinsi. Metode analisis SS diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor *i* di suatu wilayah *j* (Dij) dengan rumus berikut (Soepono, 1993)

$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

Dimana:

Dij : perubahan PDRB sektor/sub-sektor *i* di Kabupaten Muara Enim

Nij : perubahan PDB sektor/sub-sektor *i* Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional

Mij : perubahan PDRB sektor/sub-sektor *i* di wilayah studi (Kabupaten Muara Enim) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor *i* secara nasional

Cij : perubahan PDRB sektor/sub-sektor *i* di wilayah yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor *i* tersebut di wilayah tersebut

Untuk menghitung komponen Nij, Mij, dan Cij adalah:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi: $Nij = Yij \times rn$
2. Pergeseran proporsional atau pengaruh-pengaruh bauran industri:
 $Mij = Yij (rin - rn)$
3. Pengaruh keunggulan kompetitif: $Cij = Yij (rij - rn)$

Dimana :

Yij = pendapatan di sektor *I* daerah *j*

Yin = pendapatan di sektor *I* nasional

Rij = laju pertumbuhan di sektor *i* daerah *j*

Rin = laju pertumbuhan di sektor *i* nasional

Rn = laju pertumbuhan ekonomi nasional

Interpretasi dari analisis ini adalah, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

3.1.3. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor

Analisis Tipologi Sektor yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi posisi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah. Analisis Tipologi Sektor digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor pertumbuhan sektoral (*Shift-share Analyses/SSA*), dan pemusatan aktivitas ekonomi (*Location Quotient/LQ*). Dari kedua komponen ini jika besaran SSA dan LQ dinyatakan dalam suatu bidang datar, dengan nilai SSA sebagai sumbu vertical (y) dan nilai LQ sebagai sumbu horizontal (x), maka diperoleh empat kategori posisi relatif ekonomi daerah seperti pada gambar berikut:

Location Quotient (LQ)	Shift share Analyses (SSA)	
	Negatif (-)	Positif (+)
Positif (>1)	KUADRAN II Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat	KUADRAN I Sektor maju dan tumbuh cepat
Negatif (<1)	KUADRAN IV Sektor relatif tertinggal	KUADRAN III Sektor maju tapi tertekan

Gambar 3.2. Matrik Tipologi Sektor

Menurut Hill dalam Kuncoro (2004), analisis tipologi sektor yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

1. *High growth and high income* (sektor cepat maju dan cepat tumbuh)
2. *High growth but low income* (sektor berkembang cepat/potensial)
3. *High income but low growth* (sektor maju tapi tertekan)
4. *Low growth and low income* (sektor relatif tertinggal)

Dengan Kriteria sebagai berikut:

1. *High growth and high income*, Kuadran I (SSA positif dan LQ positif/>1) adalah sektor maju dengan pertumbuhan sangat cepat (rapid growth sector/industri or fast growing).
2. *High growth but low income*, Kuadran II (SSA positif dan LQ negatif/1) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan terhambat tapi maju/berkembang (depressed sector/industri yang berkembang/ developing).

3. *Low growth and low income*, Kuadran IV (SSA negatif dan LQ negative <1) adalah sektor depressed sector/industri relatif tertinggal dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap daerah rendah

3.1.4. Penentuan Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Klassen

Analisis ini digunakan untuk memperoleh tambahan pandangan atas klasifikasi posisi/kondisi pertumbuhan sektor ekonomi (lapangan usaha) dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan dan kontribusi masing masing sektor dibandingkan dengan kondisi nasional. Masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang.

Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Menurut Tipologi daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah.
2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata.
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata.
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

Dalam analisis terdapat empat klasifikasi sektor sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu, sektor tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor tertekan (*retarded sector*), sektor sedang tumbuh (*growing sector*), sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*) yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Klasifikasi Sektor Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$	Sektor maju tetapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Keterangan:

r_i = laju pertumbuhan sektor i :

r = laju pertumbuhan PDRB

y_i = adalah kontribusi sektor i terhadap PDRB

y = kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB

3.1.5. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah

Dalam menyusun potensi sektor unggulan daerah, kita perlu mengetahui pertumbuhan ekonomi serta kondisi wilayah (regional). Ada beberapa parameter data yang dibutuhkan untuk mendukung analisa potensi sektor unggulan daerah, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Demografi dan ketenagakerjaan
3. Infrastruktur
4. Geografi dan sumber daya alam
5. Investasi luar negeri dan investasi dalam negeri
6. Ekspor dan impor

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional melalui peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu periode perhitungan tertentu (Putong, 2003). Beberapa hal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain pertumbuhan output (Produk Domestik Bruto) dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara keseluruhan maupun per sektor juga dapat dilihat dari data PDRB suatu daerah yang disajikan atas harga

konstan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis pertumbuhan ekonomi di daerah, maka kita perlu mengetahui nilai dari beberapa indikator berikut ini:

1. PDRB Provinsi/Kabupaten (ADHK)

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (BPS).

2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK)

Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha merupakan suatu ukuran perubahan produksi barang atau jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang dinilai dari lapangan usaha/bidang pekerjaan/kegiatan usaha yang ada di suatu provinsi. Nilai Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha diperoleh dari formulasi antara selisih PDRB tahun saat ini dan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya. Nilai laju pertumbuhan biasanya dalam bentuk persentase.

2. Demografi dan Ketenagakerjaan

Secara umum, demografi membahas berbagai hal yang berkaitan dengan komponen perubahan-perubahan kondisi penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Adapun di dalam potensi dan peluang investasi daerah, demografi merujuk pada komposisi penduduk yang ditinjau dari jumlah penduduk dan usia. Sementara itu, jika membahas mengenai ketenagakerjaan, informasi yang diperlukan adalah jumlah angkatan kerja dan jumlah lulusan perguruan tinggi. Komponen/parameter tersebut untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan suatu daerah dalam menyiapkan sumber daya manusianya, meliputi:

1. Jumlah Penduduk menurut BPS didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk, yaitu angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik,

dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Kegunaan dari informasi laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja (*man power*) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja menurut BPS adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang tidak melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga. Ketersediaan tenaga kerja dalam potensi dan peluang investasi daerah dapat diidentifikasi dari beberapa parameter, antara lain:
 - a. Jumlah Angkatan Kerja, didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
 - b. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi, merupakan suatu angka yang penting untuk diinformasikan, baik dari sisi penduduk asli daerah yang lulus dari perguruan tinggi di luar daerahnya, maupun jumlah lulusan perguruan tinggi dari daerah tersebut.

3. Infrastruktur

Infrastruktur memiliki korelasi positif dalam menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Infrastruktur merupakan suatu faktor penting pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung potensi dan peluang investasi daerah ini dikerucutkan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Aksesibilitas transportasi

Fungsi utama transportasi adalah sebagai sarana mobilitas barang atau perorangan. Hurst (1974)¹² mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Transportasi yang dimaksud adalah transportasi

darat, laut, dan udara. Dalam lingkup yang lebih luas, transportasi dapat berupa angkutan umum yang terbagi menjadi angkutan darat, laut, udara, serta kereta api. Sementara itu, aksesibilitas berarti kemudahan dalam mencapai transportasi yang dimaksud, karena aksesibilitas dalam transportasi merupakan gabungan sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas transportasi meliputi jumlah bandara dan pelabuhan yang dimiliki oleh suatu daerah.

2. Utilitas

Utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang yang diperlukan untuk pelayanan dan kegiatan usaha suatu daerah. Utilitas meliputi ketersediaan listrik dan ketersediaan air bersih. Ketersediaan listrik dapat dilihat pada kapasitas terpasang pembangkit listrik yang ada di daerah tersebut. Jaringan listrik menjadi sangat penting karena sarana produksi dan teknologi saat ini sangat bergantung dengan listrik. Jaringan transmisi sebagian besar dioperasikan oleh PT PLN, kecuali di beberapa daerah seperti Pulau Batam, sebagian kecil pulau di Sulawesi, dan Pulau Papua yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk kepentingan sendiri. Sementara itu, ketersediaan air bersih dapat dilihat dari jumlah produksi air bersih di suatu daerah. Ketersediaan air bersih menjadi sumber daya yang memiliki daya tarik tinggi dimana kemudahan akses sumber air bersih akan mengurangi biaya produksi. Selain itu, informasi ketersediaan air juga menjadi salah satu parameter dalam kemudahan perizinan untuk sektor-sektor tertentu. Ketersediaan listrik dan air bersih di suatu daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam menunjang kegiatan usaha di daerahnya.

3. Aksesibilitas Sarana Penunjang

Sarana penunjang dalam investasi berarti kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai sektor yang akan dikembangkan. Secara umum, aksesibilitas sarana penunjang ditunjukkan oleh jumlah hotel, jumlah sarana pendidikan dan jumlah rumah sakit.

4. Geografi dan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis pada umumnya menekankan pada pendekatan spasial seperti kecenderungan spasial, bentuk-bentuk dan struktur interaksi spasial. Kecenderungan spasial ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi, disebabkan jarak dan kawasan yang dekat dengan sumber daya dan kawasan ekonomi strategis menjadi daya dukung kelancaran sebuah proyek di daerah.

Terdapat dua kriteria atau parameter data yang dapat menunjukkan kondisi geografis dalam mendukung potensi unggulan daerah, yaitu letak geografis wilayah dan luas wilayah:

1. Letak Geografis Daerah

Letak geografis dapat diinformasikan melalui dua cara yaitu: 1) letak longitudinal dan latitude atau garis koordinat yang terdapat dalam peta, 2) letak daerah dengan menyebutkan batasan-batasan daerah sekelilingnya, misalnya batasan wilayah utara/selatan/barat/timur yang berbatasan dengan wilayah X atau dikelilingi gunung/danau, dll. Dengan menyebutkan hal tersebut, wilayah akan lebih mudah dipahami secara umum.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah menurut BPS didefinisikan sebagai luas otoritas daerah secara administratif dalam satuan Km².

5. Investasi Luar Negeri dan Investasi Dalam Negeri

Investasi menunjukkan salah satu gambaran mengenai ekonomi makro daerah karena investasi berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Adanya investasi sebagai tambahan stok modal suatu daerah, maka akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Berdasarkan statusnya, investasi meliputi realisasi investasi asing yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi luar negeri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA).

PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

6. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan dua unsur yang terdapat dalam perdagangan luar negeri. Kedua unsur tersebut sangat penting sebagai parameter investasi dimana ekspor impor akan menggambarkan keunggulan kompetitif dan komparatif pada komoditas maupun sektor tertentu. Keunggulan komparatif akan memberikan informasi bahwasannya Indonesia akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan negara/daerah lainnya. Adapun keunggulan kompetitif akan menggambarkan bahwa strategi produksi Indonesia dapat diunggulkan dibanding dengan negara/daerah lain.

Tabel 3.2 menunjukkan data makro dan regional beserta sumber data yang diperlukan dalam menyusun potensi unggulan daerah.

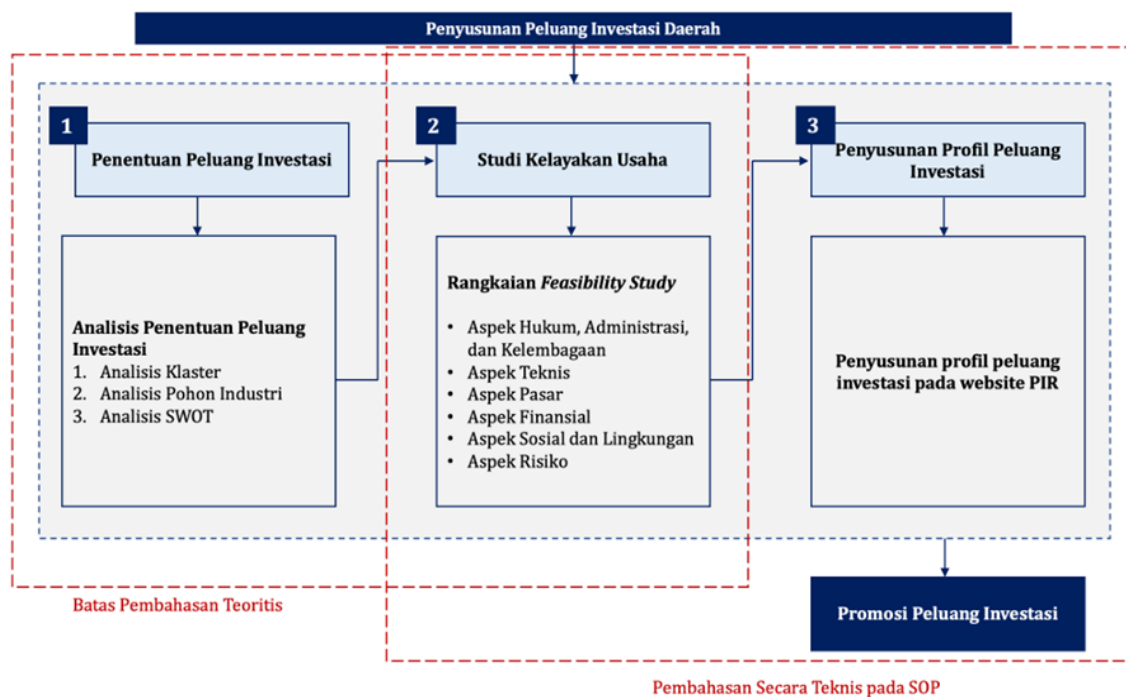
Tabel 3.2. Data Aspek Makro dan Regional

DATA ASPEK MAKRO DAN REGIONAL						
Ruang Lingkup	Variabel/Parameter data		Satuan	Jenis Data	Sumber data	Keterangan
Pertumbuhan ekonomi	PDRB Provinsi (ADHK) 5 Tahun Terakhir		Rupiah	Terbuka	BPS Daerah	<i>Time Series</i>
	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Menurut Lapangan Usaha (ADHK) 5 Tahun Terakhir		Persen	Terbuka	BPS Daerah	<i>Time Series</i>
Demografi dan Ketenagakerjaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi 5 Tahun Terakhir		Persen	Terbuka	BPS Daerah	<i>Time Series</i>
	Jumlah Penduduk		Orang	Terbuka	BPS Daerah	Tahun Berjalan
	Ketersediaan Tenaga Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	Terbuka	BPS Daerah	Tahun Berjalan
		Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi	Orang	Terbuka	Kemendikbud	Tahun Berjalan
Infrastruktur	Aksesibilitas Transportasi	Jumlah Bandara	Jumlah	Semi Terbuka	Dinas Perhubungan Daerah	Tahun Berjalan
		Jumlah Pelabuhan	Jumlah	Semi Terbuka	Dinas Perhubungan Daerah	Tahun Berjalan

DATA ASPEK MAKRO DAN REGIONAL						
Ruang Lingkup	Variabel/Parameter data	Satuan	Jenis Data	Sumber data	Keterangan	
	Aksesibilitas Sarana Penunjang	Jumlah Hotel	Jumlah	Terbuka	BPS Pusat/BPS Daerah	Tahun Berjalan
		Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah	Terbuka	BPS Pusat/BPS Daerah	Tahun Berjalan
		Jumlah Rumah Sakit	Jumlah	Terbuka	BPS Pusat/BPS Daerah	Tahun Berjalan
Utilitas	Ketersediaan Jaringan Listrik	Kapasitas Terpasang	Kilo Watt	Terbuka	PLN (RUPTL)	Tahun Berjalan
	Ketersediaan Air Bersih	Produksi Air Bersih	Meter Kubik	Terbuka	PDAM	Tahun Berjalan
Geografi dan Sumberdaya	Letak Geografis Wilayah		Skala Longitudinal	Terbuka	BPS Daerah	Tahun Berjalan
	Luas Wilayah		Hektar	Terbuka	BPS Daerah	Tahun Berjalan
Investasi Luar dan Dalam Negeri	Relisasi Investasi asing 5 tahun terakhir		USD	Terbuka	BKPM	<i>Time Series</i>
	Relisasi Investasi dalam negeri 5 tahun terakhir		Rupiah	Terbuka	BKPM	<i>Time Series</i>
Ekspor dan Impor	Jumlah dan Nilai Ekspor 5 tahun terakhir		Ton, Rupiah	Semi Terbuka	BPS Pusat	<i>Time Series</i>
	Jumlah dan Nilai Impor 5 tahun terakhir		Ton, Rupiah	Semi Terbuka	BPS Pusat	<i>Time Series</i>

3.2. Metodologi Penentuan Peluang Investasi Daerah

Untuk menentukan peluang investasi daerah dilakukan dengan beberapa pendekatan ilmiah, yaitu : pendekatan analisis klaster, analisis pohon industri, dan kelayakan usaha dari berbagai aspek kelayakan. Alur proses penentuannya disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Alur Proses Penyusunan Peluang Investasi Daerah

3.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Klaster

Istilah “klaster (cluster)” mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi, klaster industri (industrial cluster) merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Klaster pada hakikatnya adalah upaya untuk menglompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga-lembaga terkait. Klaster juga merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas pengembangan ekonomi. Porter (2000) mengartikan klaster sebagai “*a geographically proximate group of interconnected enterprises and associated institutions in a particular field, linked by commonality and complementarity*”.

Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Secara sempit Schmitz (1997) mendefinisikan klaster sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara JICA (2004) memberi batasan klaster sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait dan kelembagaan-kelembagaannya. Ada banyak jenis klaster dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah. Dua kategori yang paling umum ditemui adalah klaster regional dan klaster bisnis. Biasanya, kedua klaster ini ada dalam satu wilayah yang sama.

1. Klaster Regional: adalah kelompok perusahaan yang muncul dalam/dibentuk oleh satu batas wilayah perekonomian tertentu. Klaster ini memperoleh keunggulan dari interaksi antar perusahaan, penggunaan asset bersama, dan atau penyediaan layanan bersama.
2. Klaster Bisnis: adalah sekelompok perusahaan yang kendati memiliki bisnis yang saling berbeda tetapi memiliki aktivitas yang saling berhubungan. Kemudian secara bersama-sama melakukan sinergi dan proses belajar yang

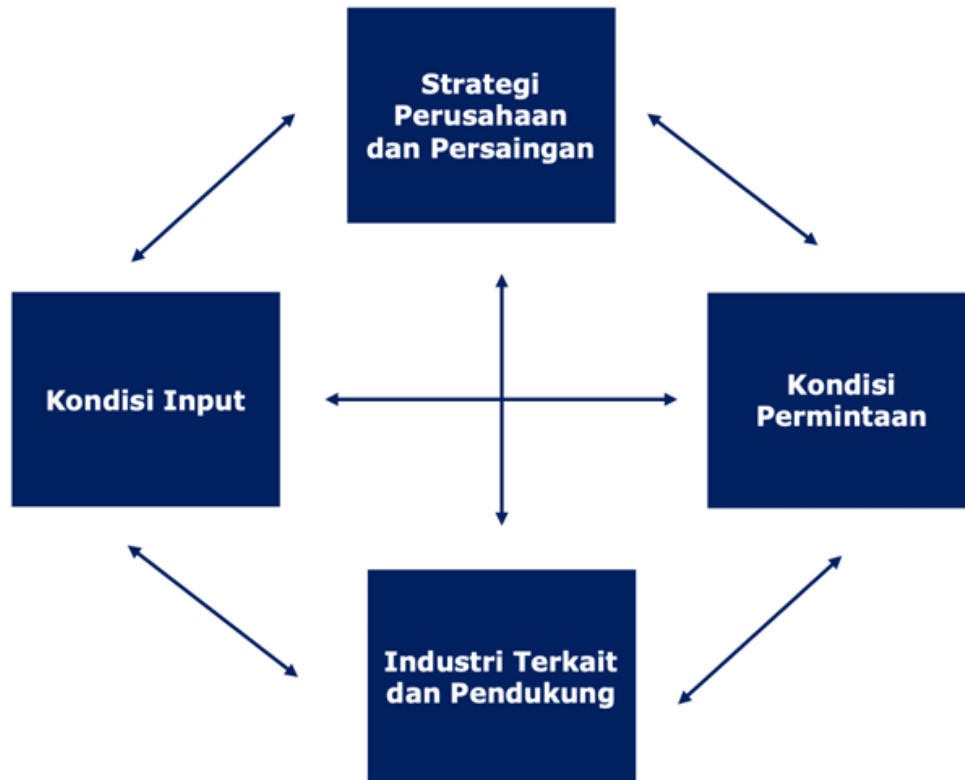
saling menguntungkan. Klaster memiliki pengertian lebih luas dari "sentra" yang telah dikenal umum. Sentra lebih merupakan pengelompokan aktivitas bisnis yang serupa/sejenis disuatu lokasi. Kemudian satu atau beberapa sentra dapat diintegrasikan sebagai upaya pengembangan (perkuatan) suatu klaster industri. Artinya, klaster cakupannya lebih luas daripada sentra, sementara sentra hanya komponen-komponen kecil yang apabila dikumpulkan akan menjadi sebuah klaster. Model pembangunan dengan cara mengklaster (clustering) adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah, kota dan daerah. Namun, mengadopsi pendekatan klaster bukan satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jaringan informal, mengembangkan rantai pasok dan meningkatkan tenaga kerja terampil, semua memiliki peran dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan pertumbuhan.

Meskipun definisi klaster dapat bermacam-macam, namun terdapat beberapa karakteristik umum yang melekat pada konsep ini. Dari sisi output, setidaknya ada 3 dimensi yang dapat diperhatikan, yaitu:

1. *Competitiveness*, tercermin dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik (best practice)
2. *Economic specialization*, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan (klaster otomotif, klaster budaya, klaster bunga potong, dll)
3. *Spatial identity*, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster ataupun yang di luar klaster. Misalnya asosiasi peternak susu lembang. Porter (1990) menganalisa klaster industri dengan pendekatan diamond model seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut ini.

Adapun elemen dari diamond model tersebut terdiri dari:

- (1) faktor input (*factor/input condition*),
- (2) kondisi permintaan (*demand condition*),
- (3) industri pendukung dan terkait (*related and supporting industries*), serta
- (4) strategi perusahaan dan pesaing (*context for firm and strategy*).



Gambar 3.4. Diamond Cluster Model Porter

Kondisi Input :

- SDA (bahan baku, energi)
- SDM
- Sumber alih pengetahuan (pendidikan, pelatihan, perguruan tinggi)
- Infrastruktur Ilmiah (lab pengujian)

Strategi Perusahaan dan Persaingan:

- Bersaing dengan perusahaan lokal/tidak
- Memiliki perundangan monopoli/tidak
- Terbuka/tertutup terhadap pesaing impor dan investasi

Kerjasama:

- Bagaimana menjalin kerjasama antar perusahaan lokal
- Bagaimana asosiasi lokal pada industri ini
- Bagaimana hubungan antara partisipan klaster

Strategi dan Struktur:

- Apa saja strategi lokal yang unik

Kondisi Permintaan Besarnya permintaan lokal:

- Konsumsi perkapita

- Permintaan swasta
- Persentase penjualan klaster

Kualitas permintaan lokal:

- Peraturan tentang standar (produk, keamanan, lingkungan)
- Aturan tentang info bagi konsumen
- Belanja pemerintah

Industri Pendukung Terkait Pemasok:

- Tingkat sumberdaya lokal
- Pemasok material dan komponen lokal
- Pemasok peralatan lokal
- Pemasok jasa lokal
- Keterbukaan terhadap pasokan impor

Industri terkait:

- Menggunakan input/skill/teknologi yang sama
- Industri terkait bersifat komplementer

3.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri

Peluang investasi yang terpilih perlu dikembangkan semaksimal mungkin. Salah satu yang dapat dijadikan peluang investasi daerah misalnya sebuah komoditas. Poin penting dalam mengembangkan suatu komoditas adalah meningkatkan kualitas komoditas tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomis, penggunaan, serta manfaat tinggi. Oleh sebab itu perlu dibuat pohon industri untuk masing–masing komoditas terpilih sebagai gambaran produk–produk yang dapat dihasilkan dari komoditas tersebut. Melalui pengembangan produk olahan turunan (diverifikasi) berbahan untuk tanaman pangan dan perkebunan, ternak dan perikanan seperti jagung, ketela rambat, kelapa, kambing, dan ikan, maka akan memberikan nilai tambah yang baik pada produk.

Diversifikasi atau penganekaragaman produk olahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya serap pasar atau meningkatkan permintaan. Produk olahan dapat berupa produk inovatif, produk modifikatif, dan produk inisiatif. Beragamnya pilihan produk olahan memberikan peluang yang sangat besar pelaku usaha baik industri kecil, sedang maupun besar untuk berinvestasi, terutama juga bagi peningkatan kesejahteraan petani dengan daya beli produk unggulan yang memuaskan. Informasi yang diperlukan dalam mengembangkan produk unggulan

daerah adalah: ketersediaan pasar, modal, bahan baku, sarana dan prasarana produksi, harga, dan manajemen usaha.

3.2.3. Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha adalah pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan pada usaha yang akan diinvestasikan. Menurut Krieger *et al.* (2016), studi kelayakan adalah prosedur untuk memprediksi hasil pemeriksaan investigasi, atau penilaian skema yang direncanakan agar mendapatkan kemungkinan keuntungan. Kemudian Purnomo, Riawan, & Sugiarto (2017) mengemukakan bahwasannya *feasibility study* merupakan pertimbangan mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha atau proyek. Oleh karenanya, dalam penyusunan peluang investasi daerah perlu mengambil aspek-aspek yang terdapat dalam *feasibility study* agar gagasan usaha/proyek yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kelayakannya secara profesional.

3.2.3.1. Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Untuk memulai usaha, dibutuhkan kelegalan dalam proses pembangunannya, hal ini dikarenakan dalam pembentukan suatu usaha akan berhubungan dengan pemerintah dalam hal partisipasi ekonomi usaha tersebut. Oleh karenanya, analisis dari aspek hukum sangat diperlukan sebagai pertimbangan. Analisis aspek hukum dilakukan untuk mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis aspek hukum, pelaku usaha/investor dapat menganalisis kebutuhan legalitas usaha yang dijalankan, ketepatan bentuk badan hukum dengan proyek yang akan dijalankan, dan kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan (Purnomo et al, 2017).

Setiap proyek atau bisnis yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut, sementara aspek hukum yang harus diteliti dalam suatu studi kelayakan bisnis menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dilaksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku. Analisis aspek ini hanya berupa identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis

aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi adalah:

1. Kesesuaian terhadap Kebijakan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
2. Kesesuaian terhadap Kebijakan Sektoral, seperti : RPIK Kabupaten
3. Kesesuaian terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
4. Kesesuaian terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku
5. Perizinan Penggunaan Lokasi/Bangunan
6. Dukungan Pemerintah

Kesesuaian terhadap perizinan aspek hukum atau legal bertujuan salah satunya adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dalam aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Insentif/Dukungan Pemerintah Insentif yang dibahas adalah berupa dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Insentif yang perlu diidentifikasi yaitu:

1. Peraturan perundangan khusus mengenai sektoral/komoditas/usaha tertentu, berikut dengan ketentuan, kriteria, dan alur proses pengurusannya
2. *Tax allowance* mengenai sektoral/komoditas/usaha tertentu, berikut dengan ketentuan, kriteria, dan alur proses pengurusannya
3. Fasilitas impor mengenai sektoral/komoditas/usaha tertentu, berikut dengan ketentuan, kriteria, dan alur proses pengurusannya
4. *Super deduction* (pengurangan pajak) mengenai sektoral/komoditas/usaha tertentu, berikut dengan ketentuan, kriteria, dan alur proses pengurusannya.

3.2.3.2. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang menilai suatu usaha dikatakan layak dilihat dari teknis operasional secara rutin dan teknologi yang akan digunakan, sehingga dalam saat operasional tidak terjadi kesalahan fatal yang akan membuat biaya produksi semakin tinggi, dan faktor-faktor lainnya yang akan membuat kerugian di masa yang akan datang (Iskandar *et al*, 2015). Tujuan dari aspek teknis adalah untuk meyakini secara teknis bahwa rencana pengembangan usaha layak

dilaksanakan. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam aspek teknis meliputi lokasi usaha, termasuk dengan infrastruktur utama dan penunjang, proses produksi, dan fasilitas produksi.

Aspek teknis dapat diukur dengan lima indikator, antara lain:

1. Infrastruktur utama dan penunjang kebutuhan infrastruktur sebagai pemenuhan kebutuhan dasar ditinjau berdasarkan kebutuhan air bersih, listrik, telekomunikasi, sampah, dan limbah.
2. Aksesibilitas, merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karakteristik sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan.
3. Ketersediaan bahan baku
4. Teknis rancangan tata letak kawasan
5. *Supply Chain*, yaitu aktivitas menganalisa dan merancang ulang kondisi rantai pasok untuk mendapatkan kondisi yang lebih optimal. Analisis ini akan menghasilkan rantai pasok yang optimal dalam produksi dan operasi.
6. Ketersediaan Teknologi

3.2.3.3. Aspek Pasar

Aspek pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar, dan hal ini juga memberikan manfaat untuk memudahkan dalam transaksi. Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, *market share* yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai *market share* yang diharapkan (Purnomo et al., 2017).

Menurut Subagyo (2008), kajian terhadap aspek pasar pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi atau peluang pasar yang bisa dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada aspek ini yaitu: pasar dan jenisnya, analisis penawaran dan

permintaan serta analisis tren perkembangan permintaan. Kajian atas peluang pasar ini merupakan fondasi bagi perencanaan dan strategi pemasaran. Analisis aspek pasar terdiri dari dua parameter utama yaitu : 1. Proyeksi Pasar, mencakup: *supply* dan *demand* 2. Daya Saing, mencakup: keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif

3.2.3.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

CAPEX atau biaya investasi yang dikeluarkan dalam mendanai proyek, adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset jangka panjang demi keberlangsungan bisnisnya. Dalam kata lain, CAPEX dimaksudkan untuk memperkuat perusahaan dalam meningkatkan profit yang dicita-citakan. Komponen CAPEX terdiri dari *concession asset* saat ini, ditambah dengan tambahan CAPEX atau tambahan biaya untuk konstruksi.

2. OPEX (*Operational Expenditure*)

OPEX yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berkelanjutan demi menjalankan bisnisnya. *Operational Expenditure* (OPEX) misalnya *salary and benefit, office administration, rental, professional fee, transportation and traveling, fuel, electricity, and water, publication, repair & maintenance of fixed assets, dan management fee.*

3. NPV

NPV dalam metode ini menggunakan faktor diskonto. Semua pengeluaran dan penerimaan (dimana saat pengeluaran serta penerimaannya adalah dalam waktu yang tidak bersamaan) harus diperbandingkan dengan nilai yang sebanding dalam arti waktu. Dalam hal ini berarti kita harus mendiskonkan nilai-nilai pengeluaran dan penerimaan tersebut ke dalam penilaian yang sebanding (sama). Pengeluaran dilakukan pada saat mula-mula (sekarang), sedangkan penerimaan baru akan diperoleh di masa-masa yang akan datang, padahal nilai uang sekarang adalah tidak sama (lebih tinggi) dari nilai uang dikemudian hari. Oleh karena itu, jumlah estimasi penerimaan itu harus kita diskonkan, kita jadikan jumlah-jumlah nilai sekarang (penilaian yang sebanding dengan pengeluarannya). Net Present Value dari investasi dapat diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NPV = PWB - PWC$$

$$PWB = \sum_{t=0}^n Cc_t(FPB)$$

$$PWC = \sum_{t=0}^n Cc_t(FPB)$$

$$PW = \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

Dimana :

NPV = Net present value

PWB = Present Worth of Benefit

PWC = Present Worth of Cost

Cb = Cash flow benefit

Cc = Cash flow

Cost n = Umur investasi

FPB = Faktor bunga present

t = Periode waktu

Rt = Arus kas bersih dalam waktu t

Apabila didapat nilai NPV sebagai berikut :

NPV > 0, proyek menguntungkan

NPV < 0, proyek tidak layak diusahakan

NPV = 0, berarti netral atau berada pada break even point (BEP)

4. IRR Internal Rate of Return

Tingkat diskon (*discount rate*) yang menjadikan sama antara *present value* dari penerimaan *cash* dan *present value* dari nilai atau *investasi discount rate*/tingkat diskon yang menunjukkan *net present value* atau sama besarnya dengan nol. Tetapi *internal rate of return* dapat dicari dengan menggunakan rumus: $IRR = i1 + \frac{NPV1}{NPV1 - NPV2} \times (i2 - i1)$.

dimana :

IRR = Internal Rate of Return yang akan dicari

i1 = Internal Rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-1

i2 = Internal Rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-2

NPV1 = Net Present Value dari hasil Internal Rate

NPV2 = Net Present Value dari hasil dari Internal Rate

Untuk pengambilan keputusan kriteria IRR ini dengan cara dibandingkan dengan Minimum *Attractive Rate of Return* atau dapat dibandingkan dengan biaya kapital (*Weighted Average Cost of Capital*).

IRR > WACC (Weighted Average Cost of Capital) dilaksanakan.

IRR < WACC (Weighted Average Cost of Capital) dilaksanakan. investasi layak
investasi tidak layak

WACC = (Wh x Kh) + (We x Ke)

Dimana; Wh = Persentase bobot hutang dalam struktur pembiayaan

Kh = Biaya hutang

We = Persentase bobot dana sendiri dalam struktur pembiayaan

Ke = Biaya modal dana sendiri

5. Payback Period

Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain Payback Period merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash flownya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Metode ini memiliki suatu kelemahan yaitu mengabaikan nilai waktu daripada uang (time value of money). Untuk mengatasi salah satu kelemahan dari metode payback period, yaitu tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka dicoba untuk memperbaiki metode tersebut dengan cara mempresent-aluekan arus kas masuk (cash inflow) dari rencana investasi tersebut kemudian baru dihitung payback period-nya. Dengan demikian arus kas yang dipakai adalah arus kas yang telah didiskontokan atas dasar cost of capital/interest rate/required rate of return atau opportunity cost. Rumus dari Discounted Payback Period adalah:

$$\text{Discount PBP} = n + \frac{a - b}{c} \times 12 \text{ bulan}$$

dimana:

n = tahun terakhir dimana arus kas belum bisa menutup initial investment

a = jumlah initial investment (total investasi)

b = jumlah kumulatif arus kas bersih yang telah di kalikan df sampai tahun ke-n

c = jumlah arus kas bersih yang telah di kalikan df tahun ke- $n+1$

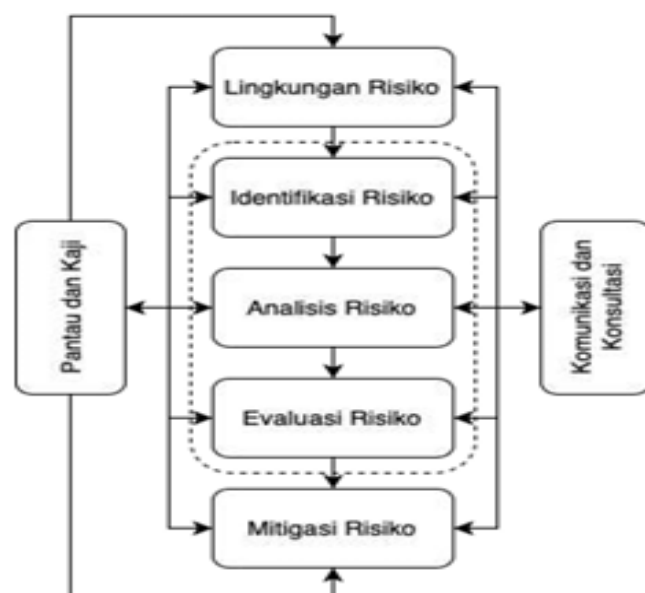
3.2.3.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Aspek ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh atau dampak usaha yang dijalankan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dampak dan manfaat sosial ekonomi pada parameter sosial ekonomi diukur melalui seberapa besar *multiplier effect* keberadaan proyek kepada kesejahteraan penduduk sekitar proyek, yang dinilai dari *income* per kapitanya. Adapun dampaknya pada wilayah adalah kenaikan PDRB wilayah tempat proyek tersebut dijalankan.

Dampak Lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya (Umar, 2001).

3.2.3.6. Aspek Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian. Manajemen risiko membutuhkan prinsip untuk mengetahui sejauh mana dan kepada pihak mana risiko sebaiknya dialokasikan. Secara garis besar, manajemen risiko akan mengacu pada alur yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5. Diagram Manajemen Risiko

Identifikasi, Evaluasi, Mitigasi Risiko Utama

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk menentukan risiko yang mungkin terjadi pada rencana proyek yang akan dibangun dan mengenal karakteristiknya, dampak yang mungkin dihasilkan, durasi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasinya. Tujuan dari dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menciptakan solusi untuk mencegahnya. Risiko yang diidentifikasi dalam sebuah proyek meliputi:

1. Risiko Permintaan, yaitu risiko yang terkait dengan permintaan atas produk atau jasa perusahaan. Permintaan konsumen menjadi hal penting karena setiap industri memiliki ketergantungan terhadap permintaan konsumen sehingga tingkat kejadian risiko permintaan merupakan hal yang perlu dilakukan.
2. Risiko Lahan, yaitu risiko yang terkait dengan pembebasan lahan, kondisi dan lokasi lahan, serta struktur dari lahan tersebut. Identifikasi lahan menjadi hal utama yang penting dalam mewujudkan pengembangan industri agar lahan yang dipakai dalam industri tidak memiliki masalah dalam pembangunan sehingga lahan yang digunakan merupakan lahan yang clean and clear untuk dapat mengembangkan proyek investasi.
3. Risiko Perizinan, yaitu izin berdasarkan tingkatan risiko dan ancaman lingkungan eksternal dari proyek investasi yang akan dikembangkan. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha sesuai standar risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses perizinan industri sejalan dengan kondisi pembebasan lahan clean and clear. Hambatan yang umumnya terjadi adalah keterlambatan proses perizinan yang berkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat, yaitu benturan kepentingan antara masyarakat dan pelaku industri yang berbeda pada sekitar kawasan.
4. Risiko Infrastruktur Pendukung, adalah kemungkinan infrastruktur di suatu daerah mungkin tidak memadai untuk menyelesaikan suatu proyek sehingga dibutuhkan infrastruktur pendukung agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
5. Risiko Desain Proyek, yaitu risiko yang keberadaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari segi desain yang telah direncanakan. Permasalahan yang akan menjadi risiko desain yaitu jika terdapat perbedaan desain antara rencana

- dengan realisasi yang dilakukan dan dapat menimbulkan efek atau permasalahan.
6. Risiko Regulasi dan Politik, yaitu risiko perubahan regulasi dan hukum yang mungkin memengaruhi industri atau bisnis. Perubahan kepemimpinan dapat mengubah regulasi yang telah ada.
 7. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar, yaitu potensi dalam bidang keuangan yang mengalami kerugian akibat kegagalan, kehilangan, ketidakefisienan dalam menjalankan transaksi keuangan, transaksi nilai tukar, struktur keuangan, prosedur keuangan, kebocoran pendapatan, berkurangnya kemampuan membayar, hingga kehilangan dukungan keuangan di dalam suatu proyek.
 8. Risiko Konstruksi Bangunan, yaitu risiko yang dimiliki suatu konstruksi bangunan untuk dapat menahan beban. Apabila terdapat risiko konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan beban yang telah diantisipasi maka akan menyebabkan proyek tidak dapat berjalan sesuai rencana.
 9. Risiko Operasional, dimana risiko ini timbul karena kenaikan biaya operasional dan maintenance sehingga dapat menimbulkan kesalahan estimasi pada biaya lifecycle, turn over karyawan, dan lainnya. Terjadinya risiko tersebut membuat proyek investasi tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
 10. Risiko Force Majeure dan Lingkungan, yaitu risiko yang dapat terjadi karena adanya gangguan keamanan, bencana alam, cuaca ekstrim, pandemik, dan lain-lain. Terjadinya risiko tersebut membuat proyek investasi tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
 11. Risiko Sumber Material, yaitu risiko yang terkait dengan kebutuhan sumber material untuk proyek yang sedang dilaksanakan. Jika kekurangan sumber material, maka akan membuat proyek investasi tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Penilaian risiko dalam manajemen risiko adalah sebuah kegiatan dalam memprioritaskan risiko-risiko untuk tindakan atau analisis selanjutnya dengan cara menilai dan menyatukan kemungkinan terjadinya dampak dari risiko tersebut. Penilaian risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, di mana dalam menganalisis secara kualitatif, risiko dapat dibedakan menjadi risiko yang memiliki dampak kecil, sedang, maupun besar. Penentuan setiap risiko dapat dianalisis dengan seberapa sering kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampaknya terhadap proyek investasi. Prinsip

yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko bahwa risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek. Pada proses manajemen risiko, diperlukan penanganan dan pengendalian (risk treatment dan risk control).

Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko terjadi maupun pasca terjadinya risiko. Jenis penanganan risiko yaitu menanggung risiko, menghindari risiko, menghilangkan risiko, meminimalisir risiko, dan mengalihkan atau mengalokasikan risiko kepada pihak lain.

Outstanding issue adalah masalah-masalah yang harus ditindaklanjuti berdasarkan isu-isu kritis yang ada dalam pelaksanaan proyek dan perlu disertai dengan rencana serta strategi penyelesaiannya.

Bab 4

POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

4.1. Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim

Potensi investasi unggulan Kabupaten Muara Enim dianalisis melalui berbagai metode ilmiah untuk mengidentifikasi potensi yang tersedia serta prioritas dari pilihan potensi yang terpilih dengan berbagai pertimbangan dari beberapa sektor yang ada. Hasil analisis potensi yang telah dilakukan disajikan pada uraian hasil analisis berikut ini.

4.1.1. Potensi Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Basis dan Non Basis (LQ dan DLQ)

Location Quotient (LQ) adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu sektor ekonomi di suatu daerah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (misalnya tingkat nasional atau provinsi). *Location Quotient* atau yang sering disebut dengan metode LQ memiliki dua rumus perhitungan, yaitu *Statistic Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ).

Statistic Location Quotient (SLQ) digunakan untuk mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi menjadi sektor basis dan non-basis. Hasil perhitungan SLQ dikategorikan ke dalam tiga kelompok: jika lebih dari 1, sektor tersebut dianggap sebagai sektor basis; jika sama dengan 1, sektor tersebut merupakan sektor non-basis yang mampu memenuhi kebutuhan daerah; dan jika kurang dari 1, sektor tersebut termasuk sektor non-basis yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah. *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sektor basis di masa depan. Hasil DLQ diklasifikasikan menjadi dua: lebih dari 1 menunjukkan sektor dengan potensi unggulan, sedangkan kurang dari atau sama dengan 1 menunjukkan sektor tanpa potensi unggulan. Kombinasi hasil SLQ dan DLQ membagi sektor ekonomi ke dalam empat kriteria: sektor yang tetap basis, sektor yang berubah dari basis

menjadi non-basis, sektor non-basis yang berpotensi menjadi basis, dan sektor yang tetap non-basis di masa mendatang.

Berdasarkan analisis hasil *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Muara Enim selama periode 2013 hingga 2023, terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki peran signifikan dalam perekonomian lokal, dengan nilai rata-rata indeks sebesar 2,53. Angka ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang kuat, dengan kontribusi ekonomi yang jauh melebihi rata-rata regional, sehingga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keunggulan sektor ini mencerminkan potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut serta infrastruktur yang mendukung eksploitasi dan pengelolaan hasil tambang.

Di sisi lain, terdapat 15 sektor yang non basis yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 4.1.
Indeks *Statistic Location Quotient* Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023

Lapangan Usaha	Tahun											Rata-rata	Kategori
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.61	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.62	0.58	0.55	0.52	0.60	Non Basis
Pertambangan dan Hasil-hasilnya	2.28	2.43	2.49	2.51	2.56	2.62	2.58	2.44	2.59	2.62	2.68	2.53	Basis
Industri Pengolahan	0.64	0.64	0.65	0.63	0.61	0.59	0.60	0.66	0.62	0.58	0.55	0.62	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1.05	1.08	0.95	1.17	1.04	1.11	1.11	1.22	1.06	0.97	0.96	1.06	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.17	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.18	Non Basis
Bangunan / Konstruksi	0.47	0.44	0.41	0.43	0.43	0.40	0.39	0.41	0.38	0.36	0.35	0.41	Non Basis

Lapangan Usaha	Tahun											Rata-rata	Kategori
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.49	0.51	0.49	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.45	0.41	0.48	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	0.55	0.57	0.56	0.53	0.52	0.50	0.50	0.48	0.49	0.53	0.50	0.52	Non Basis
Akomodasi dan Makan Minum	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.28	0.29	0.28	0.25	0.31	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.22	0.20	0.18	0.17	0.21	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.27	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.19	0.19	0.22	Non Basis
Real Estate	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.27	0.25	0.24	0.29	Non Basis
Jasa Perusahaan	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	Non Basis
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.42	0.48	0.47	0.43	0.44	0.41	0.41	0.44	0.41	0.38	0.37	0.42	Non Basis
Jasa Pendidikan	0.49	0.56	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.41	0.40	0.47	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.59	0.63	0.60	0.56	0.56	0.55	0.55	0.59	0.51	0.47	0.44	0.55	Non Basis
Jasa Lainnya	0.28	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.26	0.25	0.24	0.29	Non Basis

Berdasarkan Tabel 4.2, analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) di Kabupaten Muara Enim mengidentifikasi tujuh sektor basis yang menunjukkan potensi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai DLQ sebesar 1,07, menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian lokal. Sektor pertambangan dan hasil lainnya dengan DLQ 1,39 memperkuat statusnya sebagai pilar ekonomi utama kabupaten, didukung oleh sumber daya tambang yang melimpah. Industri pengolahan memiliki DLQ sebesar 1,6, menandakan potensi besar dalam mengembangkan kapasitas pengolahan lokal dan memajukan sektor industri. Sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai DLQ 1,15 mengindikasikan kontribusinya yang mencukupi kebutuhan lokal serta potensi berkembang menjadi lebih dominan. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan DLQ 1,53 menunjukkan pentingnya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Sektor jasa perusahaan memiliki DLQ sebesar 1, yang menandakan

kemampuannya memenuhi kebutuhan lokal. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dengan DLQ 1,03 menunjukkan peran pentingnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua sektor ini secara keseluruhan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim di masa mendatang.

Tabel 4.2.
Indeks *Dynamic Location Quotient* Kabupaten Muara Enim tahun 2013-2023

Lapangan Usaha	Tahun											Rata-rata	Kategori
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.78	1.01	1.19	1.62	1.79	0.86	0.87	0.79	0.75	1.01	1.07	1.07	Basis
Pertambangan dan Hasil-hasilnya	1.62	0.77	2.16	1.31	1.32	1.16	1.06	0.37	1.55	2.33	1.69	1.39	Basis
Industri Pengolahan	1.14	0.06	1.47	0.67	0.79	1.10	1.61	3.82	0.85	0.31	0.98	1.16	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1.34	0.86	1.00	1.29	1.10	1.62	1.03	0.67	1.03	1.86	0.89	1.15	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.91	0.79	1.02	3.26	1.37	1.09	1.00	0.66	0.16	2.29	3.25	1.53	Basis
Bangunan / Konstruksi	0.88	1.12	1.03	0.71	0.92	0.94	1.48	2.02	-0.13	1.26	0.63	0.99	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.17	1.61	1.15	0.88	1.16	1.04	1.17	-1.31	0.89	0.62	0.80	0.83	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	0.95	1.37	0.80	0.67	0.91	1.03	1.10	0.03	-2.91	1.16	1.22	0.57	Non Basis
Akomodasi dan Makan Minum	1.32	1.02	0.60	0.80	0.93	0.75	0.86	0.12	1.28	0.47	0.59	0.79	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	1.32	1.02	0.99	0.65	0.87	0.92	0.92	0.72	1.01	0.69	0.65	0.89	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.95	1.05	1.00	0.74	1.04	1.15	-2.40	0.48	0.71	3.91	0.63	0.84	Non Basis
Real Estate	1.03	1.04	0.78	0.81	1.00	0.84	1.04	1.06	0.68	0.62	0.91	0.89	Non Basis
Jasa Perusahaan	0.86	1.16	1.03	0.76	0.92	0.83	0.83	-0.56	1.51	1.64	1.99	1.00	Basis
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.61	0.57	0.75	3.31	0.64	1.13	1.84	0.45	1.06	0.85	0.93	0.72	Non Basis
Jasa Pendidikan	1.11	1.31	1.03	1.15	2.13	1.01	0.84	-0.85	0.60	1.41	1.12	0.99	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.85	0.92	1.03	1.48	0.93	1.15	0.60	0.71	0.50	0.99	1.20	1.03	Basis
Jasa Lainnya	-1.98	0.96	1.03	1.49	0.93	0.71	0.75	0.56	0.54	1.22	1.23	0.68	Non Basis

Analisis DLQ di Kabupaten Muara Enim mengungkapkan bahwa tidak ada sektor unggulan saat ini yang diperkirakan akan kehilangan potensinya dalam waktu dekat, menunjukkan stabilitas dalam sektor-sektor yang menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, terdapat lima sektor yang saat ini belum mencapai status unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; jasa perusahaan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang bisa dimaksimalkan dengan intervensi kebijakan yang tepat, investasi, serta inovasi teknologi. Pengembangan sektor-sektor tersebut dapat membantu diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang sudah mapan, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang efektif, sektor-sektor ini berpeluang untuk berkembang menjadi sektor basis di masa mendatang, mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4.3.
Komparasi Sektor Unggulan SLQ dan DLQ Kabupaten Muara Enim

Kriteria	DLQ < 1	DLQ > 1
SLQ < 1	<p>Sektor Belum Unggul yang Belum Berpotensi Unggulan (I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan/Konstruksi 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Akomodasi dan Makan Minum 5. Informasi dan Komunikasi 6. Jasa Keuangan dan Asuransi 7. Real Estate 8. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9. Jasa Pendidikan 10. Jasa Lainnya 	<p>Sektor Belum Unggul yang Berpotensi Unggulan (II)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Jasa Perusahaan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
SLQ > 1	<p>Sektor Unggulan yang Tidak Berpotensi Unggulan Lagi (III)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. – 	<p>Sektor Unggulan yang Masih Berpotensi Unggulan (IV)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Hasil-hasilnya 2. Pengadaan Listrik dan Gas

4.1.2. Potensi Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Shift-Share Analysis

Analisis Shift-share adalah metode alternatif yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Dengan metode ini, pertumbuhan suatu sektor ekonomi dapat dinilai berdasarkan cepat atau lambatnya peningkatan wilayah tersebut, termasuk mengidentifikasi sektor yang memberikan kontribusi terhadap daya saing wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Analisis Shift-share Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan menghitung Pertumbuhan Nasional (PN) atau Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim dari sisi eksternal. Pertumbuhan Proporsional (PP) digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan di Kabupaten Muara Enim, sedangkan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) digunakan untuk melihat tingkat daya saing Kabupaten Muara Enim terhadap wilayah lain.

Berdasarkan analisis *shift share*, diketahui bahwa beberapa sektor di Muara Enim mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (PN). Sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih kecil ini meliputi penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya (Tabel 4.4). Temuan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing di tingkat daerah jika dibandingkan dengan dinamika ekonomi yang terjadi di provinsi.

Analisis mendalam terhadap komponen Pertumbuhan Nasional (PN) dari Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sektor yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim adalah sektor pertambangan dan penggalian. Temuan ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, di mana sektor tersebut menjadi motor utama yang mendorong peningkatan kinerja ekonomi di Sumatera Selatan. Kemudian, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor primer dan industri dasar memainkan peran penting sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim, yang mencerminkan ketergantungan daerah ini terhadap perkembangan di tingkat provinsi. Di sisi lain, sektor jasa perusahaan menunjukkan

pengaruh terkecil, menandakan bahwa sektor ini kurang responsif terhadap perubahan ekonomi di tingkat provinsi, dan memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kontribusinya.

Selanjutnya, analisis nilai Pertumbuhan Proporsional (PP) menunjukkan bahwa beberapa sektor mengalami nilai negatif, termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; jasa keuangan; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa lainnya. Nilai negatif ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan di tingkat provinsi yang berdampak pada kinerja sektor-sektor yang sama di Muara Enim. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merancang intervensi yang strategis guna meningkatkan kinerja sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan lamban ini, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) di Muara Enim, terlihat adanya variasi signifikan dalam daya saing antar sektor ekonomi. Sektor dengan pertumbuhan pangsa positif menunjukkan daya saing yang tinggi dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah ini. Salah satu sektor unggulan adalah Pertambangan dan Penggalian, dengan nilai PPW sebesar 7.849,45 miliar atau 49,06%, menjadikannya sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Muara Enim. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan nilai PPW sebesar 10,50 miliar atau 42,82%, yang mungkin dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan energi terkait perkembangan sektor industri. Sektor Real Estate turut mengalami peningkatan dengan PPW sebesar 34,58 miliar atau 9,74%, menunjukkan pertumbuhan properti sebagai dampak dari ekspansi sektor lainnya, seperti pertambangan dan perdagangan.

Namun, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan pangsa negatif, yang menandakan kurangnya daya saing dibandingkan sektor sejenis di wilayah yang lebih tinggi. Misalnya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki PPW negatif sebesar -39,27 miliar atau -35,05%, menunjukkan tantangan dalam menarik permintaan yang cukup kuat untuk berkembang. Selain itu, sektor Jasa Keuangan juga mencatatkan nilai negatif dengan PPW sebesar -2,21 miliar atau -1,20%, yang bisa mengindikasikan terbatasnya perkembangan layanan keuangan di Muara Enim. Hal ini menggarisbawahi adanya ketimpangan antar sektor di

wilayah tersebut, di mana sektor-sektor utama masih mendominasi sementara beberapa sektor jasa menghadapi tantangan dalam daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Tabel 4.4.
Perhitungan Shift Share Analysis Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023

Sektor	PNij		PPij		PPWij		PBij	
	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.323.273	64,26294	-15.428.070,6	-34.4415	156.805.2	4.337	-15271265	-422.411
B. Pertambangan & Penggalian	10.281.902	64,26294	-1.977.185	-3.83825	7.849.448	49.059	5872263	36.702
C. Industri Pengolahan	2.327.506	64,26294	-4.583.840	-10.7342	155032.7	4.280	-4428807	-122.28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.758,17	64,26294	122.351,2	62.76009	10499.07	42.815	132850.3	541.773
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.883.859	64,26294	-60.861,6	-23.3754	1572.881	26.025	-59288.8	-981.001
F. Konstruksi	960.438,2	64,26294	-6.236.837	-22.9229	21753.89	1.455	-6215083	-415.851
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	896.271,5	64,26294	4.376.773	19.31025	48787.52	3.498	4425560	317.314
H. Transportasi dan Pergudangan	178.490,3	64,26294	445.451,5	10.88848	52628.82	18.948	498080.3	179.326
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.002,83	64,26294	1.631.740	62.6202	-39266.6	-35.045	1592473	1421.291
J. Informasi dan Komunikasi	122.602,8	64,26294	3.683.598	53.98208	-31415.7	-16.466	3652182	1914.312
K. Jasa Keuangan	117.877,3	64,26294	-1.979.967	-32.2644	-2208.97	-1.204	-1982176	-1080.62
L. Real Estate	159.124,8	64,26294	1.334.673	20.82891	-22476.5	-9.077	1312196	529.9336
M, N. Jasa Perusahaan	2.423.677	64,26294	-14.554,9	-6.08612	259.7612	6.887	-14295.1	-379.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	284.395,8	64,26294	-860.374	-11.8789	-36820.2	-8.320	-897194	-202.733
P. Jasa Pendidikan	228.100,2	64,26294	-670.580	-11.3867	34584.23	9.743	-635996	-179.18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.760,81	64,26294	41.,693,76	2.786873	-8957.31	-7.911	32736.45	28.9131
R,S,T,U. Jasa Lainnya	48.835,98	64,26294	-290.558	-15.2663	-3189.27	-4.196	-293748	-386.541

Komponen Pergeseran Bersih (PB) dirancang untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan progresif, yaitu sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif (+) berdasarkan penjumlahan komponen PPij dan PPWij. Berdasarkan perhitungan, terdapat enam sektor ekonomi yang memiliki nilai positif (+) atau PBij > 0, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; perdagangan

besar dan eceran; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; real estate; jasa Perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang progresif. Sebaliknya, terdapat sembilan sektor ekonomi yang mencatat nilai negatif (-) atau $PBij < 0$, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang lamban.

Tabel 4.5.
Kuadran Shift-share Sektor Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2023

<p>Kuadran I Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing: PP (+), PPW (+)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan 	<p>Kuadran II Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing PP (-), PPW (+)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5. Kontruksi 6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Pendidikan
<p>Kuadran III Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing: PP (+), PPW (-)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Informasi dan Komunikasi 3. Real Estate 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	<p>Kuadran IV Sektor dengan Pertumbuhan Lamban dan Tidak Berdaya Saing : PP (-), PPW (-)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa keuangan 2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3. Jasa Lainnya

Sektor-sektor dalam kuadran I, seperti Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Transportasi dan Pergudangan, menunjukkan pertumbuhan yang cepat serta memiliki daya saing tinggi. Ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi Kabupaten Muara Enim dan berkontribusi positif terhadap daya saing regional.

Pada Kuadran II, terdapat sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan lambat namun tetap berdaya saing, menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi

perekonomian Kabupaten Muara Enim walaupun lajunya tertinggal dibandingkan sektor lain. Misalnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berperan sebagai basis ekonomi yang kuat dengan potensi tinggi, namun memerlukan peningkatan teknologi atau kebijakan yang mendukung agar pertumbuhannya lebih optimal. Begitu juga dengan Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sektor unggulan berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi besar meskipun laju pertumbuhannya lambat; diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah dapat menjadi solusi untuk menjaga keunggulannya. Di sektor Industri Pengolahan, pertumbuhan lambat dapat disebabkan oleh keterbatasan akses pasar atau investasi, yang jika ditingkatkan, dapat mendukung peran penting sektor ini dalam ekonomi lokal. Selain itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, meskipun pertumbuhannya tidak tinggi, memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan dan daya saing ekonomi daerah; dukungan terhadap inovasi teknologi pengelolaan limbah bisa semakin memperkuat sektor ini. Sektor Konstruksi, yang menunjukkan daya saing meski bertumbuh lambat, bisa lebih berkembang dengan adanya proyek infrastruktur yang turut mendorong sektor lain. Terakhir, Jasa Perusahaan tetap kompetitif meski pertumbuhannya rendah, dan dapat berkembang lebih baik dengan penyediaan pelatihan atau peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan kontribusinya bagi wilayah.

Pada Kuadran III, sektor-sektor yang tercatat memiliki pertumbuhan cepat namun tidak berdaya saing, mencakup beberapa industri yang potensial, namun belum mampu memberikan keunggulan kompetitif yang cukup untuk bersaing dengan daerah lain. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, misalnya, menunjukkan pertumbuhan pesat karena peningkatan permintaan lokal atau aktivitas pariwisata, namun membutuhkan lebih banyak inovasi atau daya tarik tambahan untuk meningkatkan posisinya dalam persaingan. Begitu pula sektor Informasi dan Komunikasi, yang tumbuh seiring perkembangan teknologi, namun masih memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital atau layanan berbasis teknologi untuk bersaing lebih kuat. Pada sektor Real Estate, pertumbuhannya didorong oleh peningkatan kebutuhan perumahan dan properti, namun belum cukup kompetitif karena mungkin menghadapi tantangan seperti regulasi atau penawaran yang belum memenuhi permintaan spesifik pasar. Demikian juga, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun sektor ini masih memerlukan lebih banyak fasilitas kesehatan berkualitas atau

program sosial yang relevan agar dapat bersaing secara efektif dengan wilayah lain.

Kuadran IV mencakup sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lambat dan belum berdaya saing. Sektor-sektor ini, seperti Jasa Keuangan, menghadapi tantangan dalam menarik minat investasi dan memperluas pasar, mungkin karena keterbatasan akses atau inovasi produk keuangan yang belum optimal. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga menunjukkan pertumbuhan yang lambat, yang bisa disebabkan oleh ketergantungan pada alokasi anggaran atau keterbatasan dalam efisiensi pelayanan. Jasa Lainnya, yang mencakup berbagai sektor jasa yang lebih kecil, mengalami kondisi serupa, dengan keterbatasan daya saing yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya diferensiasi layanan atau ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas. Secara keseluruhan, sektor-sektor dalam kuadran ini menghadapi tantangan baik dari segi pertumbuhan maupun persaingan, yang memerlukan perbaikan strategi dan peningkatan daya saing agar dapat lebih berkontribusi terhadap ekonomi wilayah.

4.1.3. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Sektor Menggunakan Analisis Klassen

Analisis Klassen adalah metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi potensi unggulan suatu daerah dengan membandingkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis ini menghasilkan klasifikasi yang membantu menentukan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam Analisis Klassen, sektor-sektor ekonomi dibagi menjadi empat kuadran utama:

Kuadran I (Sektor Unggulan / Maju dan Berkembang Pesat). Sektor-sektor dalam kuadran ini memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Artinya, sektor ini sudah berkembang dengan baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Misalnya, sektor ini bisa meliputi pariwisata, industri kreatif, atau sektor pertanian yang berkembang pesat.

Kuadran II (Sektor Potensial / Maju tapi Tertekan) Sektor di kuadran ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi pertumbuhannya mulai

melambat atau stagnan. Meski potensial, sektor ini perlu didorong melalui kebijakan atau inovasi baru agar dapat terus berkembang dan tidak tergantikan oleh sektor lain.

Kuadran III (Sektor Berkembang Cepat / Potensial untuk Berkembang).

Sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Dengan pengembangan yang tepat, sektor ini memiliki potensi untuk menjadi unggulan di masa depan. Sektor ini sering kali menjadi fokus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Kuadran IV (Sektor Relatif Tertinggal) Sektor-sektor dalam kuadran ini memiliki kontribusi dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Walaupun tidak dianggap sebagai prioritas, sektor ini tetap perlu dipantau, karena dalam kondisi tertentu, sektor ini bisa saja menjadi penting seiring perubahan struktur ekonomi.

Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Muaraenim Berdasarkan Analisis Klassen dapat dilihat dari data PDRB Kabupaten Muaraenim berikut :

Tabel 4.6.
PDRB Menurut Sektor Kabupaten Muara Enim, 2019-2023

Lapangan Usaha/ Sektor Industri		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.419,93	5.800,81	6.082,44	6.429,94	6.783,17
B	Pertambangan dan Penggalian	31.729,18	29.698,49	40.348,06	82.633,78	85.641,76
C	Industri Pengolahan	8.128,05	9.318,75	9.814,71	10.236,09	10.773,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,40	98,81	107,09	112,00	117,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,53	16,45	16,44	16,97	17,69
F	Konstruksi	3.162,84	3.259,92	3.338,76	3.475,70	3.643,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.598,96	4.854,80	5.203,75	5.653,01	6.181,73
H	Transportasi dan Pergudangan	832,30	843,41	883,47	1.056,63	1.198,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,03	337,69	360,68	384,28	418,14
J	Informasi dan Komunikasi	395,62	459,91	490,53	514,97	536,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	321,36	325,17	338,12	346,18	358,84

L	Real Estate	630,99	673,56	698,77	740,40	779,72
M,N	Jasa Perusahaan	9,37	9,59	9,80	10,33	11,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639,17	677,31	712,49	744,86	776,89
P	Jasa Pendidikan	654,35	691,51	726,83	763,09	799,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,03	257,41	267,55	283,71	294,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	154,39	169,97	170,19	175,52	184,25
Produk Domestik Regional Bruto		57.333,51	57.493,55	69.569,67	113.577,46	118.517,51

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Berikut adalah perhitungan rinci mengenai persentase kenaikan dan penurunan masing-masing sektor PDRB Kabupaten Muara Enim dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase ini menggambarkan tingkat pertumbuhan atau penurunan yang dialami oleh setiap sektor dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7.
Persentase kenaikan dan penurunan masing-masing sektor PDRB Kabupaten Muara Enim dari tahun 2019 hingga 2023

Sektor	2019-2020 (%)	2020-2021 (%)	2021-2022 (%)	2022-2023 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.02	4.86	5.71	5.50
Pertambangan dan Penggalian	-6.40	35.88	104.89	3.64
Industri Pengolahan	14.64	5.32	4.29	5.25
Pengadaan Listrik dan Gas	19.90	8.36	4.58	4.94
Pengadaan Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	5.93	-0.06	3.22	4.24
Konstruksi	3.07	2.42	4.10	4.83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	5.57	7.19	8.63	9.35
Transportasi dan Pergudangan	1.33	4.75	19.59	13.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.10	6.81	6.54	8.82
Informasi dan Komunikasi	16.23	6.66	4.98	4.27
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.19	3.99	2.39	3.66
Real Estate	6.74	3.74	5.96	5.31
Jasa Perusahaan	2.35	2.20	5.41	6.88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5.97	5.19	4.54	4.30
Jasa Pendidikan	5.68	5.10	4.99	4.77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.44	3.94	6.05	3.69
Jasa Lainnya	10.08	0.13	3.13	4.97

Berikut adalah perhitungan persentase perubahan dari tahun ke tahun untuk setiap sektor :

- 1) **Pertambangan dan Penggalian:** Mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021-2022 sebesar 104.89%, mencerminkan lonjakan besar di sektor ini, karena peningkatan permintaan atau harga komoditas yang lebih tinggi;
- 2) **Transportasi dan Pergudangan:** Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2022-2023 sebesar 13.45%, yang disebabkan oleh perbaikan infrastruktur atau peningkatan aktivitas logistik;
- 3) **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor:** Tumbuh dengan mantap setiap tahun, dengan pertumbuhan tertinggi 9.35% pada 2022-2023, yang bisa disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat;
- 4) **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum:** Setelah mengalami pertumbuhan negatif pada 2019-2020, sektor ini pulih dan tumbuh secara stabil, mencerminkan meningkatnya pariwisata dan kebutuhan akomodasi;
- 5) **Jasa Keuangan dan Asuransi:** Pertumbuhannya relatif stabil, menunjukkan peran sektor ini yang penting tetapi tidak mengalami peningkatan besar dalam aktivitas;
- 6) **Industri Pengolahan:** Pertumbuhan moderat namun stabil di atas 5%, mencerminkan peran sektor ini sebagai penyumbang utama yang berkelanjutan.

Data PDRB Kabupaten Muara Enim diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Rentang data meliputi tahun 2019 hingga 2023, yang dihitung atas dasar harga konstan. Setiap sektor dianalisis kontribusi dan pertumbuhannya dalam periode tersebut untuk menentukan posisi mereka dalam kuadran Analisis Klassen.

Kuadran I: Sektor Maju dan Berkembang Pesat

Sektor dalam kuadran ini memiliki kontribusi besar terhadap PDRB dan pertumbuhan yang tinggi, menandakan bahwa sektor ini sudah berkembang pesat dan menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Muara Enim.

1. Pertambangan dan Penggalian: Sektor ini menunjukkan kontribusi tertinggi terhadap PDRB, dengan peningkatan tajam dari 31.729,18 Milyar (2019) menjadi 85.641,76 Milyar (2023). Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh permintaan sumber daya alam yang tinggi dan kebijakan yang mendukung sektor ini. Pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan yang memerlukan

kebijakan keberlanjutan agar terus memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah. 2. **Industri Pengolahan** : Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan stabil dari 8.128,05 Milyar (2019) menjadi 10.773,74 Milyar (2023). Dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, sektor ini menunjukkan potensi ekspansi yang baik. Modernisasi teknologi dan peningkatan efisiensi di sektor ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhannya sebagai sektor unggulan.

Kuadran II: Sektor Maju tapi Tertekan

Sektor dalam kuadran ini memiliki kontribusi besar tetapi pertumbuhannya relatif stagnan atau lebih lambat dibandingkan rata-rata sektor lainnya.

1. **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**: Sektor ini penting dalam struktur ekonomi daerah dan memiliki kontribusi besar. Namun, pertumbuhannya linear dan cenderung lambat, dari 5.419,93 Milyar (2019) menjadi 6.783,17 Milyar (2023). Peningkatan produktivitas dan inovasi, seperti pertanian berbasis teknologi, diperlukan agar sektor ini tetap berdaya saing tinggi. 2. **Konstruksi**: Sektor konstruksi menunjukkan pertumbuhan moderat dari 3.162,84 Milyar (2019) menjadi 3.643,69 Milyar (2023). Sektor ini berperan penting dalam mendukung infrastruktur, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan. Peningkatan alokasi pada proyek infrastruktur dapat mendorong sektor ini ke posisi yang lebih baik.

Kuadran III: Sektor Berkembang Cepat

Sektor dalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang tinggi tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Sektor ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang lebih lanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat.

1. **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**: Sektor ini menunjukkan peningkatan dari 338,03 Milyar (2019) menjadi 418,14 Milyar (2023), sejalan dengan meningkatnya minat pariwisata dan permintaan pada layanan akomodasi. Pengembangan pariwisata lokal serta promosi destinasi wisata di Muara Enim dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. 2. **Transportasi dan Pergudangan**: Sektor ini mengalami peningkatan signifikan dari 832,30 Milyar (2019) menjadi 1.198,73 Milyar (2023). Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik, serta efisiensi distribusi barang, dapat memperkuat sektor ini sebagai bagian dari rantai ekonomi Muara Enim.

Kuadran IV: Sektor Relatif Tertinggal

Sektor dalam kuadran ini memiliki kontribusi rendah dan laju pertumbuhan yang rendah pula. Meskipun bukan prioritas utama, sektor-sektor ini penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang: Sektor ini berkontribusi kecil dan mengalami pertumbuhan yang lambat, dari 15,53 Milyar (2019) menjadi 17,69 Milyar (2023). Fokus pada perbaikan kualitas layanan, manajemen limbah yang efektif, dan daur ulang dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, meskipun kontribusi ekonomi sektor ini kecil. **2. Jasa Perusahaan:** Sektor ini memiliki kontribusi yang sangat rendah dan pertumbuhannya hampir stagnan. Pengembangan layanan pendukung bisnis di sektor ini dapat menjadi peluang tambahan, terutama jika terjadi peningkatan jumlah perusahaan atau industri lokal di Muara Enim.

Rekomendasi Berdasarkan Analisis Klassen

1. Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan: Fokuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor ini melalui insentif investasi serta inovasi teknologi.
2. Pertanian dan Kehutanan: Sektor ini membutuhkan dukungan dalam bentuk inovasi dan modernisasi untuk mempertahankan posisinya sebagai sektor potensial.
3. Penyediaan Akomodasi, Makan Minum, dan Transportasi: Sektor ini memiliki potensi berkembang dan dapat menjadi motor ekonomi di masa depan. Dukungan dalam promosi pariwisata dan peningkatan infrastruktur logistik dapat memperkuat kontribusi sektor ini.
4. Sektor Relatif Tertinggal: Meski kontribusinya kecil, sektor-sektor seperti Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pendukung yang difokuskan pada layanan publik dapat tetap diterapkan untuk sektor ini.

4.1.4. Analisis Regional dan Makro Penunjang Potensi Unggulan Daerah

Analisis regional dan makro sebagai penunjang potensi unggulan daerah di Kabupaten Muara Enim diuraikan melalui kondisi dari parameter-parameter penunjang potensi berikut ini :

1. Pertumbuhan ekonomi,

2. Demografi dan ketenagakerjaan,
3. Infrastruktur,
4. Geografi dan sumber daya alam,
5. Investasi luar negeri dan investasi dalam negeri,
6. Eskpor dan impor.

4.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional melalui peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain pertumbuhan output (Produk Domestik Bruto) dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara keseluruhan maupun per sektor juga dapat dilihat dari data PDRB suatu daerah yang disajikan atas harga konstan. Beberapa indikator yang diperlukan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi di daerah adalah PDRB ADHK dan Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha.

1. PDRB Kabupaten (ADHK)

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (BPS).

Tabel 4.8.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Muara Enim, 2019-2023

Lapangan Usaha/ Industri		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.419,93	5.800,81	6.082,44	6.429,94	6.783,17
B	Pertambangan dan Penggalian	31.729,18	29.698,49	40.348,06	82.633,78	85.641,76
C	Industri Pengolahan	8.128,05	9.318,75	9.814,71	10.236,09	10.773,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,40	98,81	107,09	112,00	117,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,53	16,45	16,44	16,97	17,69

Lapangan Usaha/ Industri		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2019	2020	2021	2022	2023
F	Konstruksi	3.162,84	3.259,92	3.338,76	3.475,70	3.643,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.598,96	4.854,80	5.203,75	5.653,01	6.181,73
H	Transportasi dan Pergudangan	832,30	843,41	883,47	1.056,63	1.198,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,03	337,69	360,68	384,28	418,14
J	Informasi dan Komunikasi	395,62	459,91	490,53	514,97	536,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	321,36	325,17	338,12	346,18	358,84
L	Real Estate	630,99	673,56	698,77	740,40	779,72
M,N	Jasa Perusahaan	9,37	9,59	9,80	10,33	11,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639,17	677,31	712,49	744,86	776,89
P	Jasa Pendidikan	654,35	691,51	726,83	763,09	799,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,03	257,41	267,55	283,71	294,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	154,39	169,97	170,19	175,52	184,25
Produk Domestik Regional Bruto		57.333,51	57.493,55	69.569,67	113.577,46	118.517,51

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK)

Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha merupakan suatu ukuran perubahan produksi barang atau jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang dinilai dari lapangan usaha/bidang pekerjaan/kegiatan usaha yang ada di suatu daerah. Nilai Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha diperoleh dari formulasi antara selisih PDRB tahun saat ini dan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya. Nilai laju pertumbuhan biasanya dalam bentuk persentase.

Tabel 4.9.
Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Muara Enim, 2019-2023

Lapangan Usaha/ Industri		Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,51	2,45	2,45	3,02	1,92
B	Pertambangan dan Penggalian	7,93	-2,80	-2,80	12,98	12,03
C	Industri Pengolahan	7,68	9,42	9,42	0,36	3,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,77	15,71	15,71	2,78	3,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,79	5,12	5,12	2,14	2,75
F	Konstruksi	4,95	2,18	2,18	1,35	2,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,99	-0,28	-0,28	4,86	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	8,43	-1,22	-1,22	11,13	7,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,98	-2,14	-2,14	5,13	6,19
J	Informasi dan Komunikasi	6,78	14,78	14,78	4,17	3,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,03	1,01	1,01	0,29	2,05
L	Real Estate	7,72	4,47	3,72	2,18	3,19
M,N	Jasa Perusahaan	7,16	-0,05	1,47	4,27	4,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,72	4,28	2,30	2,82
P	Jasa Pendidikan	3,46	-0,32	3,64	2,78	3,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,86	11,45	2,39	3,22	0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,12	4,56	0,07	2,06	2,15
Produk Domestik Regional Bruto		7,02	0,03	6,35	8,73	8,58

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Perekonomian Kabupaten Muara Enim menunjukkan perkembangan positif sampai tahun 2023 (data termutakhir), selaras dengan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi perekonomian terburuk terjadi pada tahun 2020 dimana

perekonomian Kabupaten Muara Enim mengalami kontraksi sebesar 0,03% dan Provinsi Sumatera Selatan terkontraksi sebesar 0,11% akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat sebesar 6,35% pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 8,73% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebesar 8,58%.

4.1.4.2. Demografi dan Ketenagakerjaan

Secara umum, demografi membahas berbagai hal yang berkaitan dengan komponen perubahan-perubahan kondisi penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Adapun di dalam potensi dan peluang investasi daerah, demografi merujuk pada komposisi penduduk yang ditinjau dari jumlah penduduk dan usia. Informasi yang diperlukan dalam membahas mengenai ketenagakerjaan adalah jumlah angkatan kerja dan jumlah lulusan perguruan tinggi. Komponen/parameter tersebut untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan suatu daerah dalam menyiapkan sumber daya manusianya.

1. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut BPS didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2023 (data termutakhir) dari proyeksi hasil Sensus Penduduk 2022 sebanyak 640.224 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk wilayah ini berjumlah sekitar 624.020 orang. Dengan demikian selama kurun waktu 2022-2023 terjadi pertumbuhan sebesar 2,59% per tahun. Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Muara Enim, berjumlah 79.512 penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida dengan jumlah penduduk 8.276 jiwa.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Muara Enim, maka dapat diinformasikan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 adalah sebesar 85,56 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak pada wilayah Kecamatan Muara Enim, yaitu sebesar 425,02 jiwa/Km². Kepadatan penduduk terendah terletak pada wilayah

Kecamatan Benakat yaitu sebesar 23,34 jiwa/Km². Kepadatan penduduk membawa tantangan besar bagi pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan kualitas hidup di sebuah daerah. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang baik, daerah dengan kepadatan tinggi juga dapat memanfaatkan potensi ekonomi, inovasi, dan keberagaman budaya yang ada. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak negatif kepadatan penduduk, sembari memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari dinamika populasi yang tinggi.

Tabel 4.10.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
			Jiwa /Km ²
1	Semendo Darat Laut	15.346	57,02
2	Semendo Darat Ulu	18.204	42,67
3	Semendo Darat Tengah	11.436	37,84
4	Tanjung Agung	29.877	57,78
5	Panang Enim	13.339	69,14
6	Rambang	28.719	75,96
7	Lubai	27.538	52,03
8	Lubai Ulu	34/231	71,54
9	Lawang Kidul	76.102	264,92
10	Muara Enim	79.512	425,02
11	Ujan mas	26.948	86,61
12	Gunung Megang	35.834	76,02
13	Benakat	10.549	23,34
14	Belimbing	26.833	180,46
15	Rambang Niru	35.067	55,23
16	Empat Petulai Dangku	20.552	148,55
17	Gelumbang	63.56	90,08
18	Lembak	19.892	196,1
19	Sungai Rotan	33.175	96,4
20	Muara Belida	8.276	40,44
21	Kelekar	11.73	84,98
22	Belida Darat	13.504	51,1
	Total	640.224	85,56

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Kegunaan dari informasi laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Tabel 4.11.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muara Enim, 2019-2023

No	Wilayah Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Semendo DaratLaut	0,61	0,03	1,30	1,26	2,92
2	Semendo DaratUlu	0,80	0,03	0,59	0,55	4,40
3	Semendo DaratTengah	0,87	0,04	1,21	1,16	2,72
4	Tanjung Agung	0,70	-	1,19	1,53	1,49
5	Panang Enim	1,86	-	1,19	0,37	0,80
6	Rambang	3,28	-0,05	0,20	0,15	2,26
7	Lubai	3,28	0,02	1,02	0,66	3,92
8	Lubai Ulu	1,04	0,12	1,02	1,23	3,34
9	Lawang Kidul	2,32	0,18	1,33	1,29	2,05
10	Muara Enim	1,17	0,40	1,73	1,68	2,92
11	Ujan mas	1,45	0,03	1,38	1,34	1,65
12	Gunung Megang	0,58	0,01	0,74	0,67	1,75
13	Benakat	1,45	0,04	0,93	0,89	3,69
14	Belimbing	0,58	0,08	0,74	0,72	3,04
15	Rambang Niru	2,73	-	0,58	0,51	2,75
16	Empat PetulaiDangku	1,93	-	0,58	0,55	2,64
17	Gelumbang	0,26	-0,01	1,27	1,22	2,38
18	Lembak	0,41	-0,01	0,53	0,49	1,79
19	Sungai Rotan	2,07	-0,05	0,61	0,56	2,76
20	Muara Belida	1,93	-0,01	0,43	0,39	3,03
21	Kelekar	1,60	0,01	1,57	1,52	2,85
22	Belida Darat	0,61	-0,00	0,53	0,49	2,34
	Rata-rata	0,80	0,78	1,03	1,00	2,54

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 1,54 persen. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk per kecamatan, maka laju pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2023 terdapat di wilayah Kecamatan Lubai yaitu sebesar 3,26 persen. Laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Panang Enim yaitu sebesar 0,43 persen.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja menurut BPS adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang tidak melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga. Ketersediaan tenaga kerja dalam potensi dan peluang investasi daerah dapat diidentifikasi dari beberapa parameter, antara lain:

a. Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel. 4.12.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Jenis Kegiatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja			
a. Bekerja	196.771	128.989	325.760
b. Menganggur	8.073	5.225	13.298
Jumlah	204.844	134.214	339.058
II. Bukan Angkatan Kerja			
a. Sekolah	13.946	13.033	26.979
b. Mengurus Rumah Tangga	4.387	75.629	80.016
c. Lainnya	13.321	5.135	18.456
Jumlah	31.654	93.797	125.451
Jumlah Total I + II	236.498	228.011	464.509

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Dari aspek ketenagakerjaan, terdata bahwa penduduk Kabupaten Muara Enim yang berada pada kelompok angkatan kerja (umur 15 tahun keatas), pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 339.058 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 96% adalah mereka yang bekerja dan 4% adalah mereka yang tergolong sebagai kelompok pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,16% dari tahun 2022. Secara keseluruhan, laki-laki lebih dominan dalam angka angkatan kerja, sedangkan Perempuan lebih dominan dalam kategori mengurus rumah tangga, namun juga memberikan partisipasi yang tinggi dalam pendidikan.

b. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Jumlah lulusan perguruan tinggi merupakan suatu angka yang penting untuk diinformasikan, baik dari sisi penduduk asli daerah yang lulus dari perguruan tinggi di luar daerahnya, maupun jumlah lulusan perguruan tinggi dari daerah tersebut.

Tabel 4.13.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tinggi dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Diploma I/II	1.221	1.900	3.121
2	Akademi/Diploma III/S.Muda	2.339	4.502	6.841
3	Diploma IV/Strata I	7.678	9.959	17.637
4	Strata II	363	320	683
5	Strata III	22	17	39
	Total	11.623	16.698	28.321

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, 2024

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim yang berpendidikan tinggi sebanyak 28.321 orang atau sebesar 4,42 persen dari total penduduk, dengan komposisi jumlah penduduk perempuan lebih besar yaitu 16.698 orang, sedangkan laki-laki sebesar 11.623 orang. Pendidikan tinggi yang terdata terdiri dari lima kategori yaitu: Diploma I/II (3.121 orang); Akademi/Diploma III/S.Muda (6.841 orang); Diploma IV/Strata I (17.637 orang); Strata II (683 orang); dan Strata III (39 orang). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian

besar penduduk di Kabupaten Muara Enim yang mengenyam pendidikan tinggi berada pada kategori Diploma IV/Strata I.

4.1.4.3. Infrastruktur

Infrastruktur memiliki korelasi positif dalam menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Infrastruktur merupakan suatu faktor penting pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu daerah adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung potensi dan peluang investasi daerah ini dikerucutkan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Aksesibilitas transportasi

Fungsi utama transportasi adalah sebagai sarana mobilitas barang atau perorangan. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Transportasi yang dimaksud adalah transportasi darat, laut, dan udara. Dalam lingkup yang lebih luas, transportasi dapat berupa angkutan umum yang terbagi menjadi angkutan darat, laut, udara, serta kereta api.

Tabel. 4.14.
Aksesibilitas Transportasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Kondisi Fisik	Jumlah Rata-rata Kendaraan Setiap Hari (Unit)
1	Stasiun Kereta Api	13	Baik	60
2	Dermaga Penyebrangan	5	Baik	10

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Tahun 2023 di Kabupaten Muara Enim tercatat terdapat 13 stasiun kereta api dan 5 dermaga penyebrangan. Semua sarana tersebut tercatat dalam kondisi baik. Jumlah rata-rata kendaraan yang melintas setiap harinya pada stasiun kereta api sebanyak 60 unit, sedangkan pada dermaga penyebrangan melintas sebanyak 10 unit kendaraan setiap harinya. Di Kabupaten Muara Enim alat transportasi kereta

api menjadi alat transportasi yang sangat penting karena selain sebagai alat angkutan manusia juga menjadi alat angkut hasil pertambangan berupa Batubara.

Selanjutnya, jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Tabel 4.15 menunjukkan data terkait kondisi jalan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan beberapa kategori, yaitu tingkat kewenangan pemerintahan, jenis permukaan jalan, dan kondisi jalan dari tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kualitas jalan (terutama yang baik) dan penurunan jalan yang terbuat dari kerikil dan tanah, dengan lebih banyak jalan yang diaspal. Kondisi jalan cenderung membaik, meskipun ada sedikit penurunan jalan dengan kondisi sedang dan rusak berat.

Tabel. 4.15.
Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I	Tingkat Kewenangan Pemerintahan					
1	Negara	212,30	212,30	212,30	212,30	212,30
2	Provinsi	184,17	184,17	184,17	184,17	184,17
3	Kabupaten	1.395,31	1.396,51	1.400,68	1.400,68	1.400,68
II	Jenis Permukaan Jalan					
1	Aspal	915,47	970,45	978,60	988,60	993,10
2	Kerikil	239,47	100,83	88,20	78,20	68,70
3	Tanah	63,72	48,73	34,78	38,25	33,75
4	Lainnya	176,65	276,50	299,10	302,10	319,85
III	Kondisi Jalan					
1	Baik	1.211,16	1.248,19	1.277,70	1.305,70	1.317,41
2	Sedang	155,96	114,96	96,20	76,20	72,34
3	Rusak	13,81	18,90	14,66	14,13	14,41
4	Rusak Berat	14,38	14,46	12,12	11,12	11,23

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2023-2024

2. Utilitas

Utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang yang diperlukan untuk pelayanan dan kegiatan usaha suatu daerah. Utilitas meliputi ketersediaan listrik dan ketersediaan air bersih. Ketersediaan listrik dapat dilihat pada kapasitas terpasang pembangkit listrik yang ada di daerah tersebut. Jaringan listrik menjadi

sangat penting karena sarana produksi dan teknologi saat ini sangat bergantung dengan listrik. Jaringan transmisi sebagian besar dioperasikan oleh PT PLN, kecuali di beberapa daerah seperti Pulau Batam, sebagian kecil pulau di Sulawesi, dan Pulau Papua yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk kepentingan sendiri. Sementara itu, ketersediaan air bersih dapat dilihat dari jumlah produksi air bersih di suatu daerah. Ketersediaan air bersih menjadi sumber daya yang memiliki daya tarik tinggi dimana kemudahan akses sumber air bersih akan mengurangi biaya produksi. Selain itu, informasi ketersediaan air juga menjadi salah satu parameter dalam kemudahan perizinan untuk sektor-sektor tertentu. Ketersediaan listrik dan air bersih di suatu daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam menunjang kegiatan usaha di daerahnya.

Tabel. 4.16.
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero)
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Daya Terpasang (KW)	145.493.530
2	Produksi Listrik (KWh)	330.097.655
3	Listrik Terjual (KWh)	308.158.233
4	Dipakai Sendiri (KWh)	1.604.793
5	Susut/ Hilang (KWh)	19.213.669

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Pada tahun 2022, Kabupaten Muara Enim berhasil memproduksi sejumlah 274,831,926.14 kilowatt-hour (Kwh) listrik. Angka ini mencerminkan kapasitas produksi listrik yang baik di wilayah tersebut, menunjukkan upaya dan investasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun juga mencerminkan peningkatan kebutuhan dan akses masyarakat terhadap layanan listrik. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan mencapai 85.645 kemudian mengalami peningkatan menjadi 89.667 pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 91.104 pada tahun 2023. Kenaikan jumlah pelanggan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur listrik. Peningkatan produksi listrik dan jumlah pelanggan merupakan indikator positif bagi Kabupaten Muara Enim, menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung perkembangan wilayah tersebut.

Kabupaten Muara Enim terdapat delapan aliran sungai, yaitu: Sungai Lematang, Sungai Enim, Sungai Penukal, Sungai Belido, Sungai Lubai, Sungai Rambang, Sungai Lengie dan Sungai Niru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk. Pada tahun 2023 sebanyak 7.805.214 m³ air disalurkan sumber air baku PDAM Lematang Enim, Kabupaten Muara Enim. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air utama bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber air utama yang digunakan untuk minum bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Berdasarkan data BPS 2023 Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk kegiatan minum berasal dari sumur terlindung. Proporsinya mencapai 47,15 persen dan diikuti oleh sumber air ledeng sebesar 16,24 persen dan sumber air sumur bor/pompa yakni sebesar 12,52 persen.

Tabel. 4.17.
Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan PDAM
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Pelanggan (KK)	40.589
2	Air Disalurkan (m ³)	7.805.214
3	Nilai (Rp)	43.429.331.766

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

3. Aksesibilitas Sarana Penunjang

Sarana penunjang dalam investasi berarti kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai sektor yang akan dikembangkan. Secara umum, aksesibilitas sarana penunjang ditunjukkan oleh jumlah penginapan, jumlah sarana pendidikan dan jumlah sarana kesehatan.

Tabel. 4.18.
Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	Hotel Bintang	3	196	299
2	Hotel Nonbintang	16	274	347

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel bintang dan hotel nonbintang. Hotel bintang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang (termasuk berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Misalnya hotel bintang lima, hotel bintang empat, dan seterusnya. Pada tahun 2023 jumlah hotel bintang di Kabupaten Muara Enim sebanyak 3 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 196 dan jumlah tempat tidur sebanyak 299. Jumlah hotel nonbintang sebanyak 16 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 274 dan jumlah tempat tidur sebanyak 347.

Tabel. 4.19.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Sarana Pendidikan	Di Bawah Kemendikbudristek (unit)	Di Bawah Kemenag (unit)
1	TK/ RA	183	34
2	SD/ MI	332	53
3	SMP/ MTs	103	41
4	SMA/ MA	33	33
5	SMK	20	-
6	Perguruan Tinggi	2	-

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan jumlah sarana pendidikan yang berada di bawah dua kementerian utama di Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Taman Kanak-Kanak (TK) berada lebih banyak di bawah Kemendikbudristek (183 unit), sementara Raudhatul Atfal (RA) yang sering kali berbasis agama Islam, lebih banyak berada di bawah Kemenag (34 unit). Sebagian besar sekolah dasar (SD) berada di bawah Kemendikbudristek (332 unit), sementara Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang berbasis agama, lebih sedikit di bawah Kemenag (53 unit). Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih banyak berada di bawah Kemendikbudristek (103 unit), sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs)

lebih banyak berada di bawah Kemenag (41 unit). Jumlah SMA dan Madrasah Aliyah (MA) cukup seimbang, masing-masing ada 33 unit yang dikelola oleh Kemendikbudristek dan Kemenag. Semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tercatat ada di bawah Kemendikbudristek (20 unit), tidak ada yang berada di bawah Kemenag. Semua Perguruan Tinggi yang tercatat ada di bawah Kemendikbudristek (2 unit), tidak ada yang berada di bawah Kemenag. Sarana pendidikan yang memadai adalah fondasi bagi perkembangan sebuah daerah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian individu dalam memperoleh pengetahuan, tetapi juga dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya secara keseluruhan. Dengan memperhatikan dan meningkatkan sarana pendidikan, suatu daerah dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Selanjutnya Tabel 4.20 menunjukkan sarana Kesehatan yang tersedia di suatu daerah. Dengan jumlah sarana kesehatan yang bervariasi ini, Kabupaten Muara Enim memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup baik untuk memberikan berbagai layanan medis kepada masyarakat. Rumah sakit umum dan puskesmas rawat inap menyediakan perawatan lebih lanjut untuk pasien yang membutuhkan rawat inap atau perawatan intensif, sementara puskesmas non rawat inap dan klinik pratama mendukung pelayanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses oleh warga. Adanya rumah sakit khusus menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan spesialisasi di bidang medis tertentu.

Tabel. 4.20.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit Umum	6
2	Rumah Sakit Khusus	1
3	Puskesmas Rawat Inap	7
4	Puskesmas Non Rawat Inap	17
5	Klinik Pratama	23

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

4.1.4.4. Geografi dan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis pada umumnya menekankan pada pendekatan spasial seperti kecenderungan spasial, bentuk-bentuk dan struktur interaksi spasial.

Kecenderungan spasial ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi, disebabkan jarak dan kawasan yang dekat dengan sumber daya dan kawasan ekonomi strategis menjadi daya dukung kelancaran sebuah proyek di daerah. Terdapat dua kriteria atau parameter data yang dapat menunjukkan kondisi geografis dalam mendukung potensi unggulan daerah, yaitu letak geografis wilayah dan luas wilayah.

1. Letak Geografis Daerah

Kabupaten Muara Enim terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tergolong wilayah yang strategis, dan menjadi wilayah perlintasan antar kabupaten dan antar provinsi. Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak antara 3°0'40"-4°22'39" Lintang Selatan dan 103°18'57"-104°40'37" Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Muara Enim yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di kabupaten berada di Kecamatan Muara Enim. Batas-batas wilayah Kabupaten Muara Enim berdasarkan posisi geografis adalah berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah menurut BPS didefinisikan sebagai luas otoritas daerah secara administratif dalam satuan Km². Kabupaten Muara Enim memiliki wilayah seluas 7.483,06 Km², yang secara administratif tersebar di 22 kecamatan dan 256 desa/kelurahan (246 desa definitif dan 10 kelurahan), dengan sebaran luas wilayah yang bervariasi.

Tabel 4.21.
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Semendo Darat Laut	10	269,14	3,60
2	Semendo Darat Ulu	10	426,64	5,70
3	Semendo Darat Tengah	12	302,24	4,04
4	Tanjung Agung	14	517,10	6,91
5	Panang Enim	12	192,94	2,58
6	Rambang	13	378,07	5,05
7	Lubai	10	529,32	7,07
8	Lubai Ulu	11	478,49	6,39
9	Lawang Kidul	7	287,26	3,84
10	Muara Enim	16	187,08	2,50
11	Ujan mas	9	311,13	4,16
12	Gunung Megang	13	471,36	6,30
13	Benakat	6	451,96	6,04
14	Belimbing	10	148,69	1,99
15	Rambang Niru	16	634,98	8,49
16	Empat Petulai Dangku	10	138,35	1,85
17	Gelumbang	17	705,57	9,43
18	Lembak	10	101,44	1,36
19	Sungai Rotan	19	344,14	4,60
20	Muara Belida	8	204,67	2,74
21	Kelekar	7	138,03	1,84
22	Belida Darat	17	264,26	3,53
	Total	256	7.483,06	100

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2024

Ibukota Kabupaten Muara Enim terletak di Kecamatan Muara Enim yang memiliki luas 187,08 Km². Terdapat tiga kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Muara Enim yaitu: Kecamatan Gelumbang seluas 705,57 Km² atau sebesar 9,43% dari luas Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Rambang Niru seluas 634,98 Km² atau 8,49% dari luas kabupaten, dan Kecamatan Tanjung Agung seluas 517,10 Km² atau 6,91% dari luas Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lembak dengan luas 101,44 Km² (1,36% dari luas Kabupaten Muara Enim).

4.1.4.5. Investasi Luar Negeri dan Investasi Dalam Negeri

Investasi menunjukkan salah satu gambaran mengenai ekonomi makro daerah karena investasi berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Adanya investasi sebagai tambahan stok modal suatu daerah, maka akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Berdasarkan statusnya, investasi meliputi realisasi investasi asing yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi luar negeri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 4.22.

Realisasi Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Muara Enim, 2019-2023

No	Jenis Investasi	Realisasi Investasi (Rp Milyar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PMA	8.183	8.850	9.109	10.532	4.318
2	PMDN	847	1.137	3.116	2.645	3.906
	Total	9.030	9.987	12.225	13.177	8.224

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Muara Enim, 2024

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) tercatat realisasi investasi asing (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Muara Enim terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2023 yang mengalami penurunan. Total realisasi PMA dan PMDN tahun 2023 sebesar Rp 8.224 milyar. Realisasi PMA selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi PMDN. Tahun 2019 realisasi PMA sebesar Rp 8.183 milyar sedangkan realisasi PMDN hanya sebesar Rp 847 milyar. Total realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 masing-masing sebesar Rp 10.532 milyar PMA dan Rp 2.645 milyar PMDN, sehingga total realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 13.177 milyar.

4.1.4.6. Eskpor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan dua unsur yang terdapat dalam perdagangan luar negeri. Kedua unsur tersebut sangat penting sebagai parameter investasi dimana ekspor impor akan menggambarkan keunggulan kompetitif dan komparatif pada komoditas maupun sektor tertentu. Keunggulan komparatif akan memberikan informasi bahwasannya suatu daerah akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan daerah lainnya. Adapun keunggulan kompetitif akan menggambarkan bahwa strategi produksi Kabupaten Muara Enim dapat diunggulkan dibanding dengan daerah lain. Produksi tambang di Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu produk ekspor, tetapi hal ini tidak tercatat sebagai ekspor dari Kabupaten Muara Enim. Tidak ada data ekspor dan impor yang dilakukan Kabupaten Muara Enim karena tidak ada Pelabuhan ekspor impor di wilayah ini.

4.2. Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Muara Enim

Peluang investasi di Kabupaten Muara Enim, muncul dari potensi yang terdapat pada sektor unggulan daerah yang telah dibahas sebelumnya. Dari hasil analisis potensi sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim menggunakan analisis LQ dan DQ telah didapat diketahui bahwa :

1. Sektor Unggulan yang Masih Berpotensi Unggulan, adalah :
 - 1.1. Pertambangan dan Hasil-hasilnya
 - 1.2. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Sektor Belum Unggul yang Berpotensi Unggulan, adalah
 - 2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - 2.2. Industri Pengolahan
 - 2.3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - 2.4. Jasa Perusahaan
 - 2.5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Analisis lanjutan menggunakan Kuadran *Shift-Share* dan Analisis *Klassen* serta analisis terhadap parameter pendukung, juga memberikan hasil yang selaras dengan Analisis LQ dan DQ, dimana pada analisis ini menunjukkan bahwa peluang investasi unggulan di Kabupaten Muara Enim berada pada sektor berikut ini :

1. Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing adalah :
 - Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
 - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 - Transportasi dan Pergudangan
2. Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing, adalah :
 - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - Pertambangan dan penggalian
 - Industri Pengolahan
 - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - Kontruksi
 - Jasa Perusahaan
 - Jasa Pendidikan

Berdasarkan analisis potensi yang telah dilakukan dengan berbagai metode diatas, maka peluang investasi spesifik komoditinya diturunkan dari sektor-sektor berpotensi tersebut yang dipilih berdasarkan hasil survey lapangan, dukungan data sekunder serta kesepakatan hasil FGD yang melibatkan OPD terkait. Komoditi yang terpilih sebagai komoditi yang berpotensi untuk diunggulkan dan ditawarkan pada investor, yang selanjutnya diyakini peluangnya melalui analisis peluang investasi adalah :

1. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - 1.1. Kelapa Sawit
 - 1.2. Karet
 - 1.3. Kopi
 - 1.4. Kentang
 - 1.5. Sapi
 - 1.6. Ikan tambak
2. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - 2.1. FABA
3. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Industri Pengolahan
 - 3.1. Kopi Bubuk
 - 3.2. Batik
 - 3.3. Serat Nanas

3.4. Jamur Tiram

3.5. Ikan Asap

4.2.1. Analisis Peluang Investasi dengan Pendekatan Klaster

Istilah “klaster (cluster)” mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi, klaster industri (industrial cluster) merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Klaster pada hakikatnya adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga-lembaga terkait. Klaster juga merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas pengembangan ekonomi.

Klaster dibangun dengan tujuan dapat meningkatkan nilai tambah kolektif. Klaster dapat meningkatkan keterkaitan antar usaha, sehingga satu usaha dengan usaha lainnya memiliki hubungan yang kuat. Oleh karenanya Klaster dibangun dengan memperhatikan elemen kunci yaitu:

1. Aglomerasi Perusahaan, adalah daftar perusahaan yang akan terlibat dalam klaster.
2. Rantai Nilai dan Nilai Tambah, adalah analisa rantai nilai pada klaster tersebut dan tentukan pada titik mana terjadi nilai tambah.
3. Jaringan Pemasok, yaitu mengidentifikasi perusahaan yang akan menjadi pemasok dalam klaster, baik pemasok material, teknologi, SDM dan pembiayaan.
4. Infrastruktur Ekonomi. Buat daftar infrastruktur yang dibutuhkan dalam klaster dan tentukan instansi penanggung jawab.

Dalam mengembangkan klaster juga perlu diperhatikan pihak-pihak yang terlibat atau pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait. Beberapa pihak yang terkait dalam pengembangan klaster adalah: a. Usaha Inti (core business); b. Usaha pendukung; c. Usaha terkait; d. Champion atau perusahaan/bisnis inti sebagai penghela; e. Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi; f. Pemerintah.

Dalam analisis klaster, pihak-pihak yang terlibat seperti disebutkan di atas, juga menjadi bagian untuk dianalisa, yang paling mudah dengan langkah-langkah:

1. Menentukan Usaha Inti (*core business*)

Pertama sekali ditentukan usaha inti yang akan dikembangkan dalam sektor usaha yang dipilih. Usaha inti adalah usaha yang dijadikan fokus pengembangan klaster. Misalnya, usaha pariwisata.

2. Menguraikan Usaha Inti tersebut berdasarkan proses

Usaha inti terdiri dari beberapa tahapan proses, mulai dari pengadaan bahan baku /bahan penolong, proses produksi dan pemasaran.

3. Mengidentifikasi Usaha Pendukung

Usaha pendukung adalah usaha usaha yang mendukung keberlangsungan semua proses usaha inti, baik dalam hal pengadaan bahan baku dan bahan penolong, mendukung kegiatan proses produksi maupun proses distribusi dan pemasaran produk.

4. Mengidentifikasi Usaha Terkait

Usaha terkait yaitu usaha yang memiliki keterkaitan dengan usaha inti baik keterkaitan proses atau keterkaitan dalam rantai suplai (*supply chain*).

5. Mengidentifikasi Usaha dalam Jaringan Pemasok (*Supplier*)

Jaringan pemasok adalah usaha-usaha yang memasok kebutuhan untuk usaha inti. Usaha tersebut meliputi: pemasok bahan baku dan bahan penolong; pemasok energi, listrik dan sumber energi lainnya; pemasok teknologi, sumber daya manusia dan permodalan; pemasok mesin dan peralatan proses.

6. Mengidentifikasi Usaha dalam Jaringan Distribusi

Usaha dalam jaringan distribusi meliputi: Distributor; Agen; Supermarket, dll; Usaha transportasi dan logistik; Kemasan; Iklan; dan Eksportir.

7. Penyedia Infrastruktur Ekonomi

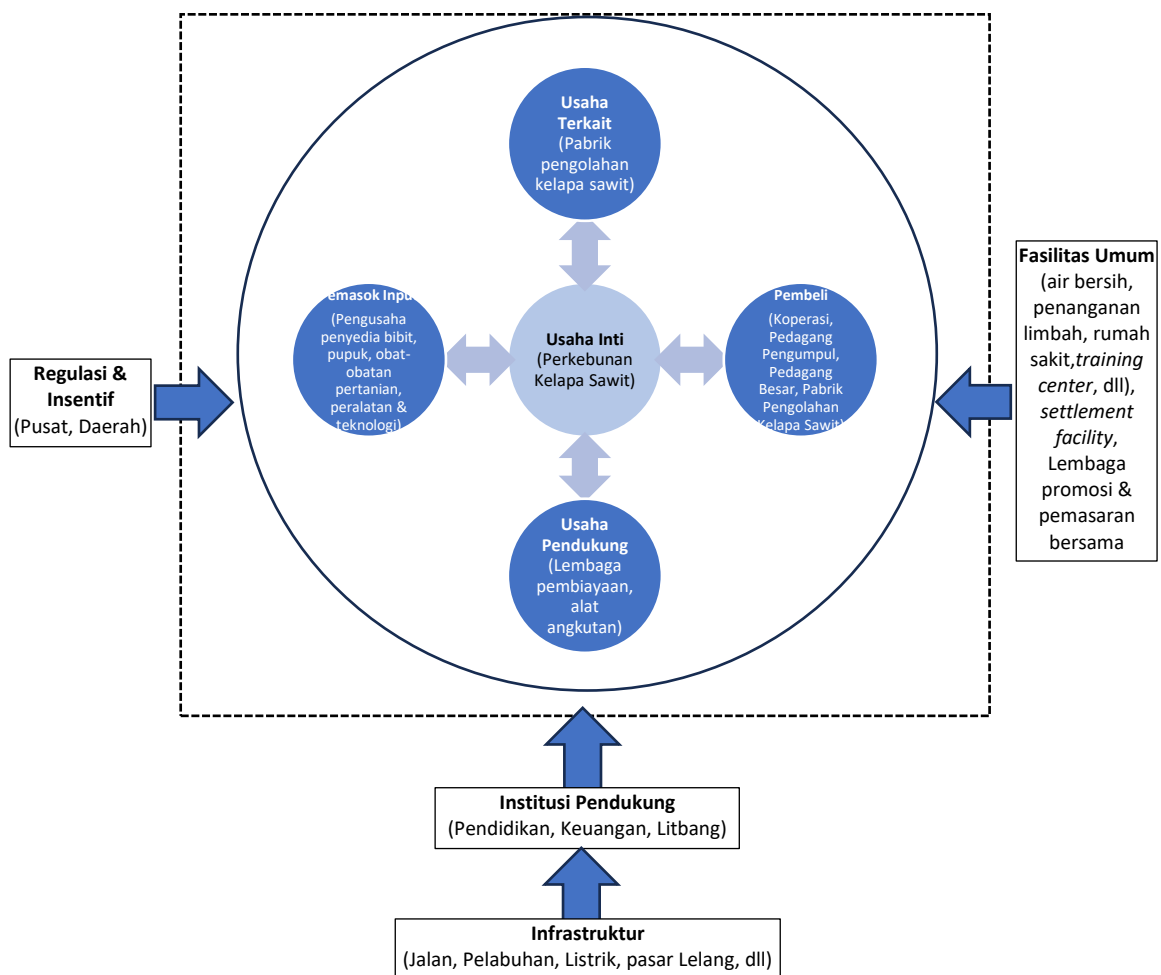
Identifikasi infastruktur apa yang dibutuhkan dalam pengembangan klaster tersebut dan instansi apa yang harus menyediakannya. Infastruktur tersebut terdiri dari sarana dan prasarana, kebijakan dan iklim usaha.

4.2.1.1. Analisis Klaster Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit adalah: luas lahan, pemupukan, tenaga kerja, dan

pestisida. Analisis kluster usaha perkebunan kelapa sawit adalah teknik segmentasi yang membagi usaha perkebunan kelapa sawit menjadi beberapa segmen.

Usaha inti dalam kluster perkebunan kelapa sawit adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, peralatan dan teknologi. Hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) dipasarkan ke pembeli yaitu koperasi, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS). Usaha terkait dalam kluster ini yaitu PPKS, sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan dan usaha alat angkut. Dalam kluster perkebunan kelapa sawit terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

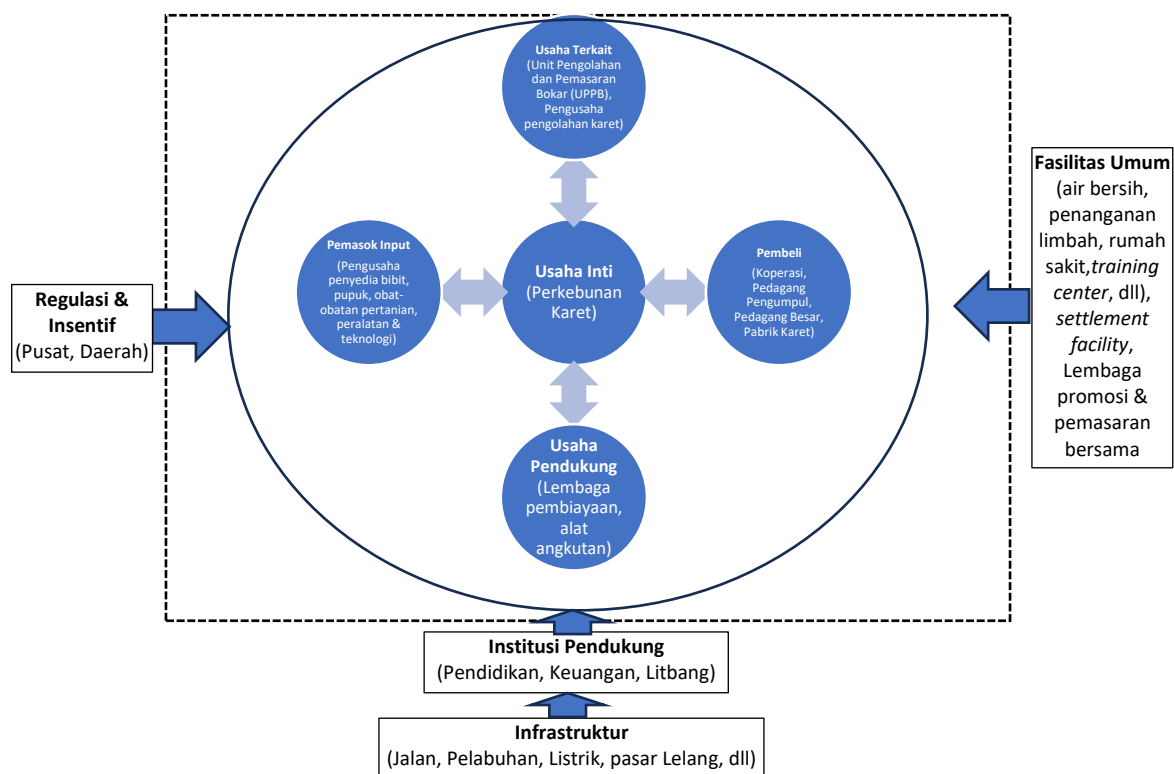


Gambar 4.1. Kluster Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.2. Analisis Klaster Perkebunan Karet

Karakteristik yang dapat digunakan untuk analisis klaster pada usaha perkebunan karet, antara lain: luas lahan, luas tanaman menghasilkan (TM), luas tanaman tidak menghasilkan (TTM), jumlah petani, dan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi produksi lateks per satuan luas pada tanaman karet, antara lain: penggunaan klon karet, kesesuaian lahan, pemeliharaan tanaman, sistem dan manajemen sadap.

Usaha inti dalam klaster perkebunan karet adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, peralatan dan teknologi. Hasil produksi Bahan Olah Karet (Bokar) dipasarkan ke pembeli yaitu koperasi, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pabrik karet. Usaha terkait dalam klaster ini yaitu Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan usaha pengolahan karet, sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan dan usaha alat angkut. Dalam klaster perkebunan karet terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro diantaranya: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

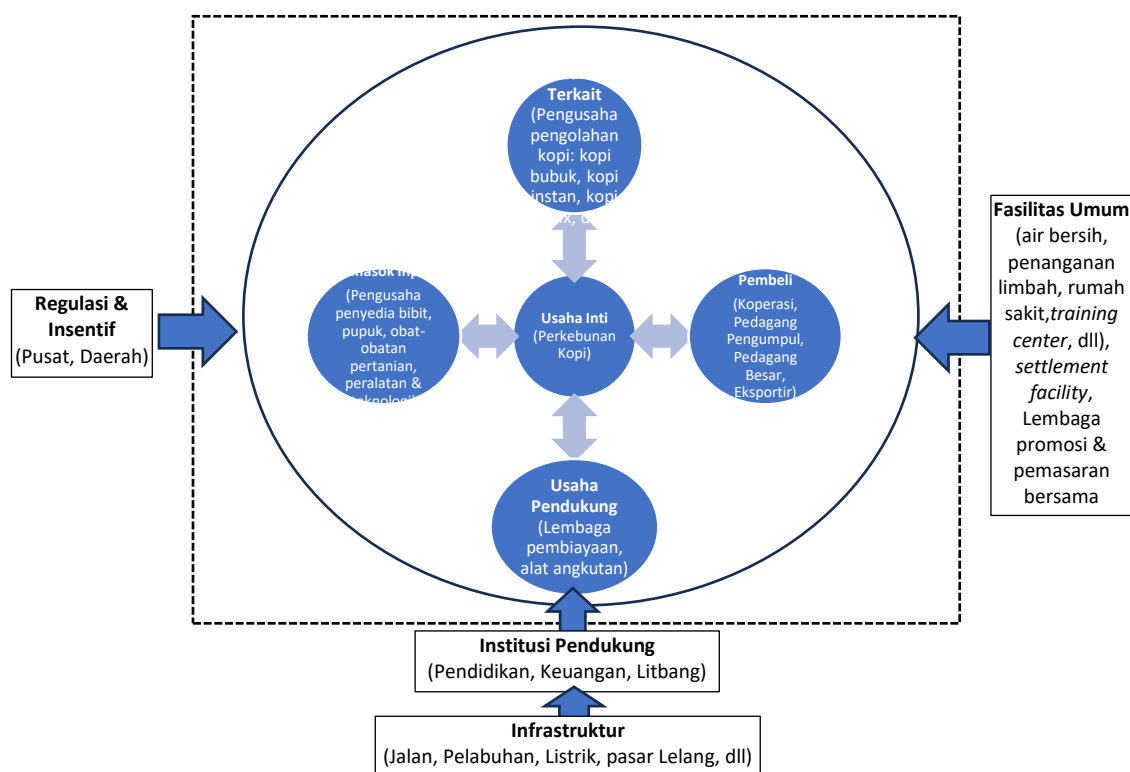


Gambar 4.2. Klaster Perkebunan Karet di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.3. Analisis Kluster Perkebunan Kopi

Perkebunan kopi merupakan salah satu perkebunan yang penting bagi perekonomian Indonesia karena menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan komoditas ekspor Indonesia. Analisis kluster dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah, seperti kopi.

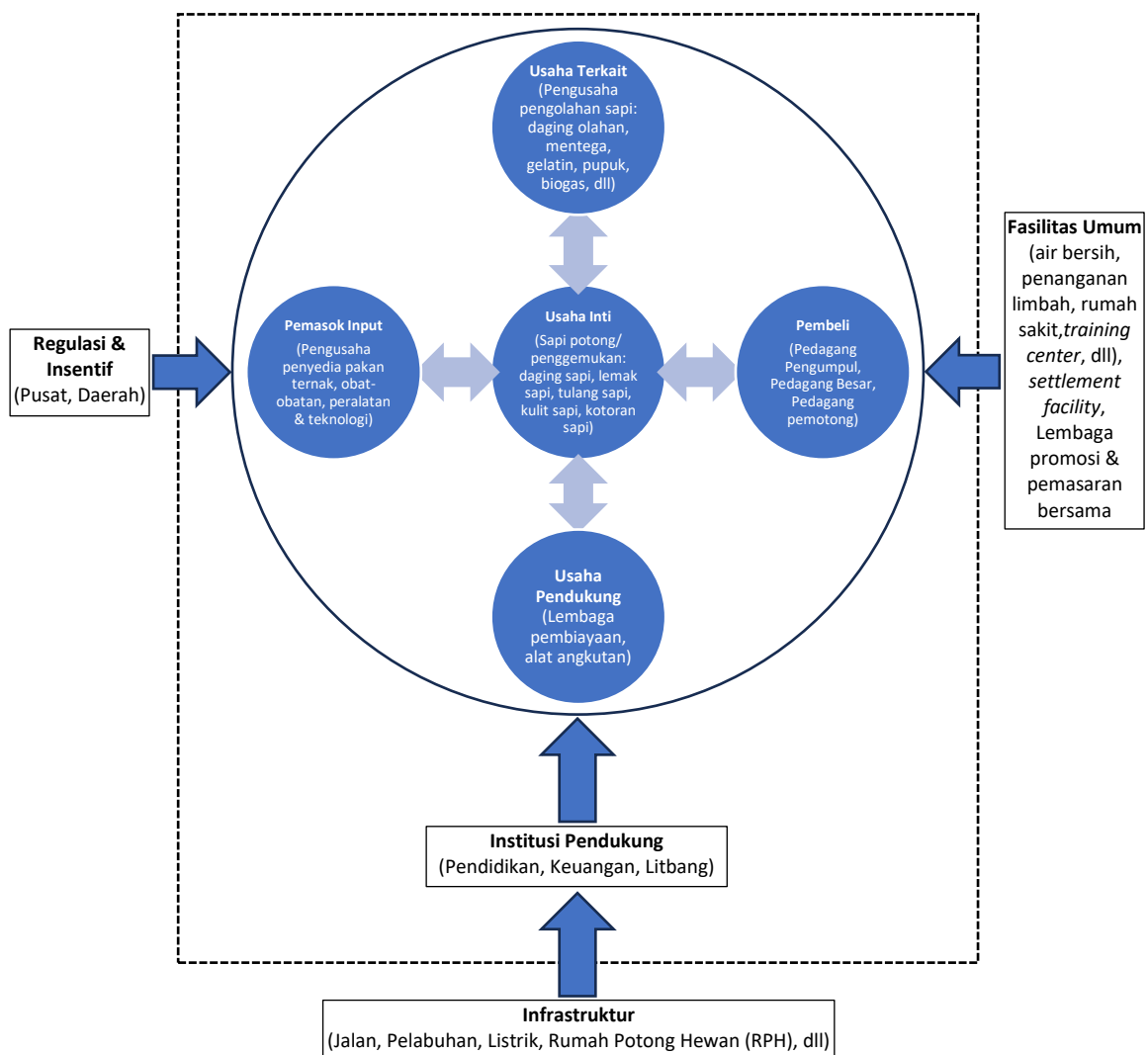
Usaha inti dalam kluster perkebunan kopi adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, peralatan dan teknologi. Hasil produksi biji kopi dipasarkan ke pembeli yaitu koperasi, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan eksportir. Usaha terkait dalam kluster ini yaitu pengolahan kopi (kopi bubuk, kopi instan, kopi mix, dll), sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan dan usaha alat angkutan. Dalam kluster perkebunan kopi terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



Gambar 4.3. Kluster Perkebunan Kopi di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.4. Analisis Klaster Sapi Potong/ Penggemukan

Penggemukan sapi adalah usaha pemeliharaan sapi dengan tujuan untuk mendapatkan daging dalam waktu yang singkat. Usaha ini menjanjikan karena kebutuhan pasar terhadap daging sapi terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dapat dihadapi dalam beternak sapi, antara lain: kebijakan yang belum komprehensif, skim pembiayaan yang terbatas, alih fungsi dan terbatasnya lahan penggembalaan, sumber bibit yang terbatas, manajemen dan pola pengembangan yang belum efektif.



Gambar 4.4. Klaster Sapi Potong/ Penggemukan di Kabupaten Muara Enim

Usaha inti dalam klaster sapi potong/penggemukan adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti pakan ternak, obat-obatan, peralatan dan teknologi. Hasil produksi

dipasarkan ke pembeli yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pemotong. Usaha terkait dalam klaster ini yaitu usaha pengolahan sapi, diantaranya yaitu: daging olahan, mentega, gelatin, pupuk, biogas, dll. Sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan dan usaha alat angkutan. Dalam klaster sapi potong/penggemukan terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

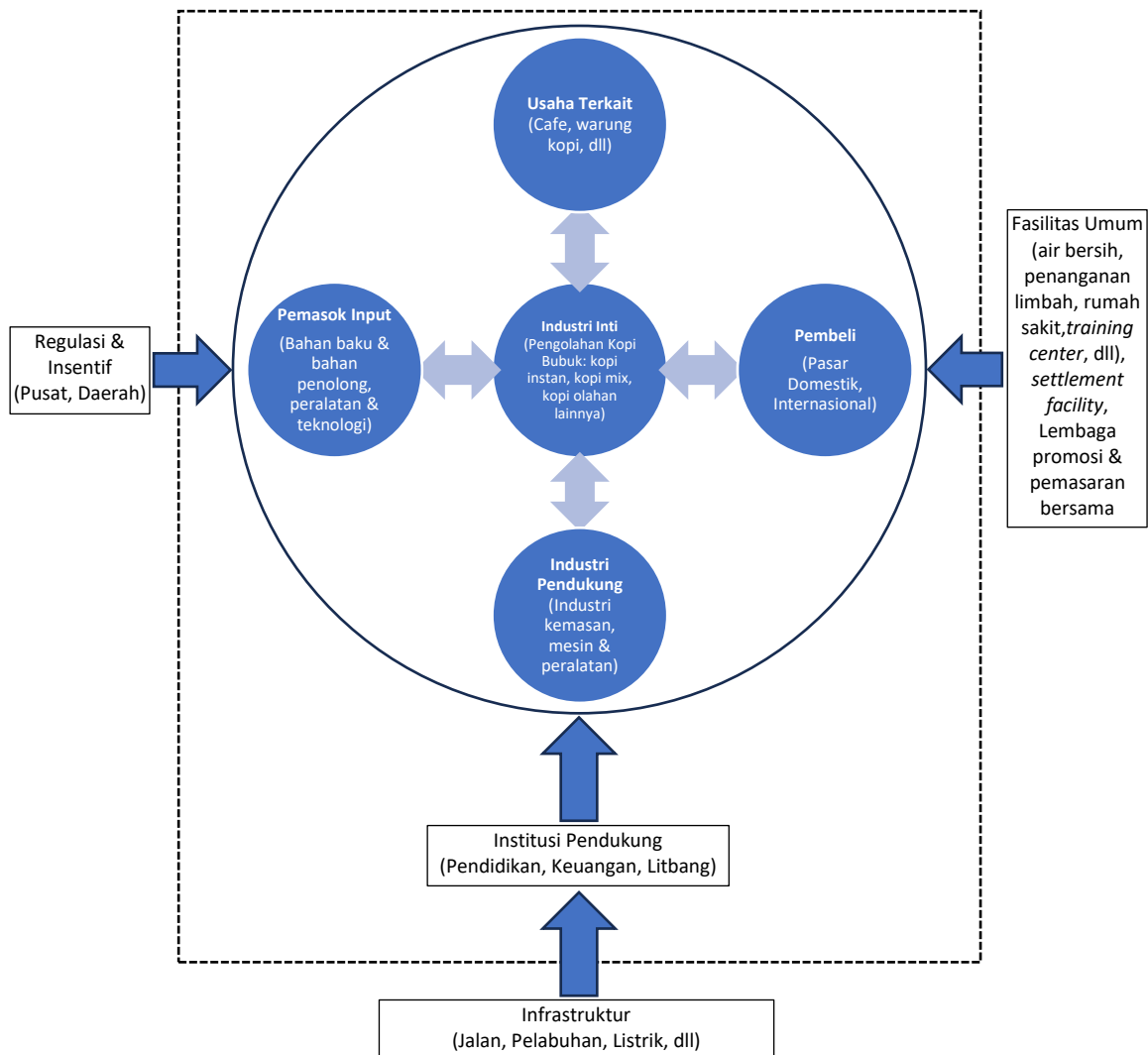
4.2.1.5. Analisis Klaster Industri Kopi Bubuk

Klaster industri merupakan konsentrasi geografis dari industri yang bersaing dalam jaringan rantai pasokan. Pada sisi yang lain rantai pasokan (tunggal) merupakan satu kesatuan/ sistem (dapat dalam bentuk organisasi atau individu) yang terlibat langsung dalam aliran produk atau jasa, keuangan, dan informasi dari industri hulu ke industri hilir dan pelanggan akhir, atau dari sumber bahan baku sampai dengan pelanggan. Rantai pasokan yang paling sederhana terdiri dari pemasok bahan baku, perusahaan pengolahan, dan pelanggan langsung.

Kopi bubuk merupakan hasil penggilingan atau penumbukan biji kopi yang telah disangrai hingga berbentuk serbuk halus. Cita rasa kopi yang dihasilkan akan bergantung pada jenis biji kopi, metode pengolahan, tingkat sangrai, penggilingan, penyimpanan, dan cara penyeduhan yang digunakan. Cara pengolahan di pabrik-pabrik pada akhirnya akan menentukan cita rasa kopi.

Industri inti dalam klaster industri kopi bubuk adalah semua kegiatan pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk yang menghasilkan produk berupa kopi instan, kopi mix, dan kopi olahan lainnya. Industri inti dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan teknologi. Hasil produksi dipasarkan ke pembeli yaitu pasar domestik dan internasional. Usaha terkait dalam klaster ini diantaranya yaitu cafe, warung kopi, dll. Sedangkan industri pendukung yaitu industri kemasan, mesin dan peralatan. Dalam klaster industri kopi bubuk terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut

diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



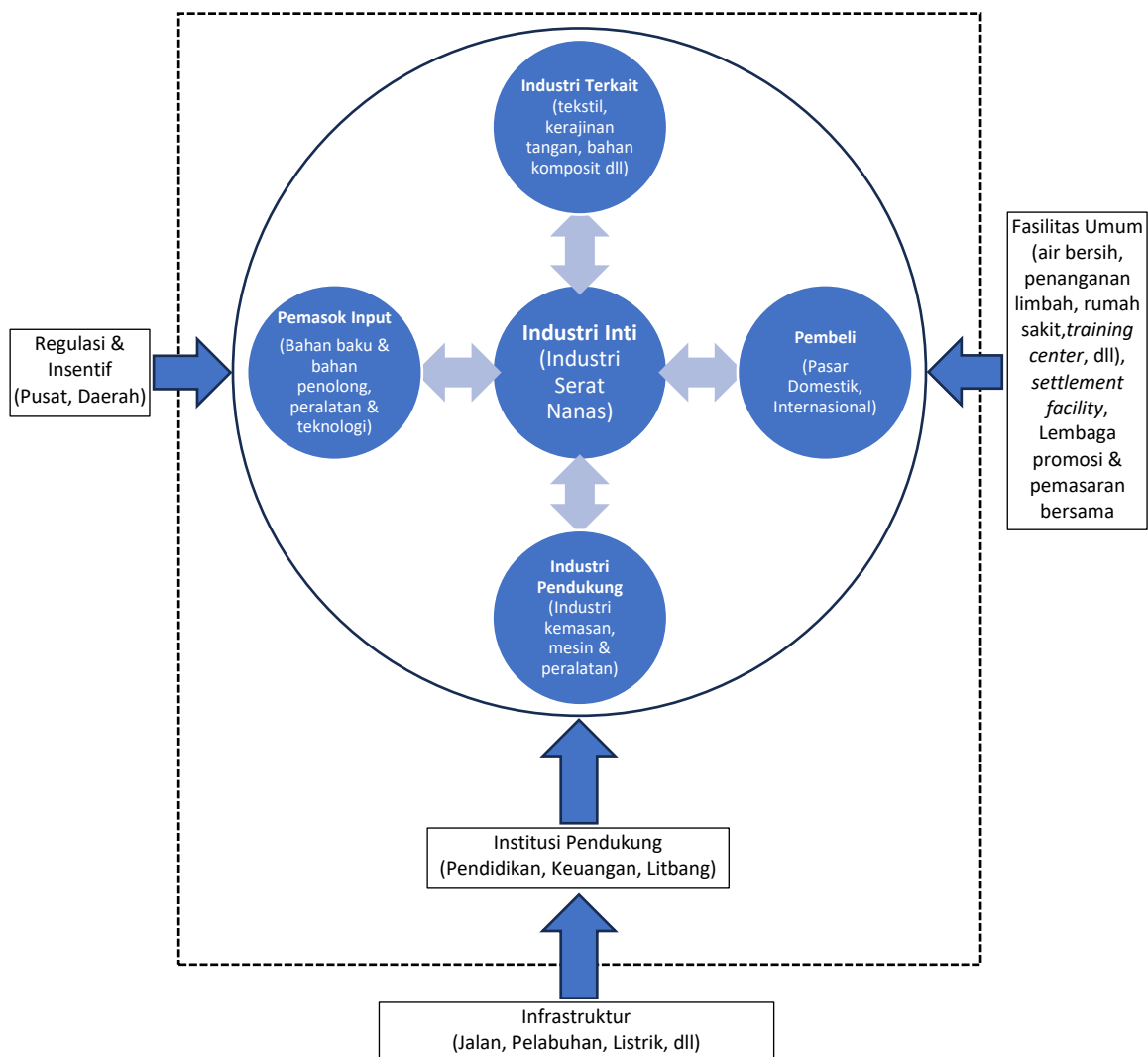
Gambar 4.5. Kluster Industri Kopi Bubuk di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.6. Analisis Kluster Industri Serat Nanas

Industri serat nanas adalah industri yang mengolah daun nanas menjadi serat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tekstil, kerajinan tangan, dan bahan komposit. Serat daun nanas merupakan salah satu sumber serat alam alternatif yang menjanjikan untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Serat daun nanas harganya relatif murah karena sumbernya banyak tersedia di berbagai daerah di Indonesia.

Industri inti dalam kluster industri serat nanas adalah semua kegiatan pengolahan daun nanas menjadi serat nanas. Industri inti dilakukan sampai dengan

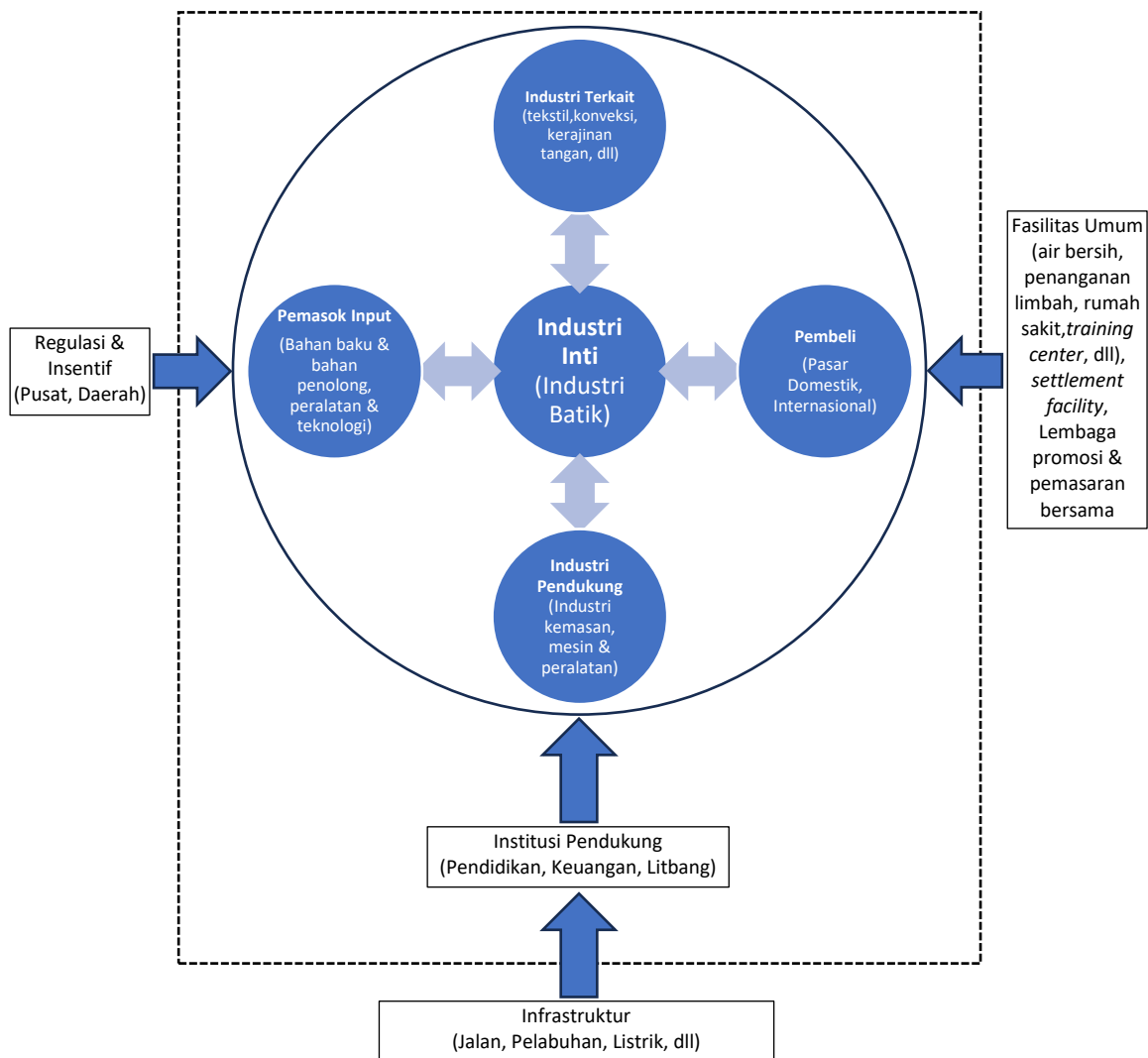
pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan teknologi. Hasil produksi dipasarkan ke pembeli yaitu pasar domestik dan internasional. Industri terkait dalam kluster ini diantaranya yaitu tekstil, kerajinan tangan, bahan komposit, dll. Sedangkan industri pendukung yaitu industri kemasan, mesin dan peralatan. Dalam kluster industri serat nanas terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



Gambar 4.6. Kluster Industri Serat Nanas di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.7. Analisis Klaster Industri Batik

Industri batik adalah industri yang memproduksi batik, yaitu kain yang diwarnai dengan lilin dan teknik tertentu. Batik merupakan salah satu jenis industri tekstil dan busana yang juga termasuk dalam sektor industri kreatif. Industri batik merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan. Berawal dari metode sederhana, yaitu menggambar dengan canting dan mencelupkan dalam pewarna, batik cap dengan cara dicap pada cetakan sampai produksi massal dengan mesin modern.



Gambar 4.7. Klaster Industri Batik di Kabupaten Muara Enim

Industri inti dalam klaster industri batik adalah semua kegiatan produksi yang menghasilkan kain batik. Industri inti dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan teknologi. Hasil

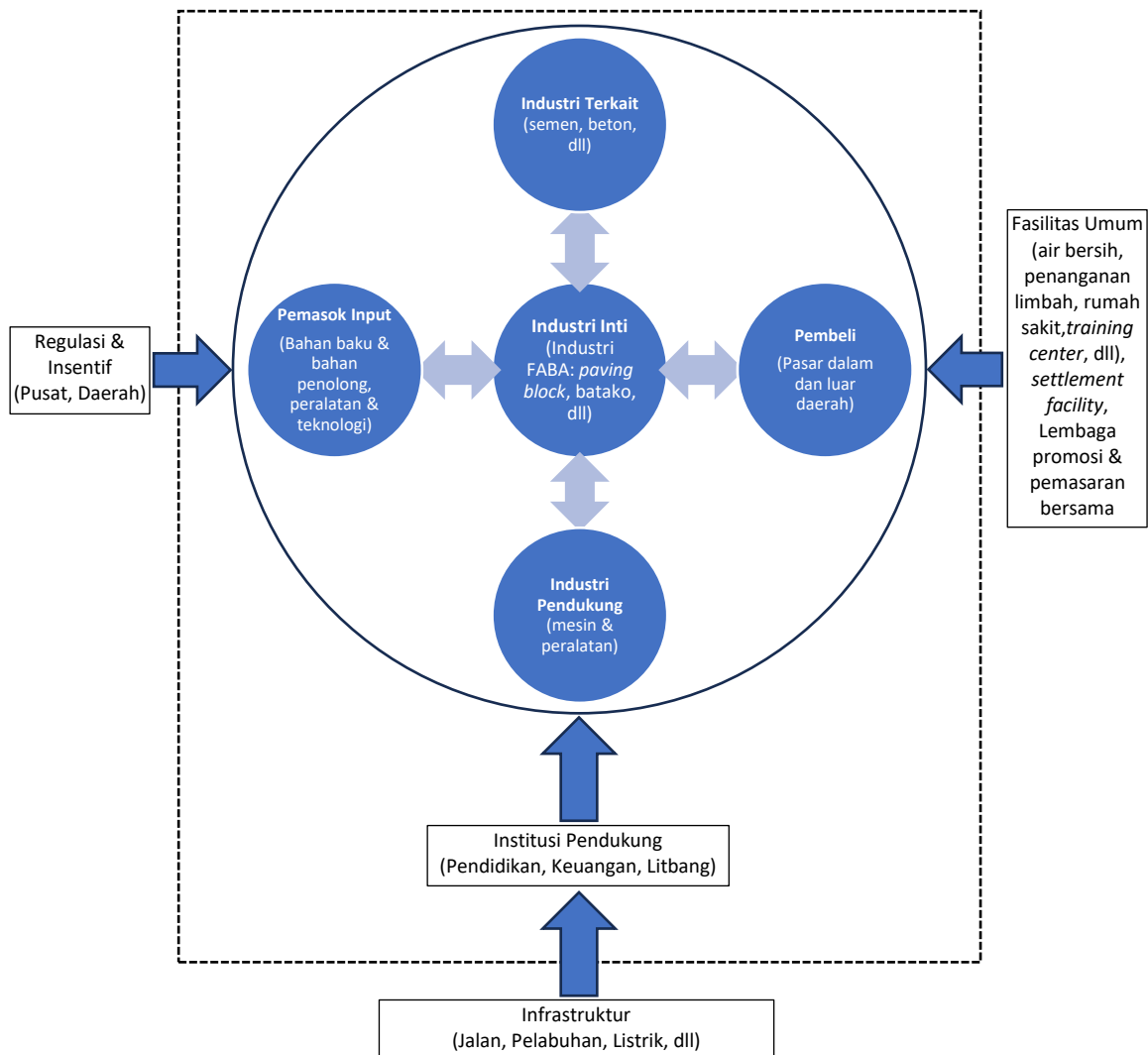
produksi dipasarkan ke pembeli yaitu pasar domestik dan internasional. Industri terkait dalam klaster ini diantaranya yaitu industri tekstil, konveksi, kerajinan tangan, dll. Sedangkan industri pendukung yaitu industri kemasan, mesin dan peralatan. Dalam klaster industri batik terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

4.2.1.8. Analisis Klaster Industri FABA

Industri FABA adalah industri yang memanfaatkan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) sebagai bahan campuran atau limbah dalam berbagai proses produksi. FABA merupakan sisa pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbentuk seperti debu halus. FABA memiliki banyak manfaat, diantaranya: bahan campuran industri semen, meningkatkan kekuatan beton, mengurangi jejak karbon, stabilisasi lahan, lapis fondasi jalan. FABA tidak lagi dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pembakaran batubara di PLTU yang dilakukan pada suhu tinggi sehingga kandungan *unburnt carbon* di dalam FABA menjadi minimum. Namun, FABA yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebar di lingkungan dan berbahaya bagi manusia. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh FABA adalah gangguan pada sistem pernapasan.

Industri inti dalam klaster industri FABA adalah semua kegiatan produksi yang menggunakan limbah FABA sebagai salah satu input produksinya yang menghasilkan produk berupa *paving block*, batako, dll. Industri inti dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan teknologi. Hasil produksi dipasarkan ke pembeli yaitu pasar dalam dan luar daerah. Industri terkait dalam klaster ini diantaranya yaitu industri semen, beton, dll. Sedangkan usaha pendukung yaitu industri mesin dan peralatan. Dalam klaster industri FABA terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro

tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

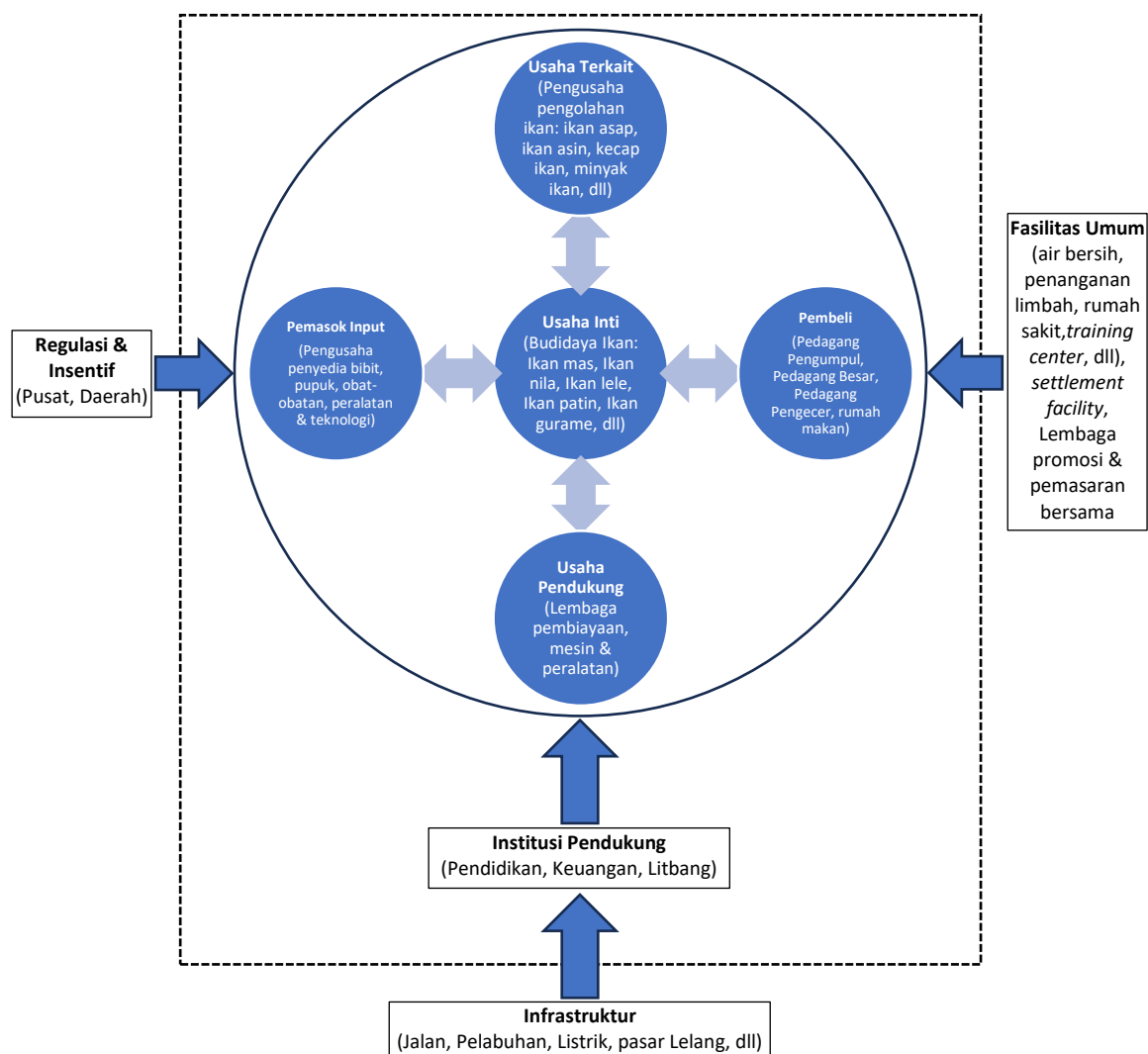


Gambar 4.8. Kluster Industri FABA di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.9. Analisis Kluster Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk menghasilkan biota akuatik secara terkontrol dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perikanan budidaya juga bisa diartikan sebagai upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Budidaya perikanan juga dikenal dengan sebutan akuakultur. Dalam akuakultur, dilakukan teknik domestikasi, yaitu membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan. Beberapa jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain: Ikan mas, Ikan nila, Ikan lele, Ikan patin, Ikan gurame, dll.

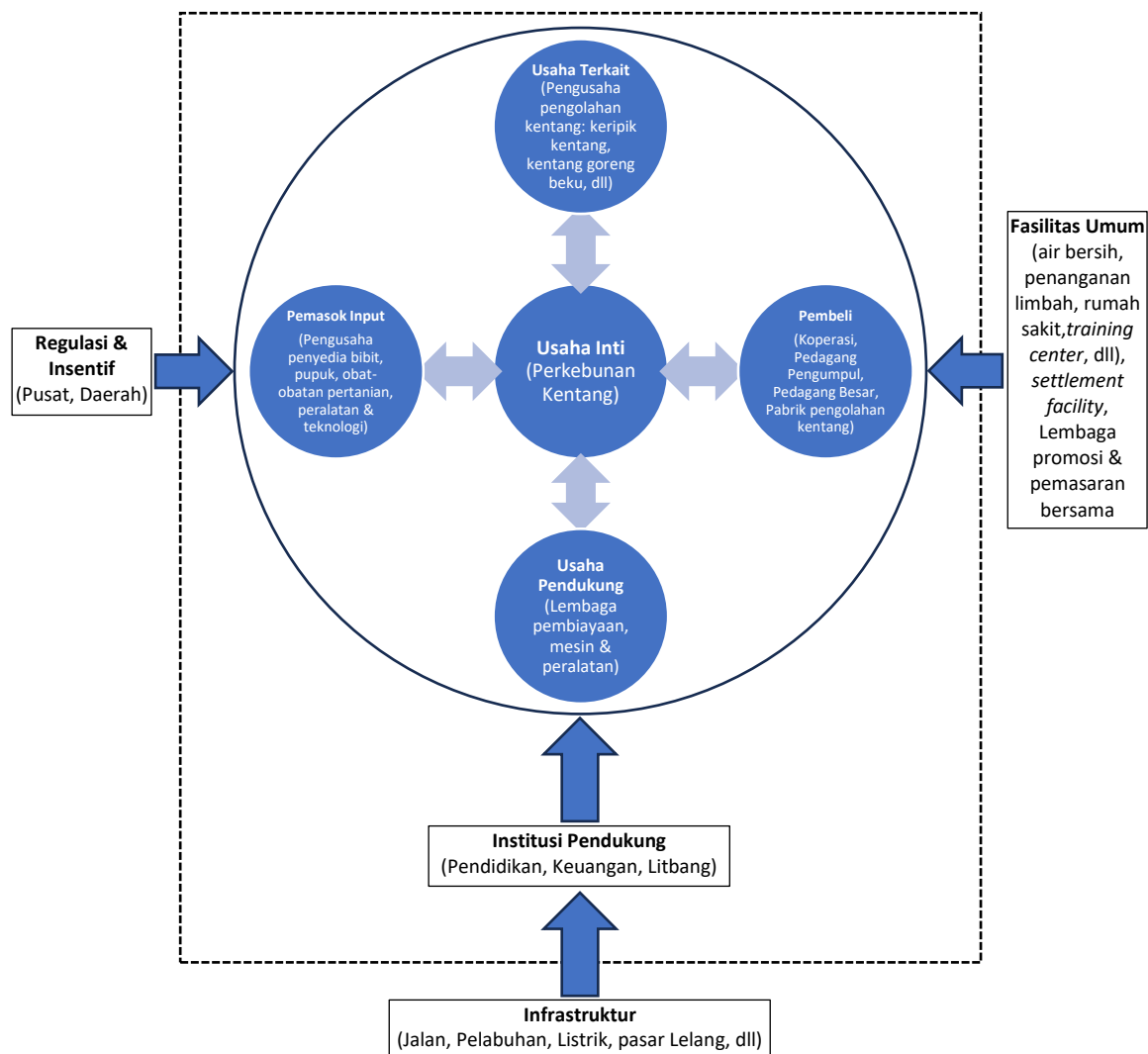
Usaha inti dalam klaster perikanan budidaya adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan dan teknologi. Hasil produksi ikan dipasarkan ke pembeli yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan rumah makan. Usaha terkait dalam klaster ini yaitu pengusaha pengolahan ikan (ikan asap, ikan asin, kecap ikan, minyak ikan, dll), sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan, mesin dan peralatan. Dalam klaster perikanan budidaya terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



Gambar 4.9. Klaster Perikanan Budidaya di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.10. Analisis Klaster Perkebunan Kentang

Usaha perkebunan kentang adalah kegiatan budidaya tanaman kentang yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Kentang merupakan tanaman pangan yang mudah ditanam, tidak mudah rusak, dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Untuk meningkatkan produktivitas kentang, petani dapat mengadopsi teknologi pertanian, seperti sistem pertanian presisi, mesin pertanian berpemandu GPS, dan manajemen gulma dan hama terpadu.



Gambar 4.10. Klaster Perkebunan Kentang di Kabupaten Muara Enim

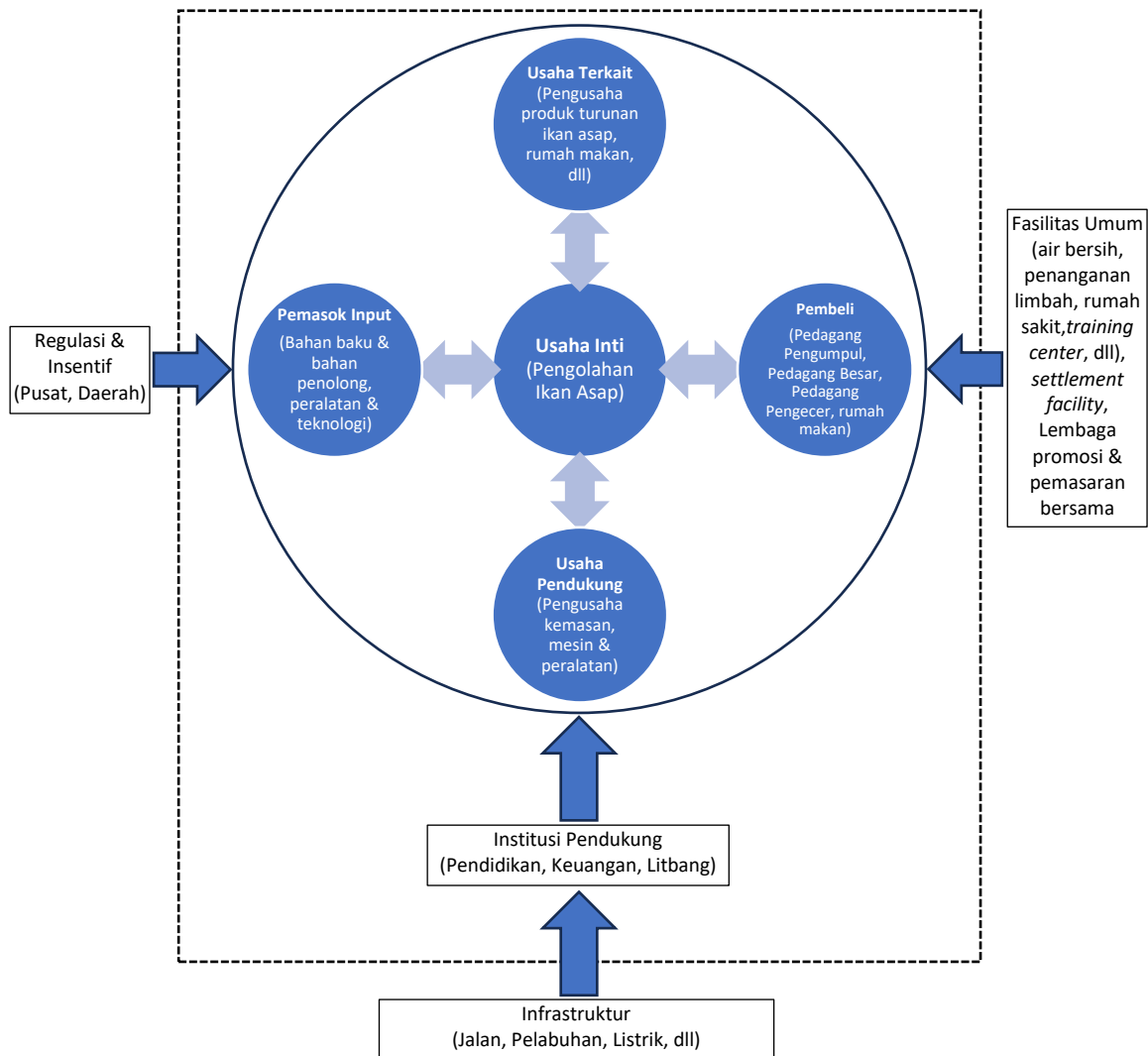
Usaha inti dalam klaster perkebunan kentang adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, peralatan dan teknologi. Hasil produksi kentang dipasarkan ke pembeli yaitu koperasi, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan

pabrik pengolahan kentang. Usaha terkait dalam klaster ini yaitu pengusaha pengolahan kentang (keripik kentang, kentang goreng beku, dll), sedangkan usaha pendukung yaitu lembaga pembiayaan, mesin dan peralatan. Dalam klaster perkebunan kentang terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.

4.2.1.11. Analisis Klaster Pengolahan Ikan Asap

Usaha ikan asap adalah usaha yang memproduksi ikan asap, yaitu ikan yang diolah melalui proses pengasapan. Pengasapan ikan bertujuan untuk mengolah ikan agar siap dikonsumsi, memberikan cita rasa khas, dan membuat ikan lebih awet. Ikan yang digunakan untuk membuat ikan asap bisa bermacam-macam, seperti ikan patin, ikan lele, ikan mas, ikan baung, ikan nila, dll.

Usaha inti dalam klaster pengolahan ikan asap adalah semua kegiatan pengolahan ikan menjadi ikan asap. Usaha inti dilakukan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan teknologi. Hasil produksi dipasarkan ke pembeli yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan rumah makan. Usaha terkait dalam klaster ini diantaranya yaitu pengusaha produk turunan ikan asap, rumah makan, dll. Sedangkan usaha pendukung yaitu pengusaha kemasan, mesin dan peralatan. Dalam klaster pengolahan ikan asap terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



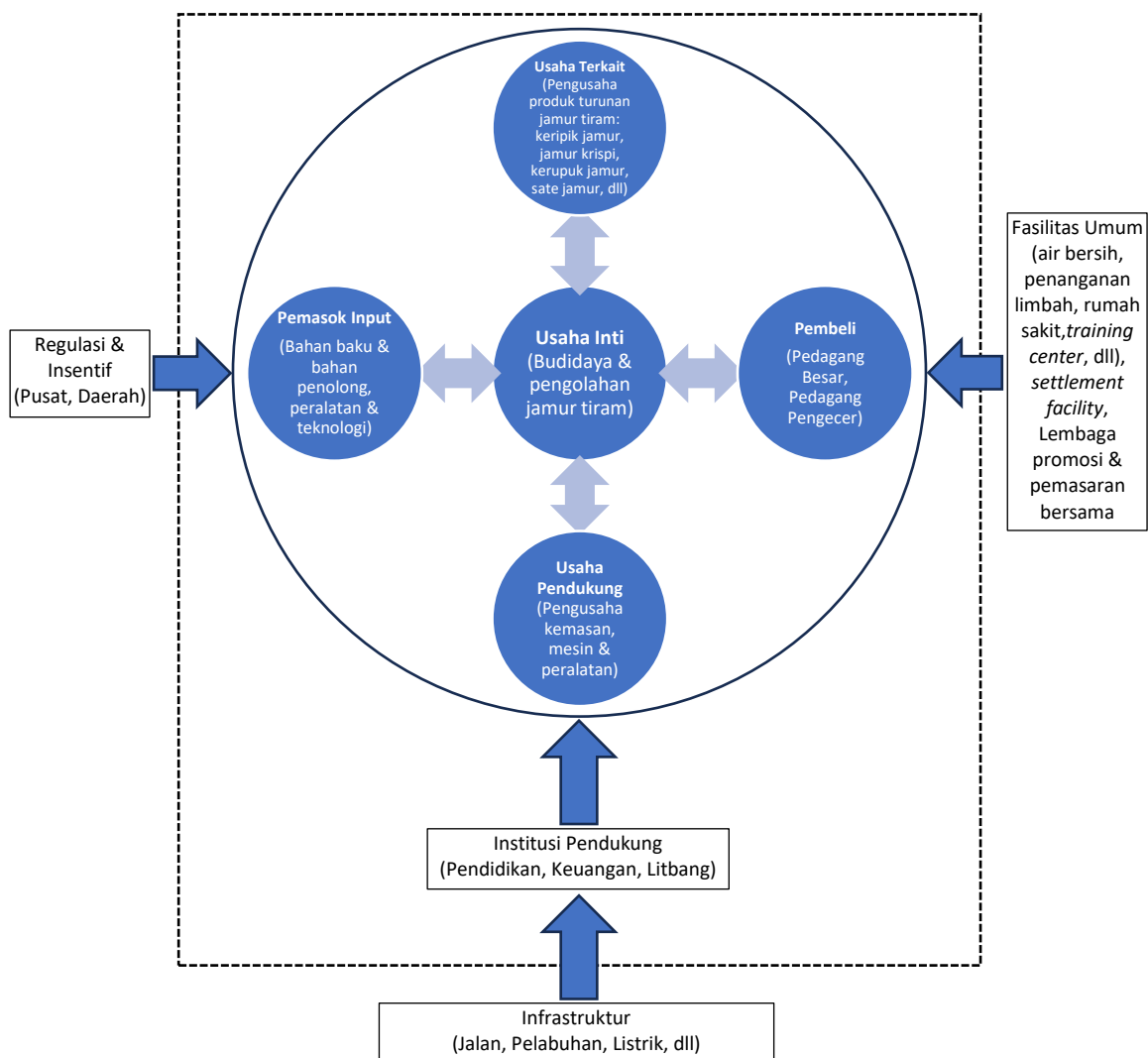
Gambar 4.11. Kluster Ikan Asap di Kabupaten Muara Enim

4.2.1.12. Analisis Kluster Jamur Tiram

Usaha jamur tiram adalah usaha yang dijalankan dengan cara membudidayakan jamur tiram dan usaha pengolahan jamur tiram. Jamur tiram dapat dikembangkan tanpa mengenal musim dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Bisnis jamur tiram memiliki potensi keuntungan yang tinggi karena permintaan yang terus meningkat, harga jual yang stabil, dan biaya produksi yang relatif rendah. Jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai makanan, seperti keripik, camilan jamur krispi, dll.

Usaha inti dalam kluster jamur adalah semua kegiatan on-farm yang dilakukan untuk budidaya jamur tiram dan kegiatan pengolahan sampai dengan pemasaran output yang dihasilkan. Pemasok input merupakan semua usaha yang menyediakan input-input produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong, peralatan

dan teknologi. Hasil produksi jamur tiram dipasarkan ke pembeli yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer. Usaha terkait dalam klaster ini yaitu pengusaha produk turunan jamur tiram (keripik jamur, jamur krispi, kerupuk jamur, sate jamur, dll), sedangkan usaha pendukung yaitu pengusaha kemasan, mesin dan peralatan. Dalam klaster jamur tiram terdapat beberapa lingkungan makro usaha, yaitu faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Beberapa lingkungan makro tersebut diantaranya yaitu: regulasi dan insentif, fasilitas umum, institusi pendukung, dan infrastruktur.



Gambar 4.12. Klaster Jamur Tiram di Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan analisis klaster dapat dilihat peluang-peluang usaha apa saja yang ada dalam pengembangan klaster tersebut. Peluang usaha itu dapat terjadi karena penambahan kapasitas atau volume dari usaha yang sudah ada (ekspansi) bisa juga berupa timbulnya usaha baru (inisiasi) dalam klaster tersebut. Terhadap

peluang-peluang investasi tersebut dibuatkan profil investasinya. Dengan pola demikian, maka pemerintah daerah dapat fokus dan menyelaraskan dengan kemampuan (kekuatan) daerah dan dapat menyalasati kekurangan (kelemahan) daerah dengan mengundang investor-investor yang ada. Investor juga mengetahui dengan pasti investasi apa yang dibutuhkan daerah yang dapat dimasuki oleh investor.

4.2.2. Analisis Peluang Investasi dengan Pohon Industri

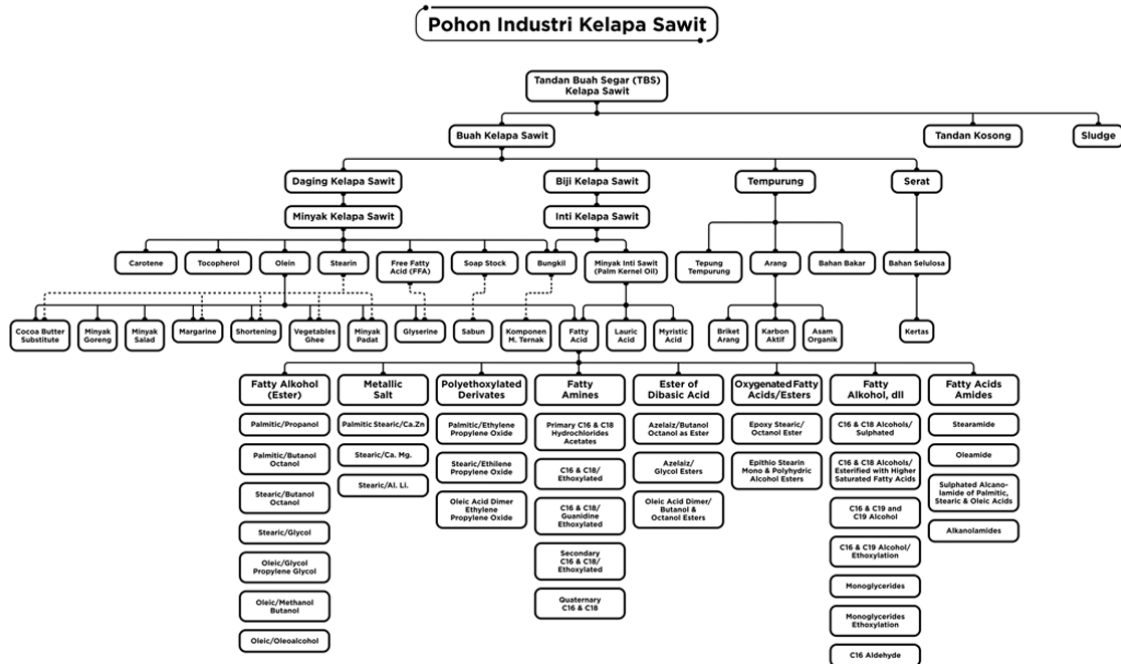
Analisis pohon industri adalah analisis yang dilakukan untuk membuat daftar produk yang dihasilkan dari beberapa proses pengolahan, sehingga semakin panjang proses produksi, maka akan semakin bertambah nilai dari suatu produk. Hasil analisis peluang investasi di Kabupaten Muara Enim diperoleh daftar komoditi yang berpotensi untuk investasi, yang terdiri dari :

1. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - 1.1. Kelapa Sawit
 - 1.2. Karet
 - 1.3. Kopi
 - 1.4. Kentang
 - 1.5. Sapi
 - 1.6. Ikan tambak
2. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - 2.1. FABA
3. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Industri Pengolahan
 - 3.1. Kopi bubuk
 - 3.2. Batik
 - 3.3. Serat Nanas
 - 3.4. Jamur Tiram
 - 3.5. Ikan asap

Analisis pohon industri yang menunjukkan nilai tambah dari komoditas terpilih tersebut disajikan untuk setiap komoditi yang berpotensi investasi. Masing-masing komoditi menunjukkan bahwa investasi dapat dilakukan pada setiap turunan yang dapat diolah atau memilih salah satu produk turunannya saja yang utama.

Gambaran pohon industri masing-masing potensi komoditi unggulan yang berpeluang untuk investasi disajikan berikut ini.

1. Pohon Industri Kelapa Sawit



Gambar 4.13. Pohon Industri Kelapa Sawit

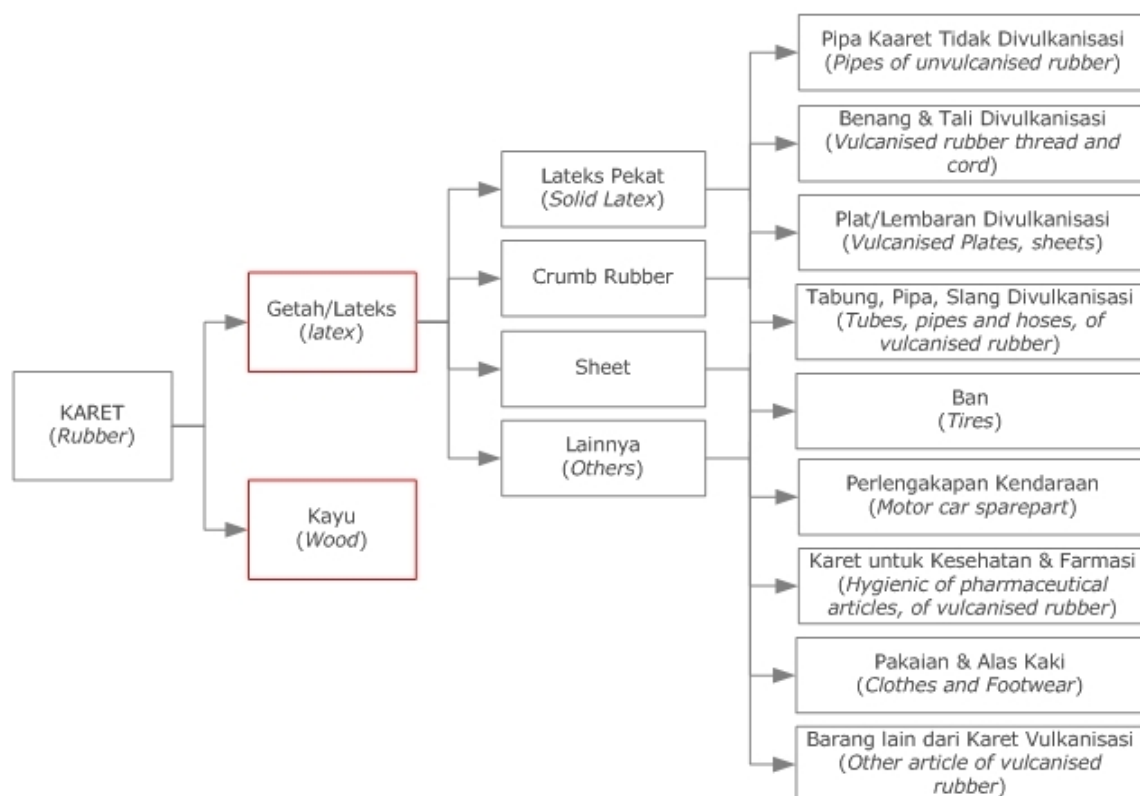
Pada pohon industri kelapa sawit terlihat bahwa proses awalnya yaitu tandan buah segar kelapa sawit yang diperoleh langsung dari pohon kelapa sawit. Hasil panen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu buah kelapa sawit, tandan kosong, dan *sludge*. Hasil dari buah kelapa sawit kemudian dapat diolah menjadi empat olahan yaitu daging kelapa sawit, yang jika diolah lebih lanjut akan menjadi minyak kelapa sawit, kemudian biji kelapa sawit yang jika diolah akan menjadi inti kelapa sawit, kemudian tempurung kelapa sawit, dan serat kelapa sawit.

Dari minyak kelapa sawit yang dihasilkan, jika diolah lebih lanjut dapat menghasilkan carotene, tocopherol, olein, stearin, free fatty acid, dan soap stock. Selain itu, dari inti kelapa sawit dan minyak kelapa sawit dapat menghasilkan bungkil atau ampas kacang yg bisa menjadi bahan baku makanan ternak. Dari inti kelapa sawit juga dapat diolah menjadi minyak inti sawit atau palm kernel oil. Kemudian tempurung kelapa dapat diproses menjadi tepung tempurung, arang, dan

bahan bakar. Sementara serat dari kelapa sawit hanya dapat diolah menjadi bahan selulos a pembuat kertas dengan campuran dari tandan kosong.

Pohon industri kelapa sawit cukup panjang, dimulai dari tanaman kelapa sawit hingga produk akhirnya, namun pengolahan terbesarnya menjadi bahan pokok dari minyak kelapa sawit dan turunannya yang menjadi bahan baku industri. Berdasarkan pohon industri di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat luas menjadikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang kompleks, melibatkan banyak pihak dalam pengolahannya, rantai distribusi, komoditas turunan dan permintaan konsumennya.

2. Pohon Industri Karet

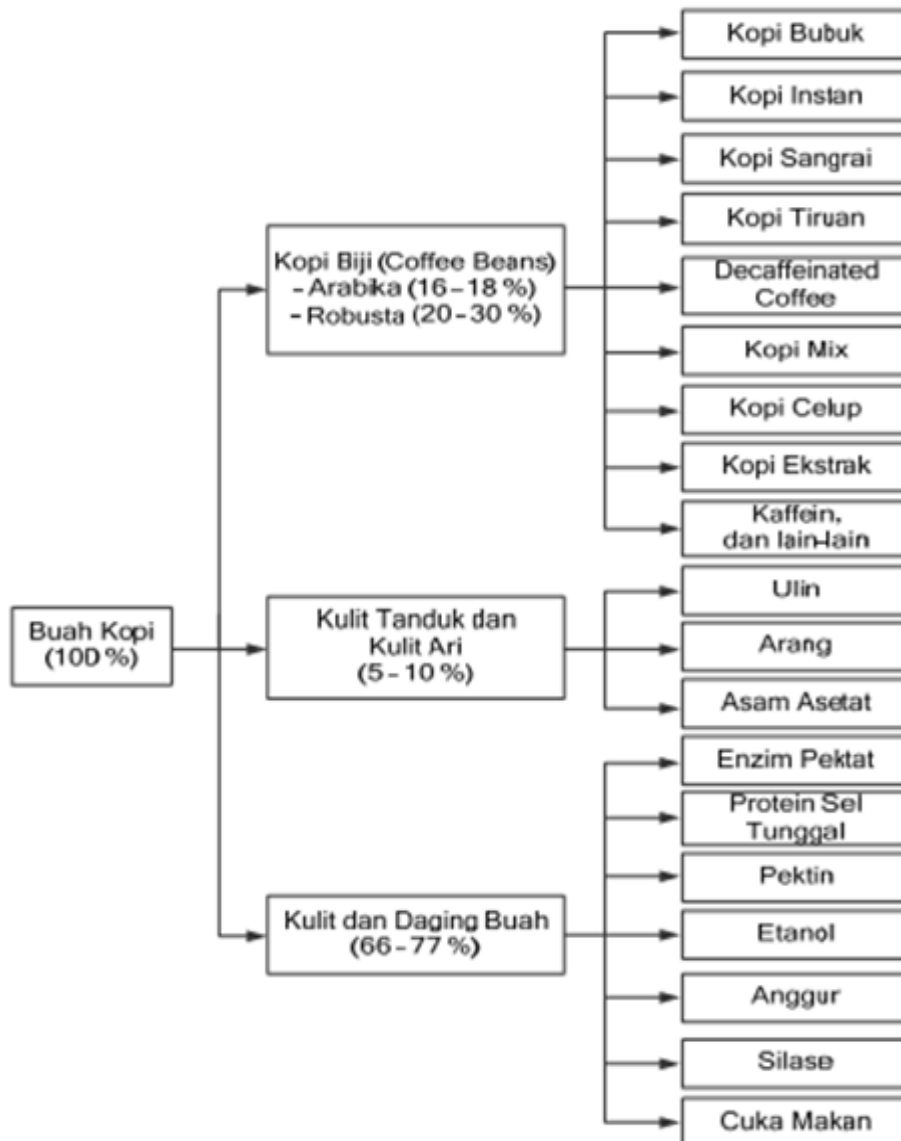


Gambar 4.14.
Pohon Industri Karet

Pada pohon industri karet terlihat bahwa proses awalnya yaitu produksi tanaman karet terdiri dari getah dan kayu yang diperoleh langsung dari pohon karet. Hasil produksi getah kemudian dapat diolah menjadi empat olahan yaitu lateks pekat, crumb rubber, sheet, dan lainnya. Ke empat produk ini selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan seperti yang terlihat pada bagan di

Gambar 4.14. Adapun dari produk kayu karet hanya dapat dimanfaatkan jika tanaman karet sudah tidak berproduksi lagi dan akan dilakukan replanting. Pohon karet dapat menjadi kayu yang dapat diolah menjadi berbagai macam prabot rumah tangga. Artinya, tanaman karet ini meskipun nanti habis masa produktifnya, masih ada manfaatnya dari kayu yang akan ditebang.

3. Pohon Industri Kopi

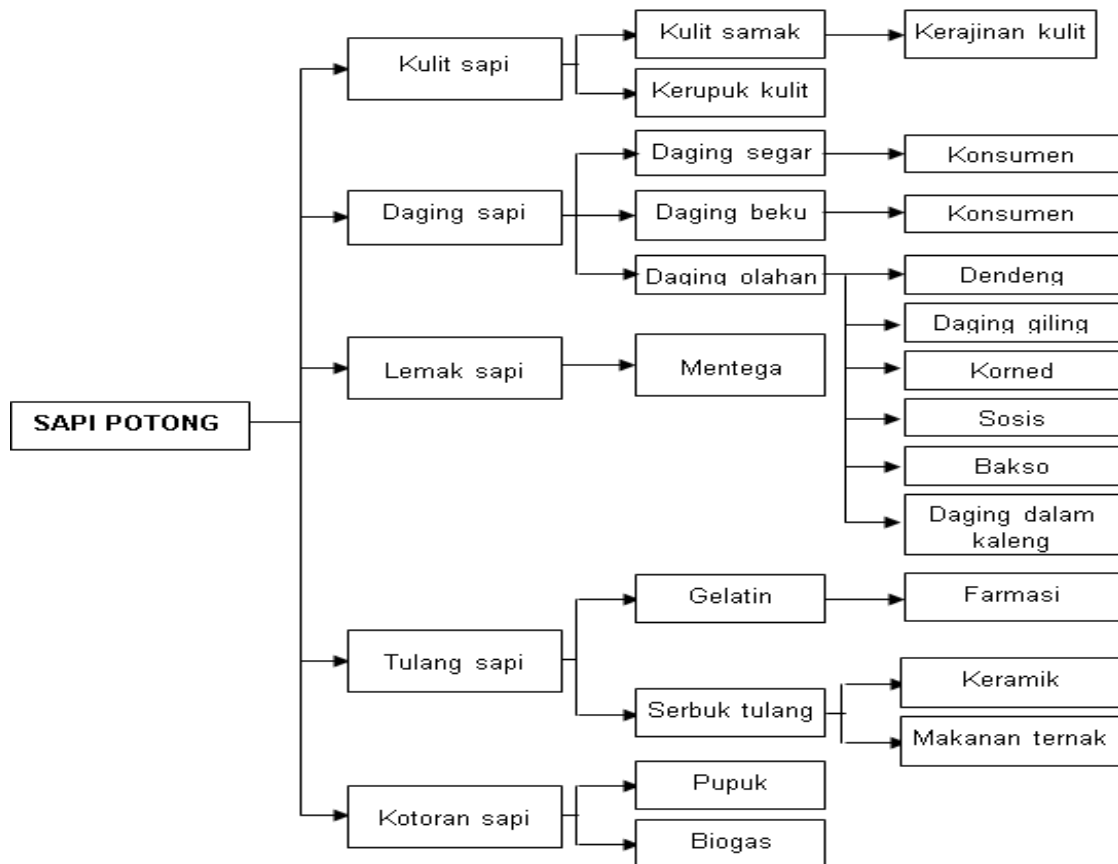


Gambar 4.15.
Pohon Industri Kopi

Pada pohon industri kopi terlihat bahwa proses awalnya yaitu produksi kopi dalam bentuk buah dengan bagian yang bisa diolah terdiri dari kopi biji (*coffee beans*), kulit tanduk dan kulit ari, serta kulit dan daging buah. Hasil produksi utama

berupa biji kopi selanjutnya dapat diolah menjadi kopi bubuk, kopi instan, kopi sangrai, dan berbagai bentuk kopi seperti yang terlihat pada Gambar 4.15. Untuk bagian lain dari buah kopi, yang berasal dari bagian kulit buah juga dapat diolah menjadi beberapa produk turunan, seperti yang disajikan pada Gambar 4.15 di atas.

4. Pohon Industri Sapi

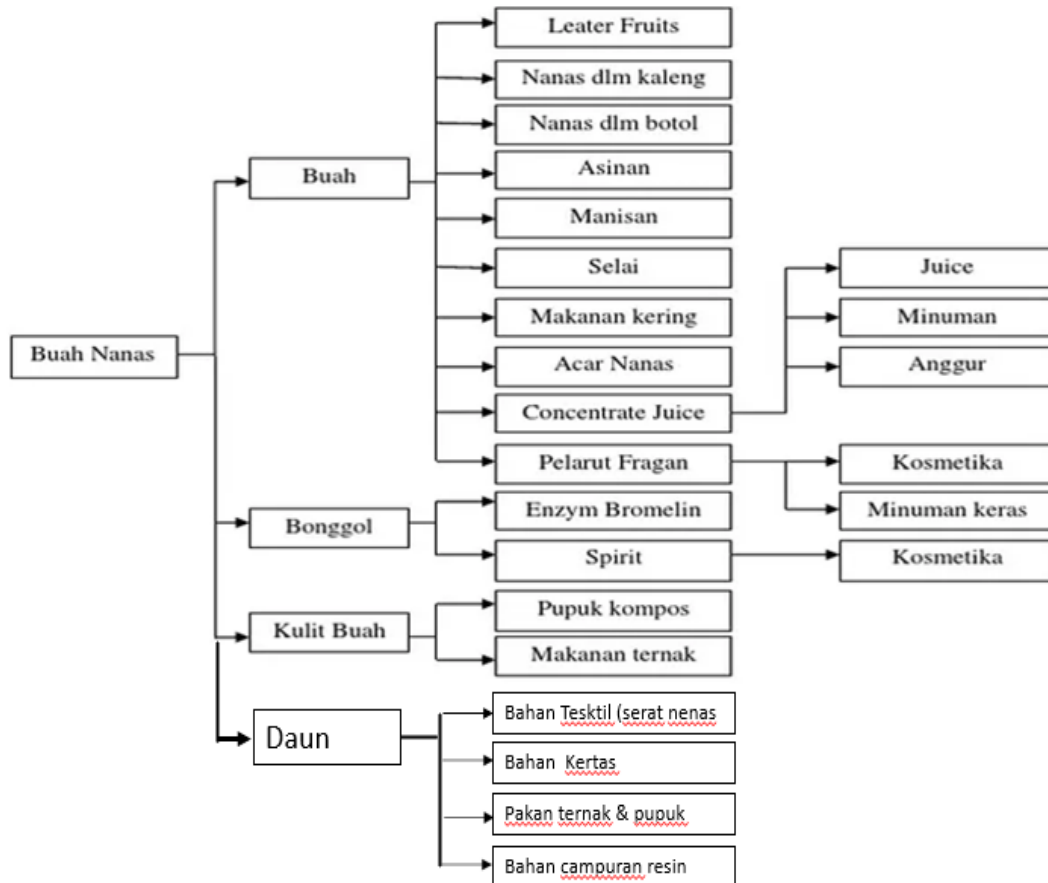


Gambar 4.16.
Pohon Industri Sapi

Pada pohon industri sapi terlihat bahwa dari komoditi sapi, semua bagian tubuhnya dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis, mulai dari daging sapi, kulit, lemak, jeroan, tulang sampai dengan kotorannya. Bagian daging dapat dipilah menjadi daging segar, daging beku dan daging olahan dengan berbagai jenis pangan olahan. Sedangkan bagian kulit dapat diolah menjadi produk turunan seperti kulit samak dan kerupuk kulit. Bagian tulang sampai dengan kotoran juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti yang disajikan pada Gambar 4.16 di atas.

5. Pohon Industri Nanas

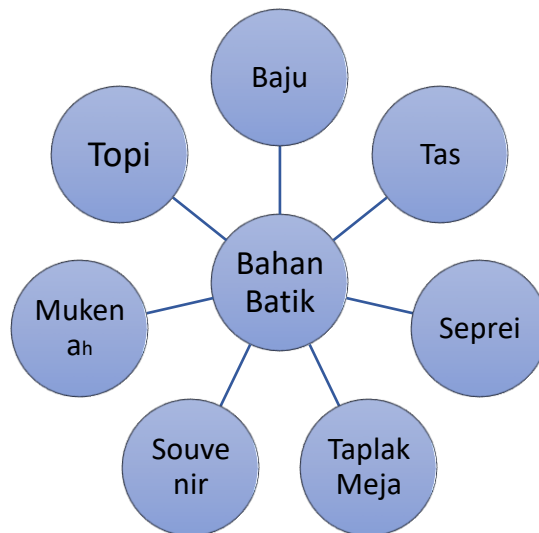
Pada pohon industri nanas terlihat bahwa hampir semua nanas dapat diolah menjadi produk turunan yang memberi nilai tambah. Bagian yang bisa diolah tersebut adalah buah, bonggol, kulit buah dan daun. Produk hilir yang menjadi turunan masing-masing bagian tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17.
Pohon Industri Nanas

6. Pohon Industri Batik

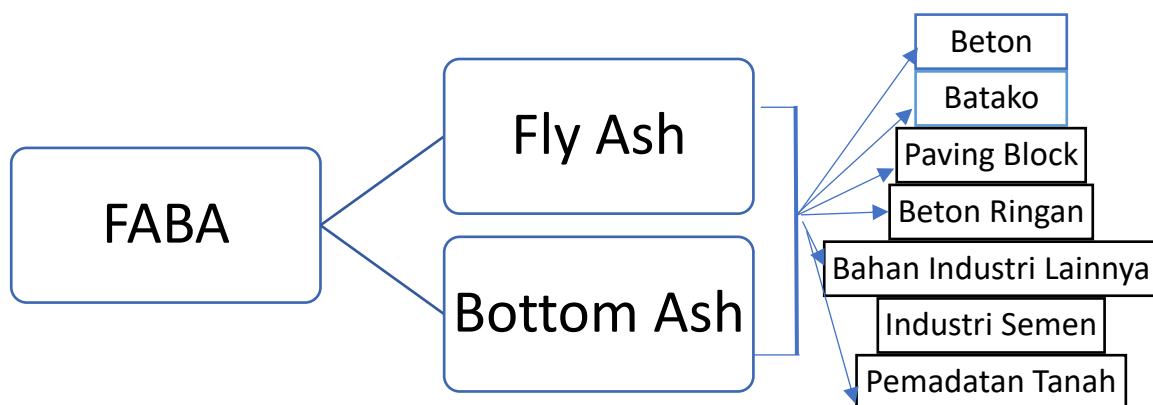
Pohon industri batik menunjukkan bahwa investasi untuk usaha batik memiliki turunan produk yang dapat dibuat. Bukan hanya baju, tetapi juga bentuk produk lain dapat dibuat berbahan baku batik daerah yang dibuat dan memiliki ciri khas. Pada industri batik di Kabupaten Muara Enim, terlihat bahwa pohon industri yang terjadi cenderung belum bercabang banyak, namun memiliki potensi untuk berkembang menurunkan pohon industri yang bercabang banyak, dikarenakan potensi pengembangan produk berbahan baku batik pada masa sekarang ini cenderung semakin berkembang.



Gambar 4.18.
Pohon Industri Batik

7. Pohon Industri FABA (Pohon Industri Batubara)

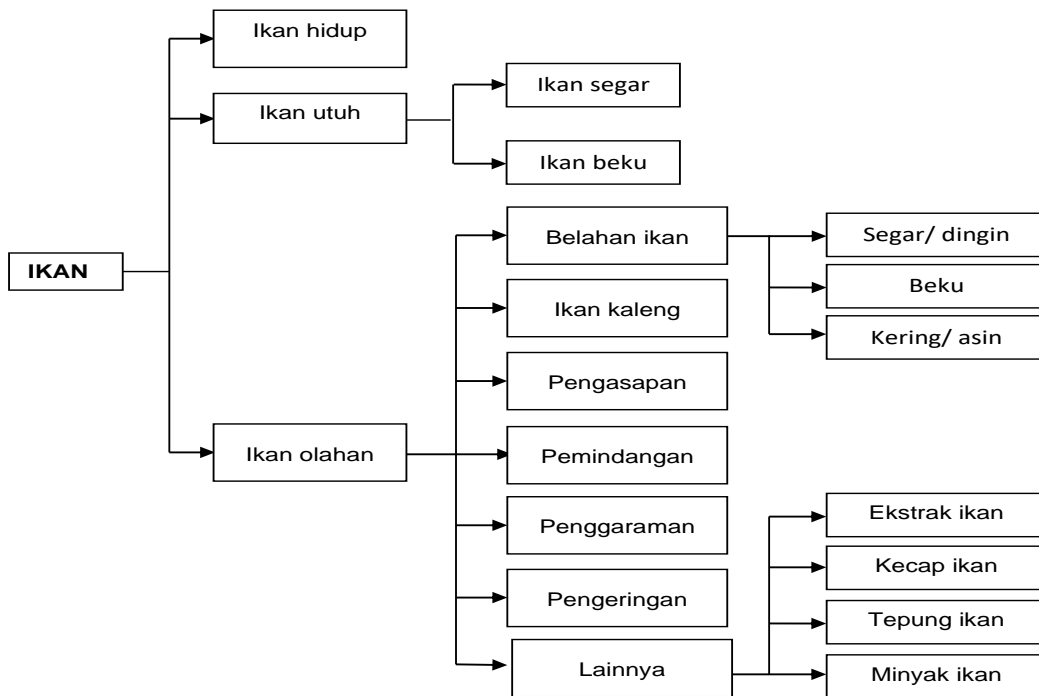
FABA merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, boiler, dan tungku industri. Material yang keluar dari cerobong asap tungku pembakaran dalam bentuk debu yang sangat halus disebut Fly Ash. Sedangkan material lainnya berupa debu kasar yang berada pada dasar tungku disebut Bottom Ash. Oleh karena pohon industri FABA merupakan lanjutan dari pohon industri batubara.



Gambar 4.19.
Pohon Industri FABA

Dari Gambar 4.19 tersebut terlihat bahwa FABA dalam pengembangannya dapat diolah menjadi berbagai produk industri, diantaranya paving block, batako, dan dapat menjadi berbagai bahan baku untuk membuat beton, jalan dan bahan industri lainnya.

8. Pohon Industri Ikan (Perikanan Tambak)

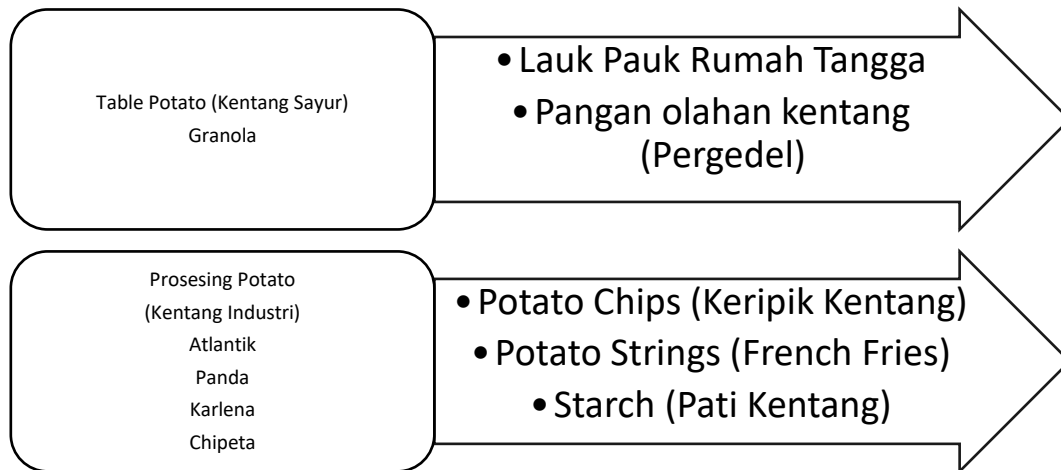


Gambar 4.20. Pohon Industri Ikan

Pohon industri ikan yang disajikan pada Gambar 4.20 menunjukkan bahwa ikan yang dihasilkan dari tambak, kolam, kerambah, atau media perairan lainnya, selain dapat dijual dalam bentuk segar, juga memiliki peluang untuk diolah menjadi produk turunan industrinya. Berbagai jenis olahan ikan yang bisa dibuat adalah ikan asap, ikan asin, ikan kaleng, dan ikan pindang. Kalupun tidak diolah, ikan masih bisa dibekukan untuk dijual nanti. Selain itu, olahan berbahan baku bagian dari ikan juga bisa dilakukan, seperti dibuat tepung ikan, kecap ikan, dan minyak ikan, atau bisa diekstrak menjadi ekstrak ikan.

9. Pohon Industri Kentang

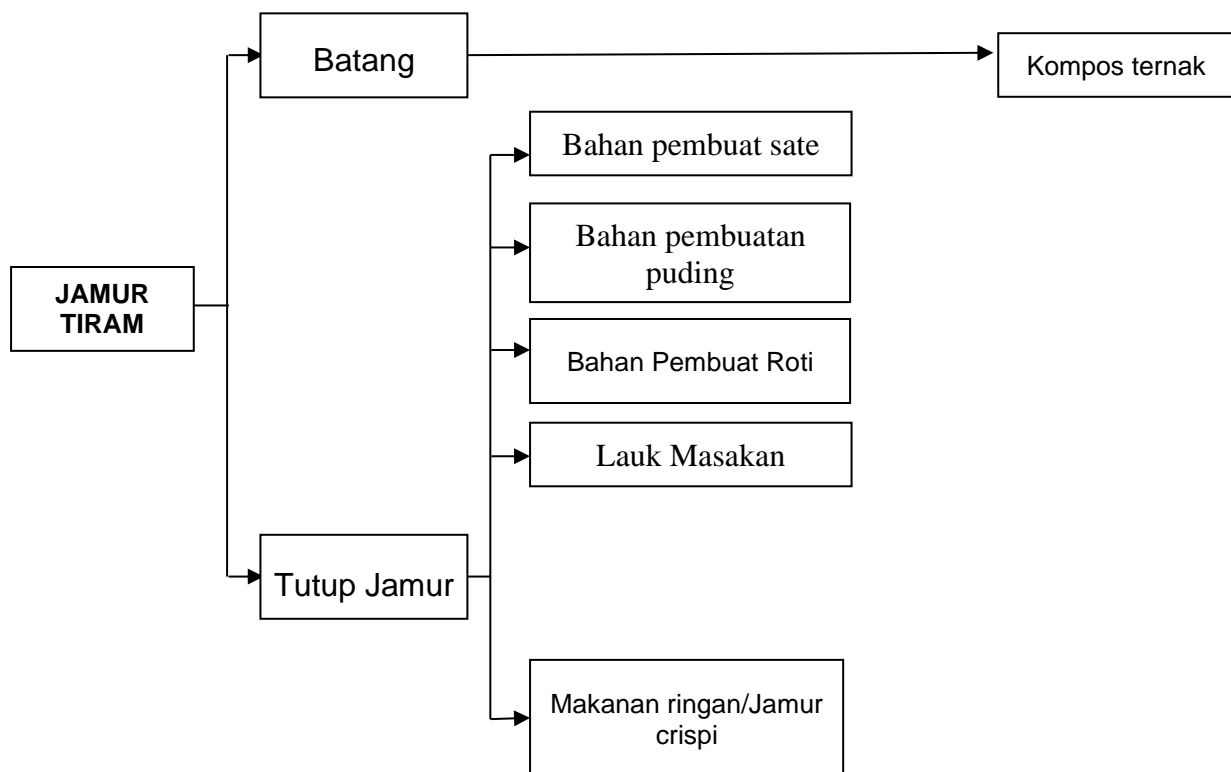
Pohon Industri kentang menunjukkan turunan produk kentang yang diolah menjadi berbagai panganan. Untung kentang sayur, umumnya memang hanya digunakan untuk lauk pauk rumah tangga yang diolah menjadi berbagai masakan. Namun untuk kentang industri mayoritas diolah untuk keripik, dan kentang goreng.



Gambar 4.21. Pohon Industri Kentang

10. Pohon Industri Jamur Tiram

Jamur Tiram produk turunannya diolah dari bagian batang jamur dan bagian tutup jamur. Pada bagian batang umumnya hanya digunakan untuk bahan baku pembuatan kompos. Adapun bagian tutup jamur adalah bagian yang paling banyak diolah untuk berbagai panganan seperti yang disajikan pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22. Pohon Industri Jamur Tiram

4.2.3. Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha merupakan studi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu usaha/bisnis layak untuk dijalankan/diusahakan atau tidak. Aspek kelayakan yang dianalisis pada potensi komoditi yang berpeluang untuk investasi di Kabupaten Muara Enim ini meliputi: 1) Aspek hukum, administrasi dan kelembagaan, 2) Aspek teknis, 3) Aspek pasar, 4) Aspek finansial, 5) Aspek sosial dan lingkungan, dan 6) Aspek risiko. Hasil dari studi kelayakan usaha pada komoditi unggulan yang berpeluang untuk investasi di Kabupaten Muara Enim disajikan untuk setiap komoditi unggulan, dalam uraian berikut ini.

4.2.3.1. Analisa Kelayakan Usaha Kelapa Sawit

4.2.3.1.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Aspek hukum adalah aspek yang menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam berbisnis untuk usaha/komoditi yang diusahakan tersebut. Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dinyatakan layak apabila ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan

Pada usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin Lingkungan.

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa Kelapa Sawit memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada Sektor Perkebunan di Kabupatean Muara Enim yang telah tertuang dalam Draft RPJP Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045, yang berlanjut dari RPJP dan

RPJMD Muara Enim periode sebelumnya, dan juga menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang akan tertera dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan 2020-2040 dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Muara Enim tahun 2020-2040, kelapa sawit dengan semua industri turunannya menjadi komoditi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten

- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perkebunan yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim , seluas lebih kurang 327.404 hektar, tersebar diseluruh wilayah kecamatan untuk komoditi perkebunan utama. Salah satu komoditi utama tersebut adalah kelapa sawit. Lokasi yang disiapkan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim untuk komoditi kelapa sawit berada di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Belimbing
- Komoditi kelapa sawit adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Legalitas ini terlihat dari telah disediakan lahan untuk perusahaan kelapa sawit dalam RTRW Kabupaten Muara Enim, dan komoditi diizinkan bagi pengusahanya untuk mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pada Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya telah memberikan dasar hukum dan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan legalitas perkebunan. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Komoditi kelapa sawit adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap

pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. Dalam aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

- Usaha kelapa sawit juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor perkebunan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa Promosi dan Pemasaran.
- Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk kelapa sawit tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim sudah dalam proses terbit dan akan diusahakan di tahun 2025 sudah dapat terbit semua. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam mendukung investor untuk berinvestasi.

4.2.3.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan kelapa sawit. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

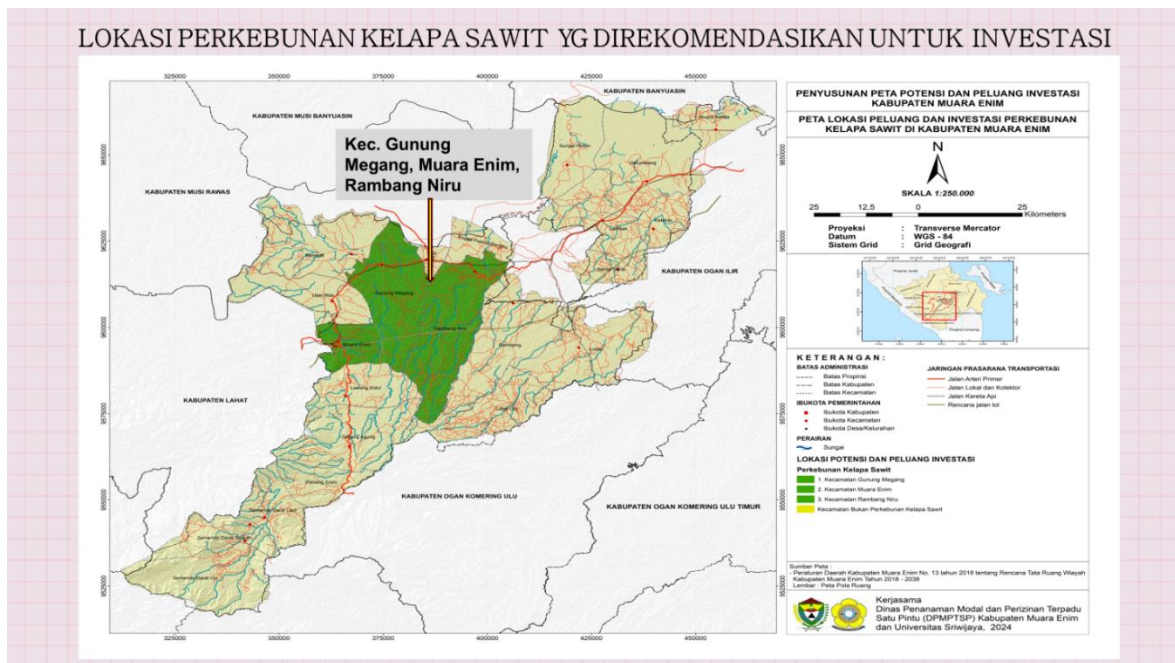
- Lokasi perkebunan kelapa sawit memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik, karena jalan menuju lokasi-lokasi perkebunan sawit milik pemerintah daerah maupun pusat tergolong baik dan terhubung dengan kecamatan dan kabupaten lain.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung tergolong baik karena semua sudah dilalui jalan beraspal, tersedia jaringan listrik dan air bersih, kondisi lingkungan sekitar juga tergolong aman dan kondusif, serta ketersediaan tenaga kerja loka yang memadai karena cukup banyak tersedia penduduk usia produktif yang sudah terbiasa berkebun sawit.

- Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 mencapai 1.803,62 Km. Dari total panjang jalan yang berada di bawah naungan nasional sepanjang 212,30 Km, di bawah wewenang pemerintah provinsi 184,17 Km dan selebihnya 1.407,15 Km di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jalan tersebut termasuk dengan bagian jembatan yang menghubungkan karna perlintasan sungai, dengan jumlah jembatan ter update pada tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim sebanyak 298 jembatan.
- Sarana prasarana air bersih tersedia
Berdasarkan standar teknis air baku untuk kawasan industri, standar penyediaan air baku adalah 0,55 – 0,75 liter/dtk/ha. Mengacu kepada standar tersebut, maka diketahui kebutuhan air baku kawasan industri mencapai 82,08 liter/dtk. Untuk memenuhi air baku, dapat dilakukan pipanisasi dari sumber air permukaan Sungai Enim dan Sungai Lematang yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Air minum yang disalurkan pada tahun 2022 berjumlah 7.591.120 m³, kepada 39.401 pelanggan (BPS Kabupaten Muara Enim, 2023).
- Kebutuhan Listrik tersedia
Berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim Penggunaan listrik di Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dilihat dari jumlah pelanggan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dari 85.645 pelanggan menjadi 89.667 pelanggan, atau naik sekitar 4,7 persen. Sumber listrik langsung dari PLN ranting Muara Enim yang tersebar di delapan kecamatan seperti Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Tanjung Agung, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, dan Gunung Megang. Menurut data terupdate dari BPS yang mengacu pada data PLN ranting Muara Enim Tahun 2021 jumlah Daya Listrik Terpasang adalah 119.409.783 KW. Jumlah daya yang tersedia tersebut mampu memenuhi kebutuhan Listrik di Muara Enim
- Jaringan Telekomunikasi tersedia
Jaringan Telekomunikasi merupakan faktor penting di peradaban sekarang ini. Berdasarkan data BPS, Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di seluruh

kelurahan dan desa pada tahun 2019 memiliki menara BTS dengan sinyal kuat sebanyak 259 menara, selanjutnya meningkat pada tahun 2020 sebanyak 272 menara dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 278 menara. Sebaliknya, untuk sinyal lemah terjadi penurunan sejak 2019 yang tadinya berjumlah 6 menara menjadi 4 menara dan tahun 2021 turun kembali dengan sisa 1 menara sinyal lemah. Menurut Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim semua menara tersebut telah mengcover seluruh wilayah dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki blank spot.

- Terdapat pabrik kelapa sawit untuk pengolahan lanjutan dari TBS yang diproduksi dari kebun kelapa sawit pada wilayah-wilayah sentra kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim dan di kabupaten lain yang bertetangga dengan Kabupaten Muara Enim, seperti di Kabupaten Lahat, Kota Palembang, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan) di wilayah-wilayah perkebunan sawit mayoritas memenuhi syarat tumbuh tanaman sawit, serta status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan kelapa sawit.
- Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit memerlukan penyinaran dari sinar matahari langsung selama 5 – 7 jam per hari, curah hujan 1.500 – 4.000 mm per tahun, suhu lingkungan yang ideal pada perkebunan sawit yaitu 24 – 28 derajat celsius, tumbuh dengan baik pada daerah dengan ketinggian sekitar 1.500 mdp, tanaman sawit membutuhkan kecepatan angin sekitar 5 – 6 km per jam untuk membantu proses penyerbukannya. Unsur-unsur klimatologi tersebut, mayoritas terpenuhi pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk investasi kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim.

Kelayakan secara teknis ini mayoritas terpenuhi pada wilayah-wilayah yang telah disiapkan untuk perkebunan kelapa sawit, terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim seperti yang digambarkan pada peta di Gambar 4.23 berikut ini (Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Muara Enim, dan Kecamatan Rambang Niru).



Gambar 4.23.
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Muara Enim.

Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim yang dialokasikan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Belimbing, dengan prioritas yang direkomendasikan di Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Muara Enim, dan Kecamatan Rambang Niru relatif dekat dengan pusat kota Muara Enim. Wilayah-wilayah tersebut juga memiliki akses ke pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang mengolah hilirisasi produksi

kelapa sawit, sehingga secara tidak langsung akan berimbas pada pertambahan nilai yang akan dinikmati oleh masyarakat dan Kabupaten Muara Enim. Saat ini terdapat tiga komoditas unggulan dengan kualitas standar ekspor yang menjadi penyangga perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Komoditas tersebut adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Ketiga komoditi ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui perdagangan domestik dan luar negeri. Tren kenaikan yang terjadi pada komoditas kelapa sawit mengungguli jumlah produksi dua komoditas lainnya, yaitu karet dan kopi. Kelapa sawit menjadi produk perkebunan besar di wilayah Muara Enim dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Di dalam usaha perkebunan kelapa sawit, setiap perkebunan akan melakukan upaya untuk melakukan peningkatan produktivitas dari setiap pohon kelapa sawit produksinya, mulai dari pemilihan bibit unggul sampai dengan perawatan secara maksimal yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan produksi kelapa sawit secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menekan biaya operasional sehingga mendapatkan kualitas TBS yang maksimal dengan harga yang kompetitif. Upaya untuk memperbesar manfaat kelapa sawit, dengan mengolah kelapa sawit menjadi produk minyak goreng menjadi kunci utama peningkatan nilai tambah dalam industri ini. Dengan menghasilkan produk kelapa sawit berkualitas tinggi untuk diolah di pabrik CPO yang terintegrasi dengan perkebunan, selain akan meningkatkan nilai tambah produk tersebut, akan menciptakan jalur distribusi yang efisien juga. Berdasarkan analisis data produksi perkebunan kelapa sawit, jumlah pabrik CPO yang masih minim dan pabrik pengolahan minyak goreng yang belum beroperasi di Kabupaten Muara Enim, menjadi peluang investasi yang menjanjikan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah dari industri ini. Jika ditambah dengan pembangunan kilang minyak goreng sebagai storage/penampungan minyak goreng akan sangat bermanfaat untuk menangkap pasar kebutuhan minyak goreng domestik maupun ekspor. Adanya hilirisasi dan integrasi kelapa sawit yang berada di wilayah Muara Enim, pangsa pasar untuk mengembangkan aktivitas penunjang industri turunan dari kelapa sawit di Muara Enim dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana seperti area pergudangan, perkantoran dan sarana pelayanan umum.

2. Supply dan Market Driven Kelapa Sawit

Hasil analisis *supply dan market driven* kelapa sawit, memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri agro berupa hilirisasi kelapa sawit yang ditopang juga oleh daerah penyangga hilirisasi kelapa sawit yang berada hampir diseluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya permintaan akan produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit ini tergolong besar dan akan berkelanjutan. Potensi pasar ini juga akan semakin besar jika dibangun kawasan industri di Kabupaten Muara Enim. Hal ini karena kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim sangat potensial dikembangkan industri hilirisasi agro berbasis oleofood. Selama ini bahan baku berupa CPO yang berasal dari perkebunan sawit hanya dijual sebagai bahan mentah kepada kawasan industri yang berada diluar Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut membuat pertambahan nilai komoditas yang berasal dari perdagangan tidak sebesar wilayah lainnya yang juga sebagai produsen sawit.. Faktor pertama yang mendukung daya saing minyak sawit yang tinggi adalah tingkat efisiensi yang tinggi dari minyak tersebut. CPO merupakan sumber minyak nabati termurah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai. Faktor lain adalah bahwa, sekitar 80 persen dari penduduk dunia khususnya di negara berkembang masih berpeluang meningkatkan konsumsi per kapita untuk minyak nabati yang harganya murah. Faktor berikutnya yang juga akan memperbesar peluang minyak sawit adalah terjadinya pergeseran dalam industri yang menggunakan bahan baku minyak bumi ke bahan yang lebih bersahabat dengan lingkungan yaitu oleokimia yang bahan bakunya adalah CPO. Kecenderungan tersebut sudah tampak di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Selain itu produk turunan kelapa sawit yang pernah disajikan dalam pohon industri kelapa sawit sebelumnya menunjukkan bahwa banyak potensi pengembangan produk turunan kelapa sawit. produksi minyak sawit. Tren permintaan di Indonesia saat ini meningkat seiring dengan tingkat permintaan domestik dan internasional yang terus meningkat. Pada tahun 2025 tingkat konsumsi minyak sawit di Indonesia sebesar 13,3 juta dengan kebutuhan ekspor diperkirakan lebih dari 30 juta ton. Kebutuhan produk minyak goreng untuk konsumsi rumah tangga baik untuk pasar domestik maupun internasional semakin meningkat seiring meningkatnya permintaan dan tren

gaya hidup. Keunggulan yang dimiliki oleh minyak sawit baik dari segi harga dan manfaat bagi tubuh membuat tingkat permintaan untuk konsumsi semakin besar. Selain itu, kebutuhan selain untuk konsumsi rumah tangga memperlihatkan tren kenaikan. Kebutuhan industri untuk energi bio diesel yang semakin besar membuat permintaan produk minyak goreng untuk industri semakin meningkat setiap tahunnya. Rata-rata nasional konsumsi minyak goreng sawit sebesar 10,42 kg/kapita/tahun. Dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 18 provinsi yang tingkat konsumsi minyak goreng sawit diatas rata-rata nasional. Peningkatan konsumsi minyak goreng setiap tahun pada pasar domestik, baik nasional maupun lokal, membuka peluang bagi investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku, dan membangun pabrik minyak goreng sebagai industri hilirnya di Kabupaten Muara Enim dengan ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah. Ketersediaan pasar produk minyak goreng yang cukup besar terlihat dari angka permintaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mendatangkan investor ke wilayah ini untuk membangun industri minyak goreng dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja, komoditas perkebunan dan menggerakkan perekonomian Kabupaten Muara Enim. Perkembangan konsumsi minyak goreng kelapa sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia selama tahun 2002-2020 pada umumnya mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 4,88% per tahun.

4.2.3.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (Capital Expenditure)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *Capital Expenditure* (Capex) pada perkebunan kelapa sawit didasarkan atas biaya yang timbul dari pembelian dan pembukaan lahan, pembangunan pagar, dan pembelian peralatan. Untuk lahan yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi perkebunan kelapa sawit per hektar di Kabupaten Muara ini adalah sebesar Rp. 118.444.500,-, dengan rincian pada Tabel 4.22 berikut ini.

Tabel 4.23.
CAPEX Investasi Perkebunan Kelapa Sawit

Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
Total Biaya Investasi				118.444.500
1. Pembelian Lahan	Ha	1	30.000.000	30.000.000
2. Pembersihan dan perataan lahan (per ha)				70.000.000
- Land clearing	Ha	1	15.000.000	50.000.000
- Peralatan	unit	20	1.000.000	20.000.000
3. Pengajiran dan lubang tanam kelapa sawit (159 tanaman)				5.108.000
- Upah Tenaga Harian	HK	40	100.000	4.000.000
- Glyphosat 0,5 %	ltr	1	35.000	28.000
- Pupuk Rock Phosphat	kg	20	4.000	80.000
- Handsprayer	buah	5	200.000	1.000.000
4. Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	batang	159	60.000	9.540.000
5. Penanaman Bibit Kelapa Sawit				3.796.500
- Upah memancang	HK	5	50.000	250.000
- Upah memupuk	HK	0	50.000	5.000
- Pupuk urea dan rock phosphate	Sak	1	350.000	437.500
- Alat bantu tanam (saprodi)	Paket	1	3.104.000	3.104.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial perkebunan kelapa sawit.

Tabel 4.24.
Asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit

No.	Uraian	Nilai	Satuan
1	Proyeksi Lama Usaha	25	Tahun
2	Umur tanaman menghasilkan	4	Tahun
3	Jumlah Bibit	159	Batang
4	Harga Bibit	60.000	Rp/Batang
5	Jarak Tanam	8x9	m
6	Jumlah Bulan per Tahun	12	Bulan
7	Jumlah Hari per Bulan	30	Hari
8	Penjualan Kelapa Sawit		
	a. Tonase	Terlampir	kg/tahun
	b. Harga Jual	Terlampir	Rp/Kg

	c. Volume Jual	Terlampir	kg/tahun
9	<i>Discount Factor</i>	3,5	Persen
10	Proporsi Sumber Dana Investasi		
	a. Kredit	0	Persen
	b. Modal Sendiri	100	Persen
11	Kondisi Kesuburan Tanah	S1	
12	Luas lahan	1	ha
13	Upah tenaga kerja	100.000	Rp/HOK
14	Trend Inflasi Sumatera Selatan	1,84%	persen per tahun

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25.
Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Kelapa Sawit

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
Total Biaya	4.365.000	5.425.000	6.375.000	14.565.000	14.565.000
	6	7	8	9	10
	15.105.923	15.383.872	15.666.935	15.955.207	16.248.783
	11	12	13	14	15
	16.547.760	16.852.239	17.162.320	17.478.107	17.799.704
	16	17	18	19	20
	18.127.219	18.460.760	18.800.438	19.146.366	19.498.659
	21	22	23	24	25
	19.857.434	20.222.811	20.594.911	20.973.857	21.359.776

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan *capital budgeting*. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat *capital budgeting*nya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai *net present value* sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan. Berikut disajikan perhitungan kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit yang diukur dari nilai NPV dan beberapa kriteria pengukuran lainnya.

Tabel 4.26.
Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk Usaha 1 Hektar

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	306.676.642
B/C Ratio	2,83
Payback period (tahun)	6,27
Internal Rate of Return (IRR) %	15,15
Profit	2,45

4.2.3.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perkebunan dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, perkebunan kelapa sawit dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan perkebunan dan industri hilir yang menjadi lanjutan usaha dari perkebunan kelapa sawit.

Salah satu dampak positif dari keberadaan perkebunan kelapa sawit dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari perkebunan kelapa sawit di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada perkebunan kelapa sawit ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Pada tahap pengembangan, perkebunan kelapa sawit membutuhkan tenaga kerja meliputi tenaga kerja kasar, tenaga menengah, tenaga ahli. Rekrutmen tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal untuk semua kebutuhan kelompok tenaga kerja yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada produksi TBS, yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan perkebunan, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, komoditi kelapa sawit, masuk sebagai komoditi unggulan dalam dokumen RPJP Kabupaten Muara Enim 2025-2035. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang menguntungkan ini belum diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan,. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang

keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, selain menentukan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit, juga dibutuhkan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan dapat menampilkan perhitungan yang dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi. Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah. Faktor internal perusahaan juga berpengaruh dalam mengatur keuangan perusahaan, seperti memperhatikan cashflow perusahaan, dan faktor-faktor berikut ini:

- Suku bunga

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diimplementasikan pada Bank Umum akan berpengaruh terhadap perhitungan bisnis karena pelaksanaan proyek Perkebunan kelapa sawit sebagian akan didanai dengan pinjaman dari bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pada saat menetapkan tingkat suku bunga dalam asumsi-asumsi perhitungan OPEX, nilai suku bunga yang disepakati harus di atas tingkat suku bunga pasar.

- Nilai tukar rupiah

Sebagian material-material untuk pembangunan industri hilir dari perkebunan kelapa sawit umumnya berasal dari luar negeri sehingga transaksinya masih menggunakan mata uang dolar. Apabila nilai tukar mata uang rupiah merosot tajam, akan sangat berpengaruh terhadap OPEX yang telah dihitung sebelum bisnis dijalankan. Hal lain yang mempengaruhi perhitungan bisnis adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan inflasi yang terjadi sesuai dengan prakiraan yang sudah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 4% dan pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak positif, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali normal dan tumbuh meningkat.

5. Industri Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan kebun

terendam, sehingga tidak dapat diproduksi secara normal. Namun risiko ini termasuk jarang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu Kritis Dalam pengembangan Perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk pengangkutan TBS;
- Penyediaan pintu air untuk pengendalian banjir;
- Pembentukan kemitraan perkebunan dengan pabrik kelapa sawit dalam penyediaan jaminan pasokan bahan baku CPO.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan fasilitas pengendalian banjir;
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok

4.2.3.2. Analisa Kelayakan Usaha Karet

4.2.3.2.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin Lingkungan.

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang

berlaku. Pada usaha Perkebunan Karet di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa karet memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada sektor perkebunan selain kelapa sawit dan kopi di Kabupaten Muara Enim yang telah tertuang dalam RPJP Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 dan juga menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang tertera dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Muara Enim tahun 2020-2040, karet dengan semua industri turunannya menjadi komoditi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan Muara Enim menjadi salah satu wilayah produsen karet di Sumatera Selatan.
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perkebunan yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan untuk komoditi perkebunan utama. Salah satu komoditi utama tersebut adalah karet. Lokasi yang disiapkan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim untuk komoditi karet terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah;
- Komoditi karet adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Komoditi karet adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan

melindungi kepentingan publik. Dalam aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

- Usaha Perkebunan karet juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor perkebunan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi, untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa promosi dan pemasaran.

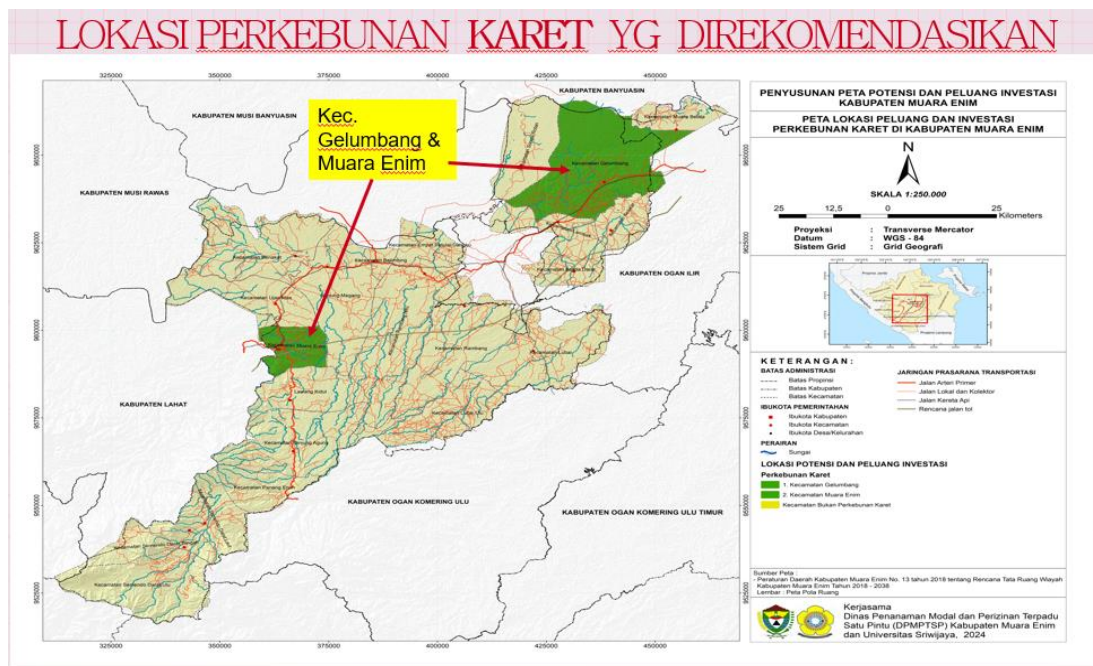
4.2.3.2.2. Aspek Teknis

Secara teknis, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan tanaman karet kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Tengah yang memang berada pada dataran tinggi. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi perkebunan karet, hampir semua wilayahnya memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik, karena jalan menuju lokasi-lokasi perkebunan karet meskipun didominasi karet rakyat, semua akses milik pemerintah daerah maupun pusat tergolong baik dan terhubung dengan kecamatan dan kabupaten lain.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung tergolong baik karena semua sudah dilalui jalan beraspal, tersedia jaringan listrik dan air bersih, kondisi lingkungan sekitar juga tergolong aman dan kondusif, serta ketersediaan tenaga kerja lokal yang memadai karena cukup banyak tersedia penduduk usia produktif yang sudah terbiasa berkebun karet.
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan) di wilayah-wilayah perkebunan karet mayoritas memenuhi syarat tumbuh tanaman karet, serta status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan komoditi karet.

Kelayakan secara teknis ini mayoritas terpenuhi pada wilayah-wilayah yang telah disiapkan untuk perkebunan karet, terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi perkebunan karet di Kabupaten

Muara Enim seperti yang digambarkan pada peta di Gambar 4.24 berikut ini (Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Enim).



Gambar 4.24.

Lokasi Perkebunan Karet yang Direkomendasikan untuk Investasi

4.2.3.2.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Perkebunan Karet di Kabupaten Muara Enim

Kawasan perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim yang dialokasikan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim berada di semua kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu dan Semenda Darat Tengah, dengan prioritas yang direkomendasikan di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Enim, relatif dekat dengan pusat kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan pabrik-pabrik pengolahan yang mengolah hilirisasi produksi getah karet, sehingga secara tidak langsung akan berimbas pada pertambahan nilai yang akan dinikmati oleh masyarakat dan Kabupaten Muara Enim. Saat ini terdapat tiga komoditas unggulan dengan kualitas standar ekspor yang menjadi penyangga perekonomian di Kabupaten Muara Enim.

Komoditas tersebut adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Ketiga komoditi ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui perdagangan domestik dan luar negeri. Karet menjadi produk perkebunan besar di wilayah Muara Enim dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Di dalam usaha perkebunan karet, setiap perkebunan akan melakukan upaya untuk melakukan peningkatan produktivitas dari setiap pohon, mulai dari pemilihan bibit unggul sampai dengan perawatan secara maksimal yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan produksi getah karet secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menekan biaya operasional sehingga mendapatkan kualitas getah karet yang maksimal dengan harga yang kompetitif. Upaya untuk memperbesar manfaat karet, dengan mengolah getah karet menjadi produk hilir menjadi kunci utama peningkatan nilai tambah dalam industri ini. Dengan menghasilkan produk Bokar berkualitas tinggi untuk diolah di pabrik crumb rubber yang terintegrasi dengan perkebunan, selain akan meningkatkan nilai tambah produk tersebut, akan menciptakan jalur distribusi yang efisien juga. Berdasarkan analisis data produksi perkebunan karet, jumlah pabrik pengolahan karet yang masih minim, menjadi peluang investasi yang menjanjikan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah dari industri ini. Ditambah dengan pembangunan pabrik industry hilir berbagai macam produk berbahan baku karet akan sangat bermanfaat untuk menangkap pasar. Adanya hilirisasi dan integrasi industri karet yang berada di wilayah Muara Enim, pangsa pasar untuk mengembangkan aktivitas penunjang industri turunan dari karet di Muara Enim dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana seperti area pergudangan, perkantoran dan sarana pelayanan umum.

2. Supply dan Market Driven Perkebunan Karet

Hasil analisis *supply dan market driven* karet, memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri agro berupa hilirisasi karet meskipun belum berada pada hilirisasi produk jadi (mayoritas masih hilirisasi bahan mentah/bahan baku). Namun demikian hilirisasi ini ditopang juga oleh daerah penyangga hilirisasi karet yang berada hampir diseluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya permintaan akan produksi karet ini tergolong besar dan akan berkelanjutan. Potensi pasar ini juga akan semakin besar jika dibangun

kawasan industri di Kabupaten Muara Enim, hal ini karena karet di Kabupaten Muara Enim sangat potensial dikembangkan industri hilirisasinya.

Pemasaran produksi karet yang dilakukan petani umumnya dalam bentuk produk Bokar yang dijual setelah lateks hasil sadap dikumpulkan dan selanjutnya dibekukan menjadi bokar dengan periode penjualan satu minggu atau dua minggu sekali. Distribusi pemasaran bokar ini dapat terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran yang melalui saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran ini sangat penting, khususnya untuk melihat tingkat harga masing-masing lembaga pemasaran. Dalam pemasaran bokar di Kabupaten Muara Enim, mayoritas mekanisme pasarnya melalui dua pilihan saluran pemasaran yang melibatkan lembaga pemasaran sebelum sampai ke pabrik pengolahan karet sebagai tujuan akhir dari pemasaran bokar yang dijual petani. Pada industri hilirnya, produk turunan dari karet sebenarnya sudah banyak memiliki variasi, namun variasi tersebut sayangnya belum terjadi di Kabupaten Muara Enim. Hadirnya industri hilir untuk menampung produksi perkebunan karet sangat diharapkan oleh petani. Kehadiran industri hilir tersebut diharapkan mampu meningkatkan harga jual karet yang saat ini menurun dengan alasan terjadi kelebihan penawaran di pasar dunia. Dengan demikian, adanya industri hilir karet di Kabupaten Muara Enim diharapkan mampu menampung over produksi karet petani di pasar ekspor. Dilihat dari perkembangan pasar dan analisis keuntungan dari nilai tambah yang didapat pada industri hilir, maka orientasi pasar untuk komoditi karet memang sebaiknya lebih diarahkan pada pengembangan industri hilirnya daripada hanya mengandalkan produk primer yang selama ini dominan berlangsung. Perolehan nilai tambah dan penyerapan lebih banyak tenaga kerja melalui pengembangan industri hilir diharapkan akan memberikan manfaat yang besar. Pengembangan ini memang mesti dilakukan secara bertahap dan bukan berarti semua produksi karet mesti diolah menjadi produk turunan di dalam negeri. Surplus produksi yang cukup berlimpah sebagian tetap dapat diekspor dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki, dan selain itu diperkirakan memang kapasitas produksi industri hilir yang ada di Provinsi Sumatera Selatan belum dapat menampung pasokan total bahan baku yang ada dalam jangka pendek maupun menengah. Selanjutnya mengapa industri hilir karet ini juga penting untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, selain alasan wilayah

ini sebagai salah satu sentra produksi karet di Sumatera Selatan adalah potensi pelabuhan laut berskala nasional dan internasional yang segera terealisasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran pelabuhan ini nantinya tentu saja akan mempermudah pemasaran ekspor komoditi ini, sekaligus memotong saluran pemasaran ekspor karet yang biasanya harus melalui provinsi lain yang memiliki pelabuhan sehingga memperpanjang saluran pemasaran yang akan berdampak kepada penambahan biaya pemasaran, yang tentu saja akan mengurangi pendapatan eksportir.

4.2.3.3. Aspek Keuangan

1. CAPEX (Capital Expenditure)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada perkebunan karet didasarkan atas biaya yang timbul dari pembelian dan pembukaan lahan, penanaman, dan pembelian peralatan. Untuk lahan yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi perkebunan karet per hektar di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 61.393.285,-, dengan rincian pada Tabel 4.27 berikut ini.

Tabel 4.27.
CAPEX Investasi Perkebunan Karet

Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)	Umur (Th)	Penyusutan (Rp)
Total Biaya TB				61.393.285		506.560
1. Pembelian lahan kosong	Ha	1	30.000.000			
2. Pembersihan dan perataan lahan (per ha)			31.393.285			
- Land clearing	Ha	1	15.000.000	7.150.000		
3. Pengajiran dan lubang tanam karet (500 batang)				163.000		800
- Upah Tenaga Harian	HK	0	100.000	35.000		
- Glyphosat 0,5 %	Ltr	1	35.000	28.000		
- Pupuk Rock Phosphat	Kg	20	4.000	80.000		
- Handsprayer	buah	0	200.000	20.000	25	800
4. Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	batang	159	60.000	9.540.000	25	381.600
5. Penanaman Bibit Kelapa Sawit				3.796.500		124.160
- Upah memancang	HK	5	50.000	250.000		

- Upah memupuk	HK	0	50.000	5.000		
- Pupuk urea dan rock phosphate	Sak	1	350.000	437.500		
- Alat bantu tanam (Saprodi)	Paket	1	3.104.000	3.104.000	25	124.160

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial perkebunan karet.

Tabel 4.28.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Karet

No.	Uraian	Nilai	Satuan
1	Proyeksi Lama Usaha	28	Tahun
2	Umur tanaman menghasilkan	8	Tahun
3	Jumlah Bibit	500	Batang/ha
4	Harga Bibit	6.000	Rp/Batang
5	Jumlah Bulan per Tahun	12	Bulan
6	Jumlah Hari per Bulan	28	Hari
7	Penjualan Karet		
	a. Tonase	Terlampir	kg/tahun
	b. Harga Jual	Terlampir	Rp/Kg
	c. Volume Jual	Terlampir	kg/tahun
8	<i>Discount Factor</i>	3,5	Persen
9	Proporsi Sumber Dana Investasi		
	a. Kredit	0	Persen
	b. Modal Sendiri	100	Persen
10	Upah Harian	100.000	Rupiah/HK
11	Jenis Klom		
12	Kondisi Tanah	S1	
13	Jarak Tanam	4X5	m

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29.
Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Karet

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
Total Biaya	3.701.285	3.676.285	3.701.285	3.701.285	3.701.285
	6	7	8	9	10
	8.882.500	6.210.000	7.985.000	5.465.220	5.465.220
	11	12	13	14	15
	5.465.220	6.630.220	5.465.220	5.465.220	5.465.220
	16	17	18	19	20
	5.465.220	6.630.220	5.465.220	5.465.220	5.465.220
	21	22	23	24	25
	5.465.220	6.630.220	5.465.220	5.465.220	5.465.220
	26	27	28		
5.465.220	6.630.220	5.465.220			

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (feasible) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.30.
Kelayakan Usaha Perkebunan Karet untuk Usaha 1 Hektar

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	388.374.186
B/C Ratio	4,11
Payback period (tahun)	6,8
Internal Rate of Return (IRR) %	19,19
Profit	2,83

4.2.3.4. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perkebunan dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya,

perkebunan karet dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan perkebunan dan industri hilir yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan perkebunan karet dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari Perkebunan Karet di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada perkebunan karet ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk. Pada tahap pengembangan, perkebunan karet membutuhkan tenaga kerja sebagai berikut tenaga kasar, tenaga menengah, tenaga ahli. Rekrutmen ribuan tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.5. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada produksi getah karet, yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan kegiatan industri, termasuk Perkebunan Karet. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan perkebunan, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, komoditi karet, masuk sebagai komoditi unggulan dalam dokumen RPJP Kabupaten Muara Enim 2025-2035. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan Perkebunan Karet. Kondisi yang menguntungkan ini belum diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum memengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan,. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, selain menentukan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan perkebunan karet, juga dibutuhkan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan dapat menampilkan perhitungan yang dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi. Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah. Faktor internal perusahaan juga berpengaruh dalam mengatur keuangan perusahaan, seperti memperhatikan cashflow perusahaan.

- Suku bunga

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diimplementasikan pada Bank Umum akan berpengaruh terhadap perhitungan bisnis karena pelaksanaan proyek Perkebunan karet sampai dengan industri hilirnya sebagian

akan didanai dengan pinjaman dari bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pada saat menetapkan tingkat suku bunga dalam asumsi-asumsi perhitungan OPEX, nilai suku bunga yang disepakati harus di atas tingkat suku bunga pasar.

- Nilai tukar rupiah

Sebagian material-material untuk pembangunan perkebunan berasal dari luar negeri sehingga transaksinya masih menggunakan mata uang Dolar. Apabila nilai tukar mata uang Rupiah merosot tajam, akan sangat berpengaruh terhadap OPEX yang telah dihitung sebelum bisnis dijalankan. Hal lain yang mempengaruhi perhitungan bisnis adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan inflasi yang terjadi sesuai dengan prakiraan yang sudah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 4% dan pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak positif, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali normal dan tumbuh meningkat.

5. Industri Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan kebun terendam, sehingga tidak dapat diproduksi secara normal.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu Kritis Dalam pengembangan Perkebunan Karet sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk pengangkutan Bokar;
- Penyediaan pintu air untuk pengendalian banjir;
- Pembentukan kemitraan dengan kebun dengan pabrik karet dalam penyediaan jaminan pasokan bahan baku industri karet;

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas, fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Dukungan Pemerintah dalam pembangunan fasilitas pengendalian banjir;
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok

4.2.3.3. Analisa Kelayakan Usaha Perkebunan Kopi

4.2.3.3.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin Lingkungan.

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa kopi memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada sektor perkebunan di Kabupaten Muara Enim yang akan tertuang dalam RPJP Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 dan juga menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang akan tertera dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2020-2040 dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2040, kopi dengan semua industri turunannya menjadi komoditi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten yang salah satunya di Kabupaten Muara Enim.
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perkebunan yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan untuk komoditi perkebunan utama. Salah satu komoditi utama tersebut adalah kopi. Lokasi yang disiapkan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim untuk komoditi kopi berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu,

Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat.

- Komoditi kopi adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Komoditi kopi adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
- Usaha kopi juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor perkebunan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *tax allowance*, fasilitas impor, *super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa promosi dan pemasaran.

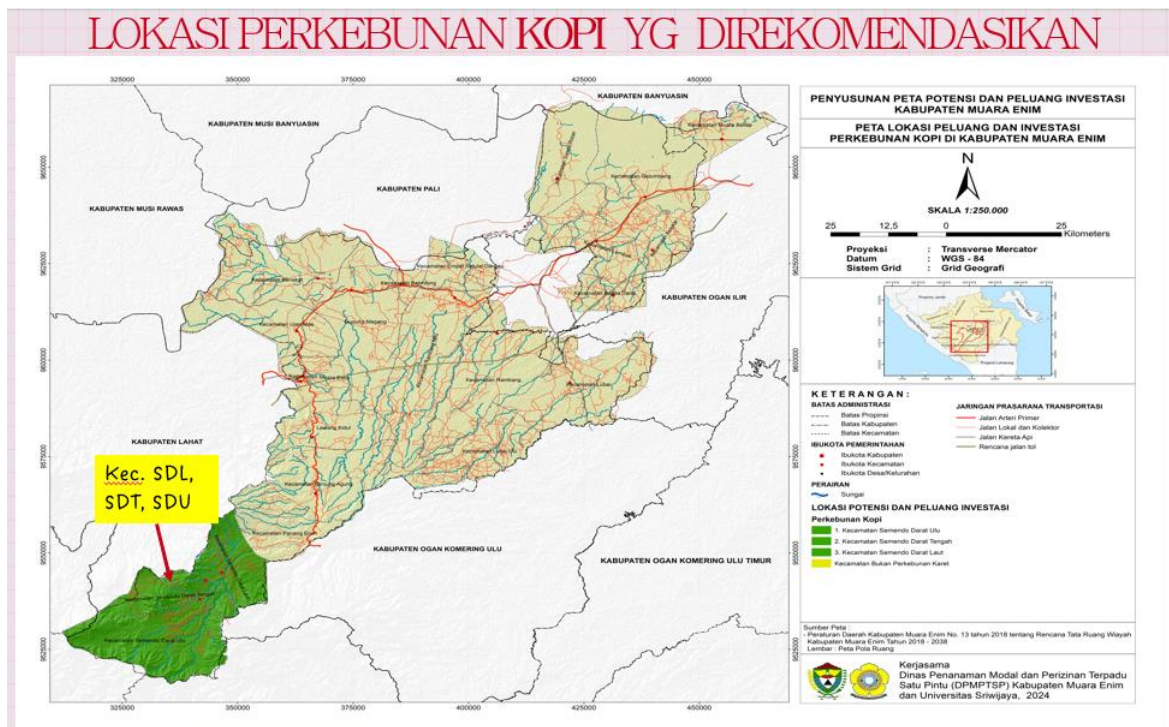
4.2.3.3.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan kopi khususnya pada bagian wilayah dataran tinggi. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi perkebunan kopi yang mayoritas berada di bagian wilayah dataran tinggi di Muara Enim memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik.

- Infrastruktur dan utilitas pendukung tersedia, kondisi lingkungan sekitar tergolong aman dan kondusif, serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai, karena mayoritas sudah terbiasa berusaha kopi.
- Terdapat pabrik pengolahan kopi menjadi kopi bubuk dan produk turunan lainnya di sekitar perkebunan kopi, maupun di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Muara Enim terutama di ibukota kabupaten, namun memiliki akses yang dapat dijangkau dari perkebunan kopi
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan kopi. Perkebunan kopi yang diusahakan petani di Kabupaten Muara Enim secara geografis terletak pada wilayah-wilayah yang memang memiliki faktor-faktor geografis yang sesuai dengan syarat tumbuh ideal pada tanaman kopi. Wilayah sentra kopi di Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Semende Darat Laut (44,10%), Tanjung Agung (31,01%), Semende Darat Ulu (11,19%), dan Semende Darat Tengah (10,98%). Wilayah-wilayah sentra tersebut memiliki kondisi geografis, iklim dan jenis tanah yang mayoritas memenuhi syarat tumbuh ideal bagi tanaman kopi khususnya kopi robusta yang memang masih mendominasi jenis kopi yang diusahakan petani di wilayah ini, meskipun kopi arabika juga sudah mulai dikembangkan.
- Secara teknis, kopi robusta tumbuh optimal pada ketinggian 400 - 700 m di atas permukaan laut, tetapi beberapa jenis diantaranya masih dapat tumbuh baik dan mempunyai nilai ekonomis pada ketinggian di bawah 400 m dpl. Sedangkan kopi arabika menghendaki tempat tumbuh yang lebih tinggi dari lokasinya daripada kopi robusta, yaitu antara 500 - 1.700 m dpl. Pada unsur curah hujan teridentifikasi bahwa curah hujan yang optimum untuk kopi (arabika dan robusta) adalah pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata 2.000 - 3.000 mm per tahun. Kondisi topografi dan klimatologi yang menjadi persyaratan tumbuh tanaman kopi ini, terpenuhi pada wilayah-wilayah perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim.

Kelayakan secara teknis ini terpenuhi, terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.25 berikut ini (Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah).



Gambar 4.25.
Lokasi Perkebunan Kopi yang Direkomendasikan untuk Investasi
di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.3.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Perkebunan Kopi di Kabupaten Muara Enim

Kawasan perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim yang dialokasikan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat, dengan prioritas yang direkomendasikan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Semende Darat Laut, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan pabrik-pabrik pengolahan kopi yang

mengolah hilirisasi produksi kopi dalam bentuk kopi bubuk dan produk turunan lainnya, sehingga secara tidak langsung akan berimbas pada pertambahan nilai yang akan dinikmati oleh masyarakat dan Kabupaten Muara Enim. Saat ini terdapat tiga komoditas unggulan dengan kualitas standar ekspor yang menjadi penyangga perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Komoditas tersebut adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Ketiga komoditi ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui perdagangan domestik dan luar negeri. Kopi menjadi produk perkebunan besar di wilayah Muara Enim dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Di dalam usaha perkebunan kopi, setiap perkebunan akan melakukan upaya untuk melakukan peningkatan produktivitas dari setiap pohon, mulai dari pemilihan bibit unggul sampai dengan perawatan secara maksimal yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan produksi kopi secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menekan biaya operasional sehingga mendapatkan kualitas kopi yang maksimal dengan harga yang kompetitif. Upaya untuk memperbesar manfaat kopi, dengan mengolah biji kopi menjadi produk hilir menjadi kunci utama peningkatan nilai tambah dalam industri ini. Dengan menghasilkan produk kopi berkualitas tinggi untuk diolah di pabrik penggilingan kopi yang terintegrasi dengan perkebunan, selain akan meningkatkan nilai tambah produk tersebut, akan menciptakan jalur distribusi yang efisien juga. Berdasarkan analisis data produksi perkebunan kopi, jumlah pabrik pengolahan kopi sudah cukup banyak, tetapi masih belum sebanding dengan produksi biji kopi yang dihasilkan. Hal ini menjadi peluang investasi yang menjanjikan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah dari industri ini. Adanya hilirisasi dan integrasi industri kopi yang berada di wilayah Muara Enim, pangsa pasar untuk mengembangkan aktivitas penunjang industri turunan dari kopi di Muara Enim dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana seperti area pergudangan, perkantoran dan sarana pelayanan umum.

2. Supply dan Market Driven Perkebunan Kopi

Hasil analisis *supply dan market driven* kopi, memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri agro berupa hilirisasi kopi. Hilirisasi ini ditopang juga oleh daerah penyangga hilirisasi kopi yang lokasinya berdekatan dengan Kabupaten Muara

Enim, seperti Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya permintaan akan produksi kopi ini tergolong besar dan akan berkelanjutan. Potensi pasar ini juga akan semakin besar jika dibangun kawasan industri di Kabupaten Muara Enim, hal ini karena kopi di Kabupaten Muara Enim sangat potensial dikembangkan industri hilirisasinya.

3. Kondisi Pemasaran Kopi di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran kopi yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk segar, produk olahan sekunder dan produk olahan akhir. Pada umumnya kopi diperdagangkan dalam bentuk kopi beras dengan kadar air 13%, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Pemasaran kopi dalam bentuk segar kemungkinan besar akan memberikan nilai tambah yang kecil bila dibandingkan dengan menjual produk olahan sekunder atau olahan akhir. Hasil penelitian terhadap berbagai produk pertanian dan perkebunan menunjukkan bahwa petani hanya mendapatkan margin keuntungan yang sedikit bila dibandingkan dengan pedagang atau pengusaha menengah/ pengusaha besar skala industri yang menjual kopinya dalam bentuk produk olahan akhir dan atau diversifikasi produk dan di luar pasar retensi. Mata rantai pemasaran kopi yang dihasilkan oleh petani yang dikenal sebagai kopi asalan pada umumnya belum memenuhi standar mutu kopi ekspor, kadar airnya masih tinggi yaitu berkisar antara 16-20%. Kopi asalan ini tidak langsung dijual kepada eksportir, tetapi di jual melalui pedagang perantara sebelum dijual ke eksportir. Mata rantai perdagangan kopi asalan ini pada umumnya cukup panjang, mulai dari pedagang keliling, pedagang lokal, pedagang besar dan eksportir. Rantai pemasaran kopi dari petani atau perkebunan dapat juga melalui berbagai jalur ke asosiasi petani kopi atau langsung ke pedagang pengumpul. Selanjutnya pedagang pengumpul akan memasarkan kopi beras ke pedagang besar atau langsung ke eksportir dan perusahaan kopi bubuk. Syarat yang harus dipenuhi adalah kopi harus bermutu baik dan sudah disortasi sehingga memenuhi syarat mutu yang ditentukan.

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen. Beberapa potensi produk yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pemasaran kopi antara lain :

mengembangkan berbagai produk kopi dalam ragam kemasan, mengembangkan produk baru dengan campuran antara kopi dengan produk lain, misalnya susu, cokelat, kue, kembang gula, dodol dsb, mengembangkan segmen pasar yang baru baik untuk produk yang sudah beredar maupun untuk produk baru yang akan dikembangkan serta aliansi strategis dalam mengembangkan produk olahan kopi dengan berbagai perusahaan yang produknya dapat digabung dengan produk kopi, baik di dalam maupun di luar negeri (misal dengan industri minuman, industri makanan, industri essence, dan sebagainya). Bentuk kopi yang dipasarkan di Kabupaten Muara Enim mayoritas terbagi menjadi dua jenis bentuk pemasaran yaitu kopi yang masih berbentuk biji dan kopi yang sudah diolah (kopi bubuk). Hal ini menyebabkan, pelaku pemasaran kopi di Muara Enim tergolong menjadi dua kelompok mengikuti bentuk kopi yang dijual. Kelompok pertama adalah pelaku usaha pemasaran yang menjual kopi dalam bentuk olahan (kopi bubuk) dan kelompok kedua adalah pemasar yang menjual kopi dalam bentuk biji. Area pemasaran produk kopi di Kabupaten Muara Enim terdiri atas pemasaran dalam negeri (lokal dan regional), serta pemasaran internasional (ekspor). Pemasaran pasar dalam negeri maupun pemasaran ekspor tersebut umumnya dilakukan oleh produsen (petani) dan pelaku industri kopi. Bentuk pasar dalam negeri memiliki struktur yang sama dengan pasar komoditi pertanian lainnya, dimana terdapat saluran pemasaran yang relatif sama, dan posisi petani cenderung bertindak hanya sebagai price taker, sedangkan pedagang berada pada posisi price maker. Pada bentuk pemasaran kopi untuk pasar internasional diatur oleh International Coffee Organization (ICO) yang turut menentukan standar harga kopi dunia, maka dalam pemasarannya Indonesia terkendala dengan aturan ICO tersebut. Produk kopi dipasarkan melalui saluran pemasaran yang dimulai dari petani selaku produsen, mayoritas menjual kepada pedagang pengumpul, yang selanjutnya berpindah tangan ke pedagang besar dan eksportir, hingga sampai ke tangan konsumen.

4.2.3.3.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada perkebunan kopi didasarkan atas biaya yang timbul dari

pembelian dan pembukaan lahan, penanaman, dan pembelian peralatan. Untuk lahan yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi perkebunan kopi per hektar di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 101.975.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31.
CAPEX Investasi Perkebunan Kopi

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
A.	Investasi:				101.975.000
1.	Perizinan	Paket	1	2.000.000	2.000.000
2.	Tanah	ha	1	30.000.000	30.000.000
3.	Bibit	batang	2.500	15.000	37.500.000
4.	Polybeg	kantong	2.500	1.500	3.750.000
5.	Mulsa	Roll	4	400.000	1.600.000
6.	Ajir	batang	2.500	2.000	5.000.000
7.	Tenaga kerja pembukaan lahan, penanaman dan panen	HOK	30	150.000	4.500.000
9.	Peralatan Produksi				22.125.000
	-Cangkul	unit	5	50.000	250.000
	-Parang	unit	5	35.000	175.000
	-Handsprayer	unit	2	200.000	400.000
	-Gunting Pemangkas	unit	4	150.000	600.000
	-Ember & Jerigen	unit	5	50.000	250.000
	-Pompa Air + Selang	set	1	3.500.000	3.500.000
	-Timbangan	unit	2	500.000	1.000.000
	-Gudang Penyimpanan	unit	1	12.000.000	12.000.000
	-Tugal Tanam	unit	5	50.000	250.000
	-Alat Tabur pupuk	unit	2	300.000	600.000
	-Pallet Kayu	Unit	10	100.000	1.000.000
	-Alat Kelembaban Suhu	Unit	1	300.000	300.000
	-Karung panen	Unit	50	20.000	1.000.000
	-Gerobak Sorong	Unit	1	800.000	800.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount

rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial perkebunan kopi.

Tabel 4.32.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Perkebunan Kopi

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	Hari	360	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	a. Produksi per tahun	kg	900	
	b. Harga kopi	kg	7000	
4	Upah tenaga kerja			
	Tenaga Kerja Penyiapan Lahan	HOK	10	
	Tenaga Kerja Penanaman	HOK	10	
	Tenaga Kerja Pemeliharaan (3 Orang)	HOK	5	
	Tenaga Kerja Panen	HOK	10	
5	Penggunaan sarana produksi			
	Bibit Kopi Robusta	bibit	2.500	
	Polybag	lembar	2.500	
	Pupuk Kandang/Kompos	ton	3	
	Pupuk Anorganik	sak	10	
	Pupuk dolomit	ton	1	
	Pestisida	liter	10	
	Fungisida	kg	3	
	Mulsa	roll	4	
	Ajir	batang	2.500	
	Kebutuhan benih dalam dengan jarak tanam 2 x 2	1 Ha	2.500	
6	Discount Factor/suku bunga	%	3.25	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33.
Operational Expenditure (OPEX) Perkebunan Kopi

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
Total Biaya	16.024.896	16.024.896	16.024.896	16.024.896	16.024.896
	6	7	8	9	10
	16.024.896	16.024.896	16.024.896	16.024.896	16.024.896

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (feasible) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.34.
Kelayakan Usaha Perkebunan Kopi untuk Usaha 1 Hektar

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	173.722.325
B/C Ratio	3,45
Payback period (tahun)	3,15
Internal Rate of Return (IRR) %	22,62
Profit Index	3,47

4.2.3.3.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perkebunan dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, perkebunan kopi dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan perkebunan dan industri hilir yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan perkebunan kopi dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari perkebunan kopi di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada perkebunan kopi ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Pada tahap pengembangan, perkebunan kopi membutuhkan tenaga kerja meliputi: tenaga kerja kasar, tenaga kerja menengah, dan tenaga kerja ahli. Rekrutmen tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.3.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada produksi kopi, yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha pertanian dan industry yang menyertainya, termasuk Perkebunan Kopi. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan perkebunan, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, komoditi kopi, akan masuk sebagai komoditi unggulan dalam dokumen RPJP Kabupaten Muara Enim 2025-2035. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan perkebunan kopi. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor

hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, pada analisis ini penentuan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan perkebunan kopi, telah dilakukan dengan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan hitungan yang ditampilkan dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi.

Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah. Faktor internal perusahaan juga berpengaruh dalam mengatur keuangan perusahaan, seperti memperhatikan cashflow Perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan:

- Suku bunga

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diimplementasikan pada Bank Umum akan berpengaruh terhadap perhitungan bisnis karena pelaksanaan proyek perkebunan kopi sampai dengan industri hilirnya sebagian akan didanai dengan pinjaman dari bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pada saat menetapkan tingkat suku bunga dalam asumsi-asumsi perhitungan OPEX, nilai suku bunga yang disepakati harus di atas tingkat suku bunga pasar.

- Nilai tukar rupiah

Sebagian material-material untuk pembangunan perkebunan berasal dari luar negeri sehingga transaksinya masih menggunakan mata uang dolar. Apabila nilai tukar mata uang rupiah merosot tajam, akan sangat berpengaruh terhadap OPEX yang telah dihitung sebelum bisnis dijalankan. Hal lain yang mempengaruhi perhitungan bisnis adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan inflasi yang terjadi sesuai dengan prakiraan yang sudah ditetapkan

yaitu tidak lebih dari 4% dan pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak positif, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali normal dan tumbuh meningkat.

5. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan kebun terendam, sehingga tidak dapat diproduksi secara normal. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan perkebunan kopi adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk pengangkutan biji kopi;
- Pembentukan kemitraan kebun dengan pabrik penggilingan kopi dalam penyediaan jaminan pasokan bahan baku industri kopi.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.4. Analisa Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi

4.2.3.4.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha penggemukan sapi di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis,

seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha penggemukan sapi di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ternak ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa ternak sapi memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada Sektor Peternakan di Kabupatean Muara Enim yang telah tertuang dalam RPJP Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 dan juga menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang tertera dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Muara Enim, ternak sapi dengan semua industri turunannya menjadi komoditi unggulan peternakan di tingkat provinsi maupun kabupaten
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan untuk Peternakan Sapi yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim , yang dilengkapi dengan pengembalaan umum terdapat di: Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Kelekar, bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Ternak sapi adalah komoditi ternak yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Ha ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang

dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

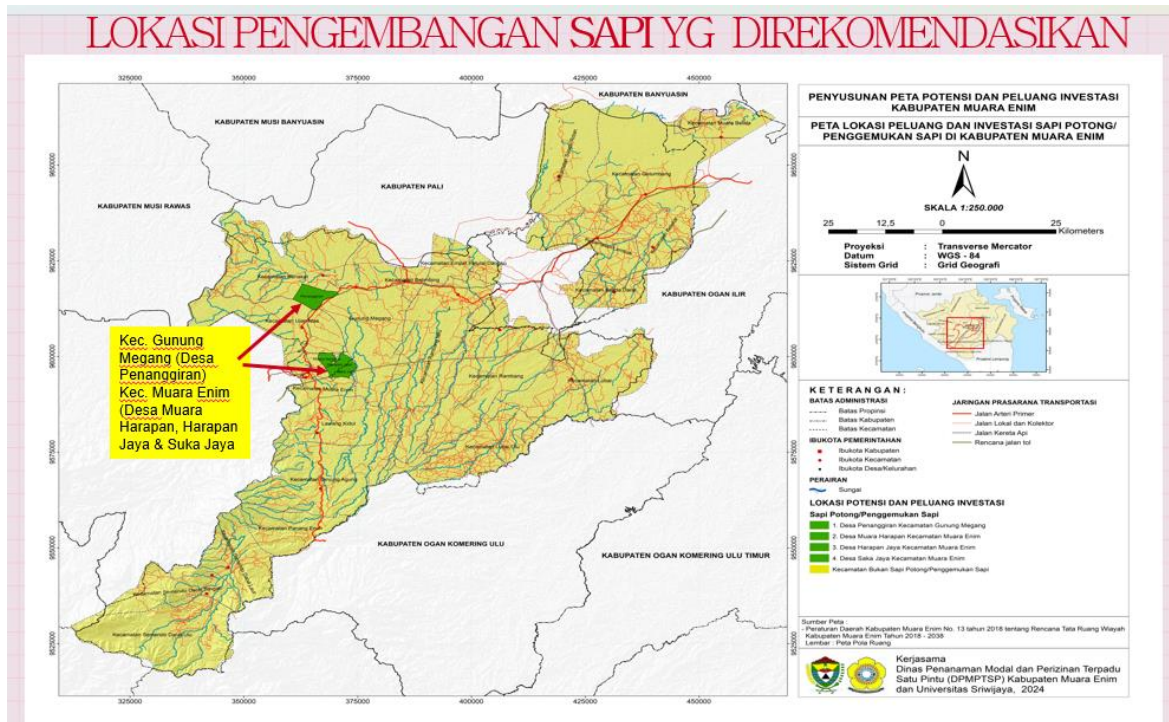
- Usaha sapi juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor peternakan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa Promosi dan Pemasaran.

4.2.3.4.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan ternak sapi khususnya pada bagian wilayah yang telah disiapkan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari:

- Lokasi peternakan sapi yang direkomendasikan memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik, sehingga memudahkan dalam pengangkutan.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar yang cenderung aman, ketersediaan tenaga kerja yang memadai karena sudah terbiasa beternak
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan ternak sapi.
- Lokasi peternakan memiliki padang gembalaan dan ketersediaan ladang rumput hijauan untuk pakan ternak yang memadai. Pakan, terdiri dari hijauan (rumput lapang, jerami padi, tebon jagung, dan rumput gajah) dan pakan penguat (konsentrat/bekatul dan ampas tahu) mayoritas tersedia.

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi penggemukan sapi di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.26 (Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Muara Enim).



Gambar 4.26.

Lokasi Pengusahaan Penggemukan Sapi yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.4.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha peternakan sapi di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Peternakan Sapi di Kabupaten Muara Enim

Kawasan peternakan sapi di Kabupaten Muara Enim yang dialokasikan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Kelekar, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Ternak.

2. Supply dan Market Driven Peternakan Sapi

Hasil analisis *supply dan market driven* ternak sapi, memperlihatkan bahwa pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri hilirisasi ternak. Hilirisasi ini ditopang juga oleh daerah penampung produksi hilirisasi ternak yang lokasinya berdekatan dengan Kabupaten Muara Enim, seperti Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya permintaan akan produksi ternak ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Ternak Sapi di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi sapi yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk daging segar dan ternak hidup, namun terdapat juga produk olahan sekunder dan produk olahan akhir dalam bentuk berbagai pangan daging olahan.

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen. Beberapa potensi produk yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pemasaran daging sapi antara lain: pengadaan sapi untuk hari raya kurban dan perayaan-perayaan lainnya yang menjadikan sapi sebagai simbol utama sajian yang diberikan.

4.2.3.4.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada peternakan penggemukan sapi didasarkan atas biaya yang timbul dari pembelian dan pembukaan lahan ternak, Pembangunan kandang dan fasilitas penunjangnya, dan pembelian peralatan. Untuk lahan yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi peternakan sapi dengan kapasitas kandang 100 ekor sapi di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.35.

Tabel 4.35.
CAPEX Investasi Peternakan (Penggemukan) Sapi

No.	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
A.	Biaya Investasi				
1	Lahan dan bangunan kandang	1	paket	300.000.000	300.000.000
2	Sumber air dan sarananya	1	paket	30.000.000	30.000.000
3	Gudang dan mesin pakan	1	paket	200.000.000	200.000.000
4	IPAL dan Biogas	1	paket	50.000.000	50.000.000
5	Sapi bakalan (Pedet 3-5 bulan)	100	Ekor	7.000.000	700.000.000
				Jumlah	1.280.000.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial penggemukan sapi.

Tabel 4.36.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Keuangan Peternakan Sapi

No	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	Tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	Hari	360	
	- tenaga kerja tetap	Bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	a. Produksi per tahun	Ekor	100	
	b. Harga Jual Sapi	Ekor	15.500.000	
4	1. Gaji Karyawan (4 orang)	OB	8.000.000	
	2. Listrik (1300 VA, Rp. 500,000/bln)	Bulan	500.000	
	3. Sapi Bakalan Bobot 200 kg	Ekor	9.000.000	
	(Harga per ekor = 200 kg x Rp.45,000)			

	4. Pakan Konsentrat	Kg	2.700	
5	(300 ekor x 120 hari x 8 kg)			
	5. Vitamin dan obat-obatan	Paket	50.000	
6	Discount Factor/suku bunga	%	3.25	

4. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.37.

Tabel 4.37.
Operational Expenditure (OPEX) Peternakan Sapi

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
Total Biaya					
Ekskalasi biaya (inflasi)	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	6	7	8	9	10
	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000

5. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.38.
Kelayakan Usaha Peternakan Sapi untuk Usaha 100 Ekor Sapi

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	12.750.993.954
B/C Ratio	2,48
Payback period (tahun)	4,53
Internal Rate of Return (IRR) %	23,40
Profit Index	3,47

4.2.3.4.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada peternakan sapi di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor peternakan dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, peternakan sapi dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan peternakan dan industri hilir yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan peternakan sapi dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari peternakan sapi di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada peternakan sapi ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Pada tahap pengembangan, peternakan sapi membutuhkan tenaga kerja meliputi: tenaga kerja kasar, tenaga kerja menengah, dan tenaga kerja ahli. Rekrutmen tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.4.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan sapi yang dapat terancam serang penyakit, yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha peternakan dan industri yang menyertainya, termasuk Peternakan Sapi. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan peternakan, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, ternak sapi masuk sebagai komoditi unggulan peternakan yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan peternakan sapi. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, pada analisis ini penentuan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan peternakan sapi, telah dilakukan dengan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan hitungan yang ditampilkan dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi.

Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial

yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah. Faktor internal perusahaan juga berpengaruh dalam mengatur keuangan perusahaan, seperti memperhatikan cashflow Perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan:

- Suku bunga

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diimplementasikan pada Bank Umum akan berpengaruh terhadap perhitungan bisnis karena pelaksanaan proyek perkebunan kopi sampai dengan industri hilirnya sebagian akan didanai dengan pinjaman dari bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pada saat menetapkan tingkat suku bunga dalam asumsi-asumsi perhitungan OPEX, nilai suku bunga yang disepakati harus di atas tingkat suku bunga pasar.

- Nilai tukar rupiah

Sebagian material-material untuk pembangunan peternakan berasal dari luar negeri sehingga transaksinya masih menggunakan mata uang dolar. Apabila nilai tukar mata uang rupiah merosot tajam, akan sangat berpengaruh terhadap OPEX yang telah dihitung sebelum bisnis dijalankan. Hal lain yang mempengaruhi perhitungan bisnis adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan inflasi yang terjadi sesuai dengan prakiraan yang sudah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 4% dan pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak positif, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali normal dan tumbuh meningkat.

5. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan lahan peternakan terendam, yang dapat mengganggu sapi. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan peternakan sapi adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk pengangkutan sapi;
- Pembentukan kemitraan peternak dengan RPH dan industri hilirnya.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan,
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan,
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok,

4.2.3.5 Analisa Kelayakan Usaha Perkebunan Kentang

4.2.3.5.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin Lingkungan.

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa kentang memang merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi unggulan pada sektor perkebunan di Kabupaten Muara Enim yang akan dikembangkan untuk hilirisasinya. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Muara Enim Tahun 2020-2040, industri pangan olahan berbahan baku kentang menjadi komoditi yang berpotensi unggulan di sektor industri pangan.

- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Hortikultura yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim, seluas lebih kurang 66.523 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan
- Komoditi kentang adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di sektor hortikultura. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Komoditi kentang adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim karena bagian dari sektor pertanian. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. Aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
- Usaha kentang juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor pertanian. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *tax allowance*, fasilitas impor, *super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa promosi dan pemasaran.

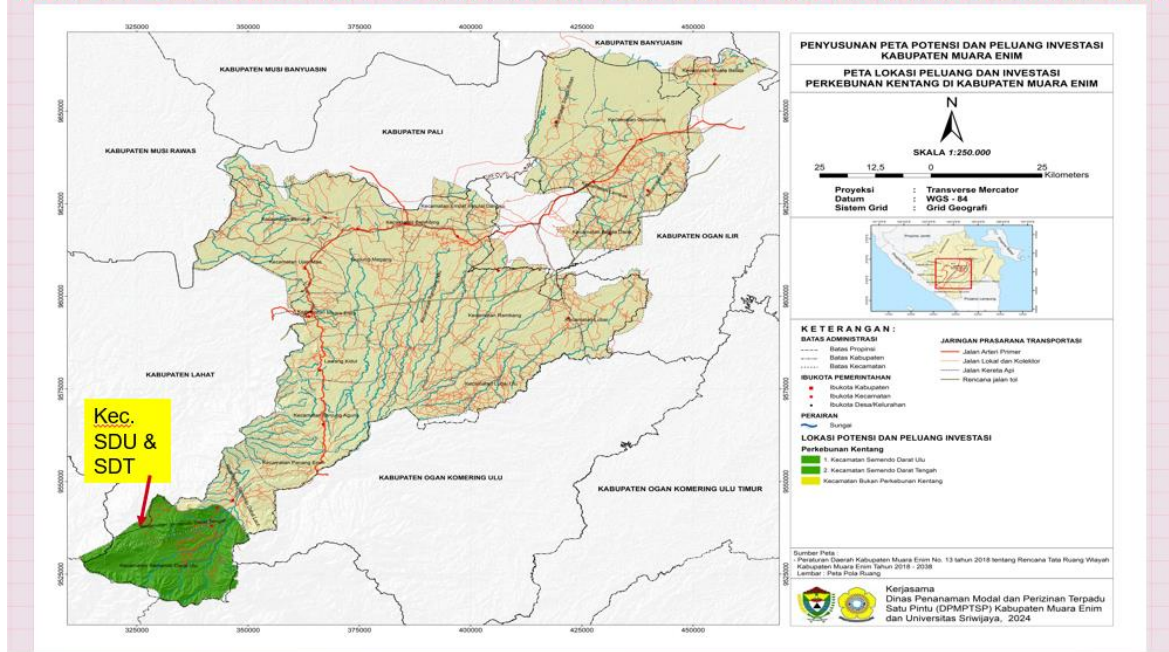
4.2.3.5.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan kentang khususnya pada bagian wilayah dataran tinggi. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi perkebunan kentang yang mayoritas berada di bagian wilayah dataran tinggi di Muara Enim memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung tersedia, kondisi lingkungan sekitar tergolong aman dan kondusif, serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai, karena mayoritas sudah terbiasa berusahatani hortikultura.
- Terdapat industri pengolahan kentang menjadi keripik dan pangan olahan lain dan produk turunan lainnya yang dapat menjadi industri penampung hasil produksi
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan kentang. Perkebunan kentang yang diusahakan petani di Kabupaten Muara Enim secara geografis terletak pada wilayah-wilayah yang memang memiliki faktor-faktor geografis yang sesuai dengan syarat tumbuh ideal pada tanaman kentang. Wilayah sentra kentang di Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Semende Darat Laut (20%), Tanjung Agung (20%), Semende Darat Ulu (30%), dan Semende Darat Tengah (30%). Wilayah-wilayah sentra tersebut memiliki kondisi geografis, iklim dan jenis tanah yang mayoritas memenuhi syarat tumbuh ideal bagi tanaman kentang.
- Secara teknis, kentang tumbuh optimal pada ketinggian 800 – 1.500 m di atas permukaan laut, tetapi beberapa jenis diantaranya masih dapat tumbuh baik dan mempunyai nilai ekonomis pada ketinggian di bawah 800 m dpl. Pada unsur curah hujan teridentifikasi bahwa curah hujan yang optimum untuk kentang adalah pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan rata rata 1.000 - 1.600 mm per tahun. Kondisi topografi dan klimatologi yang menjadi persyaratan tumbuh tanaman kentang ini, terpenuhi pada wilayah-wilayah perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim.

Kelayakan secara teknis ini terpenuhi, terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.27 berikut ini (Kecamatan Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah).

LOKASI PERKEBUNAN & INDUSTRI KENTANG YG DIREKOMENDASIKAN



Gambar 4.27.

Lokasi Perkebunan dan Industri Kentang yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.5.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Perkebunan Kentang di Kabupaten Muara Enim

Kawasan perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung industri kentang.

2. Supply dan Market Driven Perkebunan Kentang

Hasil analisis *supply dan market driven* Perkebunan kentang, memperlihatkan bahwa pengembangan Perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri hilirisasinya. Bahkan ada yang sudah bekerjasama dengan industri besar, sehingga permintaan produksinya cukup stabil, disamping produksi mentahnya. Artinya permintaan akan produksi kentang ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Kentang di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi kentang yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk produksi segar, namun sudah dijual juga dalam bentuk produk olahan sekunder dan produk olahan akhir dalam bentuk berbagai pangan olahan.

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen. Beberapa potensi produk yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pemasaran kentang antara lain: pengadaan kentang untuk masakan rumah tangga dan restoran, serta permintaan industri yang terhubung langsung dengan petani.

4.2.3.5.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada perkebunan kentang didasarkan atas biaya yang timbul dari pembelian dan pembukaan lahan pertanian. Pembukaan lahan dan fasilitas penunjangnya, dan pembelian peralatan. Untuk lahan yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi kentang dengan luasan 1 hektar di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 140.320.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.38 berikut ini.

Tabel 4.39.
CAPEX Investasi Perkebunan Kentang

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)	Umur Ekonomis	Penyusutan
A.	Investasi :				41.650.000		2.848.333
1.	Lahan	ha	1	30.000.000	30.000.000	30	1.000.000
2.	Pengolahan lahan	ha	1	2.500.000	2.500.000	30	83.333
3.	Mesin/Peralatan Produksi:				9.150.000		1.765.000
	- Cangkul	Unit	10	50.000	500.000	25	20.000
	- Garu/Tajak	Unit	5	100.000	500.000	5	100.000
	- Hand sprayer	Unit	2	300.000	600.000	5	120.000
	- Parang/Sabit	Unit	5	50.000	250.000	10	25.000
	- Pompa Air + Selang	Unit	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000

	- Keranjang panen	Unit	10	50.000	500.000	10	50.000
	- timbangan	Unit	1	300.000	300.000	4	75.000
	- Gudang penyimpanan alat	Unit	1	5.000.000	5.000.000	20	250.000
B.	Modal kerja untuk satu proses prod. (4 bulan) :				98.670.000		
1.	Sarana produksi				98.670.000	-	-
	- Bibit kentang	kg	3.000	20.000	60.000.000		
	- Pupuk kandang	kg	3.000	5.000	15.000.000		
	- Pupuk Urea	Kg	300	14.000	4.200.000		
	- Pupuk TSP	Kg	200	12.000	2.400.000	-	-
	- Pupuk KCl	Bulan	140	20.000	2.800.000		
	- Pestisida dan Fungisida	paket	1,0	3.000.000	3.000.000		
	- Mulsa	paket	21,0	120.000	2.520.000		
	- Tenaga kerja	Orang	70	125.000	8.750.000		
	Total A dan B				140.320.000	-	-

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial kentang.

Tabel 4.40.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Usahatani Kentang

No	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	hari	300	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	- Kentang	kg/ha/thn	20000	
	- Harga kentang segar	Rp/Kg	7.500	
4	Upah tenaga kerja			
	- Tenaga kerja	HOK	125.000	

6	Harga input produksi			
	- Bibit kentang	Rpkg	20.000	
	- Pupuk kandang	Rp/kg	5.000	
	- Pupuk urea	Rp/Kg	14.000	
	- Pupuk TSP	Rp/Kg	12.000	
	- Pupuk KCl	Rp/Kg	20.000	
	- Pestisida	Rp/paket	3.000.000	
	- Mulsa	Rp/roll	120.000	
7	Discount Factor/suku bunga	%	3,25	

5. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.41.

Tabel 4.41.
Operational Expenditure (OPEX) Peternakan Sapi

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
TOTAL BIAYA Ekskalasi biaya (inflasi)	98.670.000	98.670.000	98.670.000	98.670.000	98.670.000
	6	7	8	9	10
	98.670.000	98.670.000	98.670.000	98.670.000	98.670.000

6. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.42.
Kelayakan Usaha Perkebunan Kentang per Hektar

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	243.262.338
B/C Ratio	1,48
Payback period (tahun)	3,22

Internal Rate of Return (IRR) %	30,88
Profit Index	11,16

4.2.3.5.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada Perkebunan kentang di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian hortikultura dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, perkebunan kentang dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan pertanian dan industri hilir yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan Perkebunan kentang dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari Perkebunan kentang di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada Perkebunan ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Pada tahap pengembangan, perkebunan dan industri hilirnya nanti membutuhkan tenaga kerja meliputi : tenaga kerja kasar, tenaga kerja menengah, dan tenaga kerja ahli. Rekrutmen tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.5.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan usahatani kentang dapat ternacam serang penyakit, yang menyebabkan produksi menurun sehingga

pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha peternakan dan industri yang menyertainya, termasuk perkebunan kentang. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan peternakan, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, perkebunan kentang masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor hortikultura yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, pada analisis ini penentuan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan peternakan sapi, telah dilakukan dengan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan hitungan yang ditampilkan dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi.

Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah.

5. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan lahan terendam, yang dapat mengganggu tanaman. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan Perkebunan kentang adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan industri hilirnya

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok

4.2.3.6. Analisa Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya

4.2.3.6.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4)

Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, dan SIUP.

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa perikanan budidaya memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada Sektor Perikanan di Kabupaten Muara Enim dengan berbagai jenis ikan tawar, dengan semua industri turunannya berupa pangan olahan ikan.
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perikanan Budidaya yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim adalah perikanan budidaya yang dikembangkan di kolam, sawah, sungai, rawa/lebak, dan danau yang berada di seluruh wilayah kecamatan.
- Perikanan budidaya adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

4.2.3.6.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan perikanan budidaya. Kelayakan secara teknis ini dilihat dari :

- Lokasi perikanan budidaya yang dapat diusahakan di berbagai perairan seperti danau, sawah, sungai, tambak dan perairan rawa memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik,
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai
- Terdapat industri hilir perikanan yang diusahakan pabrik maupun *home industry*.

- Kondisi perairan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), mendukung untuk pengembangan perikanan budidaya.

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.28 berikut ini (Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Semendo Darat Tengah).



Gambar 4.28.

Lokasi Perikanan Budidaya yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.6.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Muara Enim

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan di semua wilayah yang memiliki wilayah perairan, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan industri hilirnya.

2. Supply dan Market Driven Perikanan Budidaya

Hasil analisis *supply dan market driven* perikanan budidaya, memperlihatkan bahwa permintaan global terhadap ikan dan produk perikanan lainnya dalam sepuluh tahun terakhir meningkat, terutama setelah munculnya wabah penyakit sapi gila, flu burung, serta penyakit kuku dan mulut. Usaha budidaya pembesaran ikan lele di Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari potensi dan perkembangan perikanan secara umum di kabupaten ini. Salah satu faktor penting yang menjadi pendorong adalah peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Muara Enim. Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh industri hilirisasinya. Artinya permintaan akan produksi perikanan budidaya ini tergolong besar dan akan berkelanjutan. Pertumbuhan produksi ikan konsumsi di Kabupaten Muara Enim semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan produksi ikan lima kecamatan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Muara Enim selama tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 18 persen. Peningkatan produksi yang dicapai juga meningkat, namun demikian jumlahnya belum mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk di kabupaten ini. Hal ini berarti potensi permintaan ikan di Kabupaten Muara Enim masih akan terus tinggi untuk konsumsi penduduknya.

3. Kondisi Pemasaran Perikanan Budidaya di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi perikanan budidaya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk produksi segar, namun sudah dijual juga dalam bentuk produk olahan sekunder dan produk olahan akhir dalam bentuk berbagai pangan olahan. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen. Dalam lingkup Kabupaten Muara Enim, perkembangan usaha budidaya ikan di Kabupaten Muara Enim ke depan semakin prospektif karena ditunjang dan distimulasi oleh empat faktor berikut: 1) pertumbuhan jumlah pasar ikan kelompok, 2) pertumbuhan jumlah pedagang pengentas ikan, 3) pertumbuhan jumlah usaha pemancingan, serta 4) pertumbuhan jumlah rumah makan khas ikan, dimana keempat variabel tersebut memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara bermakna. Keempatnya merupakan pasar yang potensial bagi pembudidaya di Kabupaten Muara Enim dalam

menyalurkan produksinya. Data lapangan lebih lanjut menunjukkan bahwa produksi ikan konsumsi di Kabupaten Muara Enim sampai saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan pasar masyarakat Kabupaten Muara Enim. Para pedagang ikan konsumsi dan unit usaha lain di Kabupaten Muara Enim yang memerlukan ikan konsumsi sebagai bahan bakunya masih mendatangkan pasokan ikan konsumsi (ikan air tawar) dari luar Kabupaten Muara Enim.

4.2.3.6.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada perikanan budidaya didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan kolam atau keramba jaring, dan perlengkapan lainnya. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi perikanan budidaya diasumsikan untuk budidaya ikan sistem bioflok dengan jenis ikan patin dan lele ini adalah sebesar Rp. 69.000.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.43.

Tabel 4.43.
CAPEX Investasi Perikanan Budidaya

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
	Investasi :				
1.	Pompa air portable	Unit	1	5.000.000	5.000.000
2.	Bak Pemijahan ukuran 2 x 2 x 1	Unit	2	5.000.000	10.000.000
3.	Blower (Hi Blow 40 titik)	Unit	2	7.000.000	14.000.000
4.	Bak Fiber (Kapasitas 3 ton)	Unit	2	3.000.000	6.000.000
5.	Kolam Pendederan (3x2x1 m)	Unit	4	3.000.000	12.000.000
6.	Akuarium Penetasan (60x40x30 cm)	Unit	40	150.000	6.000.000
	Lampu dan kelistrikan penetasan	Paket	1	5.000.000	5.000.000
	Selang dan batu aerasi	Paket	1	1.500.000	1.500.000
	Wadah Kultur Artemia	Unit	4	1.000.000	4.000.000
	Wadah Kultur Daphnia	Unit	2	1.000.000	2.000.000
	Wadah kultur Cacing Tubifex	Unit	2	1.000.000	2.000.000
	Pipa Blower aerasi	Paket	1	1.500.000	1.500.000
	Induk Ikan Patin/lele bersertifikat	Pasang	6	300.000	1.800.000
	Total				69.000.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial perikanan budidaya.

Tabel 4.44.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Perikanan Budidaya

No	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	5	Periode 5 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	hari	300	
	Dalam bulan	bulan	12	
3	Jumlah Ikan disebar	ekor	5.000	
4	Periode panen	Kali/tahun	4	
5	Harga produksi ikan	Rp/Kg	20.000	
6	Upah tenaga kerja	HOK	125.000	
7	Kedalaman air pada kolam	M	1	
8	Tingkat mortalitas	%	5	
	Harga ikan	Rp/Kg	20.000	
7	Discount Factor/suku bunga	%	3,25	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.45.

Tabel 4.45.
Operational Expenditure (OPEX) Perikanan Budidaya

Uraian	Tahun Ke				
	1	2	3	4	5
Total Biaya Ekskalasi biaya (inflasi)	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban

operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (feasible) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.46.
Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	840.000.000
B/C Ratio	2,46
Payback period (tahun)	0,7
Internal Rate of Return (IRR) %	30,88
Profit Index	8,14

4.2.3.6.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, perikanan budidaya dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan perikanan dan industri hilir yang terjadi, khususnya pada wilayah-wilayah yang banyak perairannya.

Salah satu dampak positif dari keberadaan perikanan budidaya dan industri hilir yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari perikanan budidaya di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada perikanan ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Pada tahap pengembangan, perikanan budidaya dan industri hilirnya nanti membutuhkan tenaga kerja meliputi: tenaga kerja kasar, tenaga kerja menengah,

dan tenaga kerja ahli. Rekrutmen tenaga kerja ini tentunya akan berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar. Tentu saja harapannya akan lebih banyak tenaga kerja lokal yang mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten.

4.2.3.6.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan perikanan budidaya dapat terancam serang penyakit, yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha perikanan dan industri yang menyertainya, termasuk perikanan budidaya. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan perikanan budidaya, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, perikanan budidaya masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor perikanan yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Pembiayaan dan Nilai Tukar Mata Uang

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, pada analisis ini penentuan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan perikanan budidaya, telah dilakukan dengan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan hitungan yang ditampilkan dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi.

Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah.

5. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko-risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan kolam terendam, yang dapat mengganggu tanaman. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

6. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan perikanan budidaya adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan industri hilirnya.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;

- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.7. Analisa Kelayakan Usaha Batik

4.2.3.7.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha batik di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan. Pada usaha industri batik di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa usaha ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa industri sandang memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada sektor industri di Kabupaten Muara Enim yang telah tertuang dalam Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Muara Enim, industri sandang dengan berbagai jenis produknya menjadi komoditi industri unggulan di Kabupaten Muara Enim.
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perindustrian termasuk di dalamnya industri sandang yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim, ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Be lida. Adapun untuk sentra industri kecil dan menengah, meliputi:
 - a. sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. sentra industri menengah ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan gunung Megang, Kecamatan

Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida

- Usaha sandang batik adalah usaha yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu industri unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu usaha terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Industri Kecil Menengah adalah usaha yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. Aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
- Usaha batik juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor industri. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa promosi dan pemasaran.

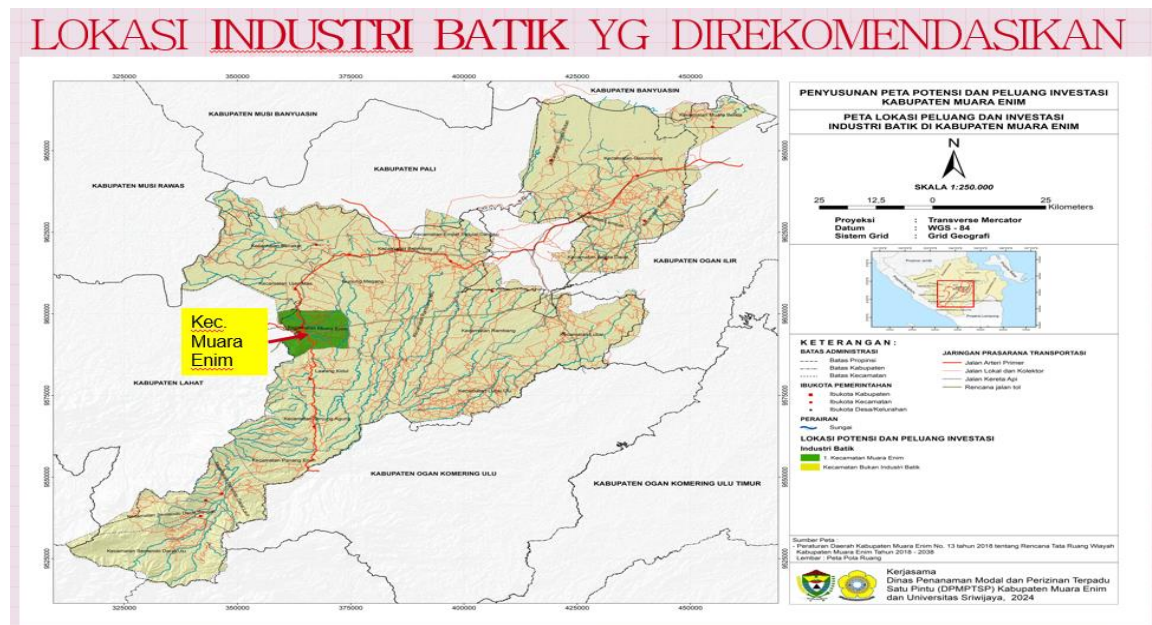
4.2.3.7.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan industri sandang khususnya pada bagian wilayah yang banyak penduduknya. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi IKM memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik,

- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi industri sandang di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.29 berikut ini (Kecamatan Muara Enim).



Gambar 4.29.
Lokasi Industri Batik yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.7.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha industri batik di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Industri Batik di Kabupaten Muara Enim

Industri batik di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan di semua wilayah yang memiliki pangsa pasar terutama di Kecamatan Muara Enim, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan industri hilirnya. Selain memiliki daya saing tinggi dari aspek lokasi usaha, batik khas Muara Enim juga diminati Masyarakat dari semua kalangan, bahkan sekarang menjadi salah satu seragam semua pegawai pemerintah daerah beserta jajaran pimpinan.

2. Supply dan Market Driven Industri Batik

Hasil analisis *supply dan market driven*, industri batik memperlihatkan bahwa pengembangan industri batik di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh kebutuhan aparat pemerintah untuk pakaian seragam khas daerah dan kebutuhan masyarakat lainnya terhadap sandang yang memiliki ciri khas daerah. Artinya permintaan akan produksi industri batik ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Industri Batik di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi batik yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk bahan pakaian dan pakaian jadi yang dijual untuk semua kalangan masyarakat. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen.

4.2.3.7.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada industri batik didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan dan rumah industri batik. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi industri batik di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 543.500.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.47 berikut ini.

Tabel 4.47.
CAPEX Investasi Industri Batik

No.	Komponen	Satuan	Unit	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
A.	Investasi :				543.500.000
1.	Perijinan	Paket	1	1.500.000	1.500.000
2.	Tanah dan bangunan	Paket	1	250.000.000	250.000.000
3.	Mesin/Peralatan Produksi				292.000.000
	-Rangka baja + Flooring	Paket	1	90.000.000	90.000.000
	-Mesin Jahit	Unit	2	4.000.000	8.000.000
	-Mesin Produksi	Unit	3	7.000.000	21.000.000
	-Mesin Potong	Unit	2	28.000.000	56.000.000

	-Mesin Dandang/Mesin Rebus	Unit	2	2.500.000	5.000.000
4.	-Mesin Fiksasi Kain	Unit	1	35.000.000	35.000.000
	-Mesin Steam Press	Unit	1	5.000.000	5.000.000
	-Mesin Screen Batik	Unit	1	50.000.000	50.000.000
	- Mesin Cup 20 tembaga	Unit	20	1.100.000	22.000.000
B.	Modal kerja untuk satu proses prod. (1 bulan) :				46.400.000
1	Bahan baku :				34.000.000
	-Kain	meter	500	35.000	17.500.000
	-Pewarna	kg	15	500.000	7.500.000
	-Water glass	Kg	100	45.000	4.500.000
	-Mallam/lilin	Kg	100	45.000	4.500.000
2.	Biaya overhead :				12.400.000
	-Listrik	Bulan	1,0	1.300.000	1.300.000
	-Gas	Bulan	1,0	600.000	600.000
	-Air	Bulan	1,0	600.000	600.000
	-Tenaga kerja	Orang	6	1.500.000	9.000.000
	-Packaging/paperbag	Paket	1	900.000	900.000
	Total A dan B				589.900.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial industri batik tersaji pada Tabel 4.48.

Tabel 4.48.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Batik

No.	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	Hari	360	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	- Kain batik (bulan)	meter	500	
	- Harga kain	meter	120.000	
4	Penggunaan tenaga kerja			
	- Tenaga kerja tetap	orang	6	

5	Upah tenaga kerja			
	- Tenaga kerja tetap	Rp/bln	1.500.000	
6	Harga bahan baku			
	- Kain batik (bulan)	Rp/meter	35.000	
	- Pewarna	Rp/kg	500.000	
	- Water glass	Rp/Kg	45.000	
	- Mallam/lilin	Rp/Kg	45.000	
	- Listrik	Rp/bulan	1.300.000	
	- Gas	Rp/bulan	600.000	
	- Air	Rp/bulan	600.000	
	- Packaging/paperbag	paket	900.000	
7	Discount Factor/suku bunga	%	3,5	

4. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.49.

Tabel 4.49.
Operational Expenditure (OPEX) Industri Batik

Jenis Biaya	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Operasional:	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333
a Bahan baku	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000
b Biaya overhead	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
c Penyusutan	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333
	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10
Biaya Operasional	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333
a Bahan baku	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000
b Biaya overhead	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
c Penyusutan	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333

5. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.50.
Kelayakan Usaha Industri Batik

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	1.311.070.182
B/C Ratio	1,45
Payback period (tahun)	2,92
Internal Rate of Return (IRR) %	37.50
Profit Index	4,25

4.2.3.7.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada usaha industri batik di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, industri batik dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industri yang terjadi. Selain itu dapat membuat Masyarakat lebih mencintai budayanya.

Salah satu dampak positif dari keberadaan industri batik yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari industri batik di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada industri ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

4.2.3.7.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan industri batik yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha industri batik. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan industri batik, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, industri batik masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor industri yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan tempat usaha terendam, yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

5. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan industri batik adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi
- Pembentukan kemitraan dengan pengusaha besar

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.8. Analisa Kelayakan Usaha Berbahan Baku FABA

4.2.3.8.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Aspek ini menjadi landasan pertama yang dibutuhkan sebagai dasar kelegalan untuk memanfaatkan FABA menjadi sebuah produk investasi di Kabupaten Muara Enim. Kajian ini mendasari peraturan perundangan yang berlaku seperti Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Hal ini kemudian diikuti oleh kesesuaian terhadap kebijakan pembangunan Nasional dengan landasan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap sektoral penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup mengeluarkan limbah FABA dari B3 dan menjadikannya sebagai limbah non B3 seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan turunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Peluang ini kemudian, disesuaikan dengan peraturan terkait sektoral investasi seperti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Keputusan Menteri Investasi /

Kepala BKPM RI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Terakhir, kesesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku seperti Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Daerah, Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038, dan Dukungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap pelaku usaha yang ingin berinvestasi sangat dimudahkan dan diberikan insentif. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

4.2.3.8.2. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan kesiapan wilayah/lokasi yang akan dikembangkan. Pada aspek ini, analisis yang dilakukan meliputi analisis lokasi, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja, potensi dan ketersediaan bahan baku, kelembagaan dan pengelolaan kawasan industri, kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), status lahan dan harga lahan.

1. Infrastruktur Utama dan Penunjang Infrastruktur Utama

Berikut analisis infrastruktur utama yang dimiliki Kabupaten Muara Enim dalam kelayakan usaha:

- a. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 mencapai 1.803, 62 Km. Dari total panjang jalan yang berada di bawah naungan nasional sepanjang 212,30 Km, di bawah wewenang pemerintah provinsi 184,17 Km dan selebihnya 1.407,15 Km di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jalan tersebut termasuk dengan bagian jembatan yang menghubungkan karna perlintasan sungai, dengan jumlah jembatan ter update pada tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim sebanyak 298 jembatan.
- b. Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi dan Gas
Kebutuhan Kawasan Industri tidak lepas dari kebutuhan air bersih. Berdasarkan standar teknis air baku untuk kawasan industri, standar penyediaan air baku adalah 0,55 – 0,75 liter/dtk/ha. Mengacu kepada standar tersebut, maka diketahui kebutuhan air baku kawasan industri mencapai 82,08 liter/dtk. Untuk

memenuhi air baku, dapat dilakukan pipanisasi dari sumber air permukaan Sungai Enim dan Sungai Lematang yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Air minum yang disalurkan pada tahun 2022 berjumlah 7.591.120 m³, kepada 39.401 pelanggan (BPS Kabupaten Muara Enim, 2023).

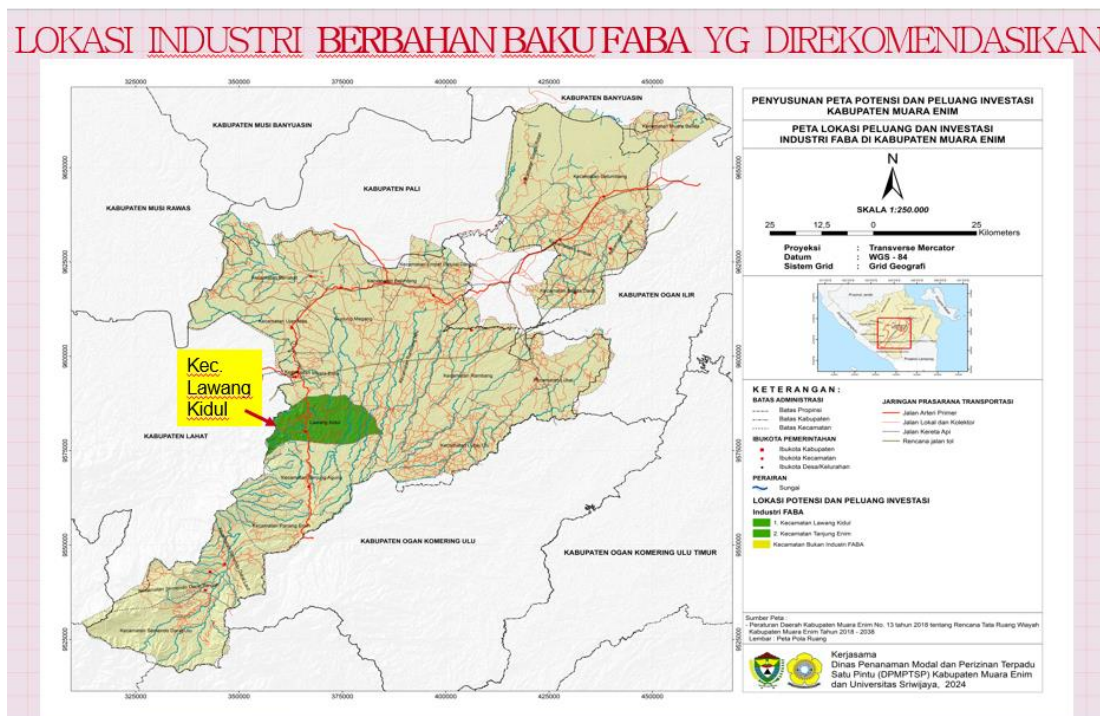
Listrik merupakan salah satu komponen vital dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim Penggunaan listrik di Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dilihat dari jumlah pelanggan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dari 85.645 pelanggan menjadi 89.667 pelanggan, atau naik sekitar 4,7 persen. Sumber listrik langsung dari PLN ranting Muara Enim yang tersebar di delapan kecamatan seperti Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Tanjung Agung, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, dan Gunung Megang. Menurut data terupdate dari BPS yang mengacu pada data PLN ranting Muara Enim Tahun 2021 jumlah Daya Listrik Terpasang adalah 119.409.783 KW.

Jaringan Telekomunikasi merupakan faktor penting di peradaban sekarang ini, berdasarkan data BPS, provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di seluruh kelurahan dan desa pada tahun 2019 memiliki menara BTS dengan sinyal kuat sebanyak 259 menara, selanjutnya meningkat pada tahun 2020 sebanyak 272 menara dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 278 menara. Sebaliknya, untuk sinyal lemah terjadi penurunan sejak 2019 yang tadinya berjumlah 6 menara menjadi 4 menara dan tahun 2021 turun kembali dengan sisa 1 menara sinyal lemah. Menurut Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim semua menara tersebut telah mengcover seluruh wilayah dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki blank spot.

- c. Ketersediaan Bahan Baku Industri Sumber Bahan Baku FABA Posisi Kabupaten Muara Enim mempunyai keunggulan dari sisi ketersediaan bahan baku produk pemanfaatan limbah FABA. Kabupaten Muara Enim yang mempunyai sumber limbah FABA dari PLTU yang beroperasi 24 jam setiap hari. Sumber FABA di Kabupaten Muara Enim berasal dari PLTU Mulut Tambang Huadian Bukit Asam Power dengan kapasitas PLTU 2 x 660

megawatt berada di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung, PT PLN UPK Bukit Asam dengan kapasitas 4 x 65 megawatt dan PLTU PT. Bukit Asam dengan kapasitas 3 x 10 megawatt yang berlokasi di Kecamatan Lawang Kidul, PLTU PT GHEMM Indonesia dengan kapasitas 2 x 150 megawatt yang berlokasi di Kecamatan Belimbing, dan PLTU sumsel 1 yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024 oleh PT Songhua Gohua Lion Power Indonesia (PT SGLPI) dengan kapasitas 2 x 350 megawatt yang terletak di Kecamatan Rambang Niru.

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi industri berbahan baku FABA di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.30 berikut ini (Kecamatan Lawang Kidul).



Gambar 4.30.
Lokasi Usaha FABA yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.8.3. Aspek Pasar

Limbah FABA yang ada sudah umum dimanfaatkan oleh industri semen sebagai bahan campuran untuk semen namun masih belum terlalu banyak diaplikasikan pada sektor lain seperti produk turunan dari beton. Pengaplikasian Fly Ash (FA) pada produk semen pozzolan kadarnya berkisar antara 15 % - 30% (ACI

232.2). Pada SNI 7062:2014, penggunaan bahan pozzolan (FA) untuk semen komposit maksimal sebesar 35%. Dari berbagai referensi, sudah banyak penelitian terkait pemanfaatan limbah FABA untuk dijadikan bahan konstruksi dan infrastruktur seperti batako, hebel, paving, perkerasan jalan, timbunan pada pekerjaan jalan hingga perkuatan tanah untuk pekerjaan jalan. Termanfaatkannya limbah FABA di sektor konstruksi dan infrastruktur seperti pembuatan batako, hebel dan paving dapat menjadi salah satu peluang usaha di level UMKM.

Pada sektor infrastruktur seperti pekerjaan jalan, peluang usaha ini menjadi opsi bagi pengusaha pada skala industri (ready mix). Dibawah dijabarkan peluang penerapan produk FABA bila diterapkan pada proyek konstruksi dan infrastruktur.

Pada proyek konstruksi, produk pemanfaatan FABA seperti batako, hebel dan paving block akan sangat banyak dibutuhkan. Hal ini terlihat dari kebutuhan pembangunan rumah pribadi masyarakat yang tiap tahunnya meningkat (BPS). Lebih lanjut, sekarang ini pemanfaatan hebel sudah mulai diminati masyarakat karena bahan ini lebih ringan dan kuat dari bahan konvensional (batu bata). Pembangunan gedung-gedung diatas dua lantai lebih memilih penggunaan hebel untuk mengurangi bobot bangunan yang ada. Selain itu, produk pemanfaatan FABA seperti paving block dirasa akan sangat populer terutama digunakan pada taman dan pedestrian sekitar kota serta halaman warga. Dari sini terlihat bahwa dari sektor konstruksi, potensi pemanfaatan produk-produk ini cukup besar di masa mendatang. Peluang penerapan produk pemanfaatan FABA juga cukup besar dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pada proyek jalan. Penerapan pada proyek jalan dapat berupa pekerjaan timbunan, perbaikan tanah bahkan pekerjaan lapis pondasi bawah jalan (Sub-based).

Menurut data BPS, terjadi penambahan panjang jalan (berdasarkan jenis permukaan) yang sebelumnya 1396.51 km di tahun 2020 menjadi 14707.15 km di tahun 2022 dan diproyeksikan akan terus meningkat demi pemerataan pembangunan dan akses transportasi masyarakat. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan untuk berinvestasi dalam proyek pekerjaan jalan dalam hal pekerjaan perbaikan jalan dan pekerjaan jalan baru. Dari sisi pemasaran, kawasan Kabupaten Muara Enim berada di provinsi sumatera selatan yang relatif dekat dengan beberapa ibu kota provinsi seperti kota Palembang (149 km), Bengkulu (301 km), Jambi (333 km). Posisi Kabupaten Muara Enim yang cukup strategis karena didukung dengan jalur transportasi antar daerah yang memadai serta menjadi salah

satu jalur rantai pasok nasional. Hal ini sangat mendukung kegiatan usaha dari sektor pengiriman hasil produk pemanfaatan FABA mencapai pangsa pasar regional dan nasional.

4.2.3.8.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada industri FABA didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan dan rumah industri FABA. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi industri FABA di Kabupaten Muara Enim disajikan pada Tabel 4.51 berikut ini.

Tabel 4.51.
CAPEX Investasi Industri FABA Ready Mix dengan Pembangunan Batching Plant

No.	Komponen Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Batching Plant	1	Unit	2.500.000.000	2.500.000.000
2	Loader	1	Unit	700.000.000	700.000.000
3	Genset	1	Unit	600.000.000	600.000.000
4	Truct Mixer	10	Unit	900.000.000	9.000.000.000
5	Mobil Kecil	3	Unit	80.000.000	240.000.000
6	Alat-Alat Mekanik	1	Unit	400.000.000	400.000.000
7	Alat-Alat Laboratorium	1	Unit	400.000.000	400.000.000
8	Kantor+ATK	1	Set	200.000.000	200.000.000
9	Pompa Air	1	Set	50.000.000	50.000.000
10	Lahan+ Izin	1	Set	30.000.000	30.000.000
11	Tes Rutin	3	Kali/thn	5.000.000	15.000.000
12	Tenaga Kerja	720	OB	2.500.000	1.800.000.000
Total					15.935.000.000

Tabel 4.52.
CAPEX Investasi Industri FABA Pembangunan Pabrik Precast

No.	Komponen Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Mesin Press Paving Block	1	Unit	70.000.000	70.000.000
2	Mesin cetak bata ringan	1	Unit	100.000.000	100.000.000
3	Foam generator	1	Unit	50.000.000	50.000.000
4	Compressor	1	Unit	25.000.000	25.000.000

5	Conveyor	10	Meter 1	10.000.000	100.000.000
6	Mesin Potong	1	Unit	20.000.000	20.000.000
7	Screener/Ayakan Pasir	1	Unit	15.000.000	15.000.000
8	Galon Air	1	Unit	10.000.000	10.000.000
9	Cetakan paving block	15	Unit	280.000	4.200.000
10	Cetakan lock	15	Unit	300.000	4.500.000
11	Cetakan genteng	15	Unit	250.000	3.750.000
12	Cetakan hebel	15	Unit	300.000	4.500.000
13	Cetakan cone block	15	Unit	250.000	3.750.000
14	Artco Gerobak	3	Unit	800.000	2.400.000
15	Plat kayu cetakan	500	Unit	50.000	25.000.000
16	Palu cetakan	3	Unit	50.000	150.000
17	Genset 3000 Watt	1	Unit	5.000.000	5.000.000
18	Alat laboratorium	1	Set	25.000.000	25.000.000
19	Pekerja	15	OB	2.500.000	37.500.000
20	Stockyard	150	m2	500.000	75.000.000
21	Workshop area	300	m2	250.000	75.000.000
22	Alat K3	15	set	400.000	6.000.000
Total					661.750.000

2. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan dan membuat produk yang telah ditentukan. Bahan - bahan dan alat - alat dilakukan sesuai dengan koefisien dan mix design yang telah ditentukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai standar produk masing - masing. Biaya operasional dibagi menjadi dua bagian utama yaitu untuk Batching Plant dengan produk ready mix beton k-300, ready mix pengganti subbase jalan, dan produk ready mix lain yang sesuai dengan kebutuhan mutu. Produk yang dipilih adalah paving block, cone block, batako, hebel, dan genteng ringan. Biaya operasional didasarkan analisa harga satuan harga satuan pekerjaan sesuai peraturan Bina Marga, dan peraturan Cipta Karya, tersaji pada Tabel 4.53.

Tabel 4.53.
Biaya Produksi Ready Mix Beton

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	(L01)	Jam	1,4056	4.657,31	6.546,31
2	Tukang	(L02)	Jam	0,7028	6.088,57	4.279,05
3	Mandor	(L03)	Jam	0,1506	7.281,29	1.096,56

Jumlah Harga A						11.921,92
B	Bahan					
1	Semen	(M12)	kg	6,6011	60.000,00	396.066,00
2	Fly Ash		m3	0,4741	24.400,00	11.568,04
3	Bottom Ash		m3	0,4504	24.400,00	10.989,76
4	Additive	(M67a)	ltr	0,9139	38.500,00	35.185,15
Jumlah Harga B						453.808,95
C	Peralatan					
1	Wheel Loader	(E15)	Jam	0,0244	253.964,94	6.196,74
2	Batching Plant	(E43)	Jam	0,0502	493.265,26	24.761,92
3	Truck Mixer	(E49)	Jam	0,2437	449.232,73	109.478,02
4	Water Tank Truck	(E23)	Jam	0,0422	155.193,02	6.549,15
Jumlah Harga C						146.985,82
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					612.716,70
E	Keuntungan dan Overhead 10% x D					61.271,67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					673.988,37

Tabel 4.54.
Biaya Produksi Ready Mix pengganti Sub Base Jalan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	(L01)	Jam	1,4056	4.657,31	6.546,31
2	Tukang	(L02)	Jam	0,7028	6.088,57	4.279,05
3	Mandor	(L03)	Jam	0,1506	7.281,29	1.096,56
Jumlah Harga A						11.921,92
B	Bahan					
1	Semen	(M12)	Zak	4,192	60.000,00	251.520,00
2	Pasir	(M1a)	m3		96.500,00	-
3	Fly Ash		m3	0,6288	24.400,00	15.342,72
4	Bottom Ash		m3	0,9376	24.400,00	22.877,44
5	Additive	(M67a)	Ltr	0,9139	38.500,00	35.185,15
Jumlah Harga B						324.925,31
C	Peralatan					
1	Wheel Loader	(E15)	Jam	0,0244	253.964,94	6.196,74
2	Batching Plant	(E43)	Jam	0,0502	493.265,26	24.761,92
3	Truck Mixer	(E49)	Jam	0,2437	449.232,73	109.478,02
4	Water Tank Truck	(E23)	Jam	0,0422	155.193,02	6.549,15
Jumlah Harga C						146.985,82
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					483.833,06
E	Keuntungan dan Overhead 10% x D					48.383,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					532.216,36

3. Net Present Value

Berdasarkan perhitungan hasil biaya investasi, biaya operasional, dan pendapatan dari setiap produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah menghitung kelayakan usaha dari setiap masing - masing produk dan biaya yang dikeluarkan. Kelayakan usaha tersebut didasarkan pada tingkat suku bunga sebesar 14% dengan rencana bisnis selama 5 tahun. Dengan penentuan tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) untuk setiap produk yang dihasilkan. Berikut adalah skema hasil perhitungan analisis dari setiap produk yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.55.

Tabel 4.55.
Skema Analisis Biaya untuk Produk Paving Block

Skema (%)	Keuntungan	Total Operasional							Analisis Biaya		
		NPV							IRR (%)	BCR	PP
		Modal	N=1	N=2	N=3	N=4	N=5	Total			
30	93.796.268	661.750.000	82.277.428	72.173.183	63.309.809	55.534.920	48.714.842	322.010.185	-10,48	0,49	7,1
40	145.061.691	661.750.000	127.247.098	111.620.261	97.912.510	85.888.166	75.340.497	498.008.534	3,18	0,75	4,6
50	196.327.114	661.750.000	172.216.767	151.067.339	132.515.210	116.241.412	101.966.151	674.006.882	14,77	1,02	3,4
60	247.692.537	661.750.000	217.186.436	190.514.418	167.117.910	146.594.658	128.591.805	850.005.230	25,30	1,28	2,7
70	298.857.960	661.750.000	262.156.106	229.961.496	201.720.611	176.947.904	155.217.460	1.026.003.578	35,14	1,55	2,2
80	350.123.383	661.750.000	307.125.775	269.408.574	236.323.311	207.301.150	181.843.114	1.202.001.926	44,51	1,82	1,9
90	401.388.806	661.750.000	352.095.444	308.855.653	270.926.011	237.654.396	208.468.768	1.378.000.274	53,55	2,08	1,6
100	452.654.229	661.750.000	397.065.113	348.308.731	305.528.711	268.007.642	235.094.422	1.554.004.622	62,33	2,35	1,5

Tabel 4.56.
Skema Analisis Biaya untuk Produk Batako

Skema (%)	Keuntungan	Total Operasional							Analisis Biaya		
		NPV							IRR (%)	BCR	PP
		Modal	N=1	N=2	N=3	N=4	N=5	Total			
30	20.122.927	661.750.000	17.651.690	15.483.938	13.582.402	11.914.388	10.451.217	69.083.637	-41,55	0,1	32,9
40	46.830.569	661.750.000	41.079.446	36.034.602	31.609.300	27.727.456	24.322.330	160.773.136	-26,96	0,24	14,1
50	73.538.211	661.750.000	64.507.203	56.585.266	49.636.198	43.540.524	38.193.442	252.462.635	-16,86	0,38	9
60	100.245.854	661.750.000	87.934.959	77.135.929	67.663.096	59.353.593	52.064.555	344.152.133	-8,60	0,52	6,6
70	126.953.496	661.750.000	111.362.716	97.686.593	85.689.994	75.166.661	65.935.667	435.841.632	-1,37	0,66	5,2
80	153.661.138	661.750.000	134.790.457	118.237.256	103.716.891	90.979.729	79.806.780	527.531.131	5,19	0,8	4,3
90	180.368.781	661.750.000	158.218.229	138.787.920	121.743.789	106.792.797	93.677.892	619.220.630	11,29	0,94	3,7
100	207.076.423	661.750.000	181.645.985	159.338.583	139.770.687	122.605.866	107.549.005	710.910.128	17,50	1,07	3,2

Tabel 4.57.
Rekapitulasi untuk nilai NPV setiap Skema dan Produk

Skema (%)	Produksi (dalam Juta)													
	Ready Mix				Pabrik Precast									
	K-300		Subbase Jalan		Paving Block		Cone Block		Batako		Habel		Genteng Ringan	
	Modal	NPV	Modal	NPV	Modal	NPV	Modal	NPV	Modal	NPV	Modal	NPV	Modal	NPV
30	15.935	7.881	15.935	9.585	662	323	662	239	662	70	662	497	662	773
40	15.935	11.882	15.935	14.153	662	499	662	388	662	161	662	731	662	1.099
50	15.935	15.882	15.935	18.721	662	675	662	536	662	253	662	965	662	1.425
60	15.935	19.882	15.935	23.289	662	851	662	684	662	345	662	1.199	662	1.751
70	15.935	23.882	15.935	27.857	662	1.027	662	832	662	436	662	1.433	662	2.077
80	15.935	27.882	15.935	32.425	662	1.203	662	981	662	528	662	1.668	662	2.403
90	15.935	31.882	15.935	36.993	662	1.379	662	1.129	662	620	662	1.902	662	2.729
100	15.935	35.883	15.935	41.561	662	1.554	662	1.277	662	711	662	2.136	662	3.054

Tabel 4.58.
Rekapitulasi untuk nilai Payback Period setiap Skema dan Produk

No.	Skema (%)	Produksi						
		Ready Mix		Pabrik Precast				
		K-300	Subbase Jalan	Paving Block	Cone Block	Batako	Hebel	Genteng Ringan
1	30	7,91	6,51	7,06	9,51	32,89	5,22	3,35
2	40	5,25	4,41	4,56	5,87	14,13	3,55	2,36
3	50	3,93	3,33	3,37	4,24	9,00	2,68	1,82
4	60	3,14	2,68	2,67	3,32	6,60	2,16	1,48
5	70	2,61	2,24	2,21	2,73	5,21	1,81	1,25
6	80	2,24	1,92	1,89	2,32	4,31	1,55	1,08
7	90	1,96	1,69	1,65	2,01	3,67	1,36	0,95
8	100	1,74	1,50	1,46	1,78	3,20	1,21	0,85

4.2.3.8.5. Analisis Aspek Sosial dan Lingkungan

Produk - produk yang dapat dihasilkan dari material Sumber FABA ini diperkirakan mampu mengubah struktur sosial Kabupaten Muara Enim dimana sebagian besar masyarakat akan dapat memberikan alternatif mata pencaharian yang menguntungkan pada sektor industri yang akan dikembangkan. Adapun dari segi budaya, pemanfaatan material limbah FABA ini akan membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industrialisasi kawasan yang direncanakan.

Dampak positif dari keberadaan pabrik precast, dan Batching plant dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Pabrik-pabrik produksi produk FABA ini awalnya hanya untuk pengolahan rumahan di rumah-rumah warga yang belum terdaftar secara resmi. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 624.020 jiwa pada tahun 2022, menunjukkan bahwa persentase pengangguran berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan angka 4,12 % pada tahun 2022, dengan berjenis kelamin laki laki berjumlah 5,87%, dan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 4,27 %. Data tersebut berasal dari data BPS tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai untuk masing - masing skema, Dengan data tersebut diharapkan adanya pabrik precast, dan batching plant yang berada di sekitar stockpile FABA yang telah disiapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Muara Enim dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor tersebut yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan pabrik precast, dan batching plant di waktu yang akan datang. Kesempatan berusaha pada kegiatan ini tentu diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja yang terserap namun juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

Selanjutnya adalah faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengembangan UMKM dan BUMDes di kawasan sumber stockpile FABA antara lain sebagai berikut:

1. Barrier to entry, dengan SOP yang ditetapkan dalam UMKM dan BUMDes.
2. Sertifikasi manajemen mutu, untuk proses pengendalian prosedur pelaksanaan dan pemeliharaan mutu, untuk SNI, ISO, dan standar lain yang dibutuhkan.
4. Pendanaan yang transparan, pemberian peluang pembiayaan atau bantuan modal dari non bank yang dapat bekerja sama.
5. Sistem informasi yang mudah diakses untuk menciptakan jaringan yang baik untuk berbagai perusahaan lainnya demi mengembangkan usaha yang lebih besar.

6. Peningkatan jiwa kewirausahaan untuk masyarakat lokal, dengan perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan pegawai pada masyarakat lokal untuk membangun UMKM dan BUMDes lebih banyak di Kawasan stockpile FABA.
7. Peningkatan keterlibatan peran pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun penghasil limbah FABA dengan subsidi - subsidi yang memberikan kemudahan untuk berinvestasi pada pabrik precast, dan batching plant FABA.

Selain faktor di atas, dalam mendorong percepatan pengembangan UMKM di sekitar stockpile FABA PLTU pembangunan UMKM Center. UMKM Center berperan sebagai mediator, fasilitator, katalisator, inkubator dan sarana inovasi bagi pengembangan UMKM ke depan. Hadirnya UMKM Center ini dimaksudkan sebagai wadah bagi UMKM dan BUMDes untuk beroperasi, memproduksi dan berinovasi dalam memperluas pasar dan jaringan. 105 Dokumen Profil Potensi dan Peluang Investasi Pemanfaatan FABA di Kabupaten Muara Enim Laporan Akhir Pengembangan inkubator bisnis untuk meningkatkan kapabilitas UMKM serta penyediaan area R&D (research and development) akan menjadi bagian program kerja UMKM Center dan BUMDes di Stockpile FABA.

4.2.3.8.6. Analisis Risiko

Setelah melakukan seluruh analisis terhadap produk FABA yang ditinjau, selanjutnya adalah menganalisa risiko - risiko yang akan terjadi dari faktor - faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan investasi ini adalah antara lain risiko permintaan, risiko perizinan, risiko ketika implementasi infrastruktur pendukungnya, risiko regulasi dan politik, risiko pembiayaan, risiko konstruksi dan pengembangan, dan risiko force majeure dan lingkungan. Selanjutnya akan dibahas dan dijabarkan satu persatu sesuai dengan identifikasi risiko yang akan terjadi.

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan dan iklim akan berimbas pada kebutuhan bahan baku berupa semen, foam, agregat halus, fly ash dan bottom ash yang digunakan untuk memproduksi produk. Perubahan permintaan secara otomatis mempengaruhi penjualan dan pendapatan perusahaan. Berdasarkan fakta, perhitungan finansial disusun sesuai asumsi

dan skema - skema 30 - 100 % produk terjual, tingkat suku bunga bank dan cost of capital sebesar 14%.

2. Risiko Perizinan

Kendala perizinan untuk pelaksanaan kegiatan produksi material limbah FABA ini terkait dengan perizinan pengolahan limbah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Dinas Lingkungan Hidup masih menganggap bahwa FABA merupakan limbah B3 yang perlu diawasi oleh Pemerintah. Namun menurut Peraturan, FABA telah masuk kedalam limbah non B3, namun pengolahannya memang perlu perizinan dan peraturan yang mengikat agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat.

3. Risiko Implementasi Infrastruktur

Pendukung Risiko implementasi infrastruktur pendukung dapat terjadi bila tidak adanya keberlanjutan dari perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung jalannya kegiatan industri, yaitu pabrik precast dan batching plant. Operasional bisnis pabrik akan terhambat bila infrastruktur tidak memadai. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan infrastruktur di kawasan stockpile akan mempertimbangkan jika kawasan tersebut gagal berkembang sebagaimana analisis yang dikaji sebelumnya. PUPR berhati-hati dalam penyediaan fasilitas penunjang seperti jalan tol dan jalan-jalan penunjang lainnya. Selain itu, keamanan perlu dijaga mengingat alat - alat dan biaya investasi pabrik precast dan batching plant cukup tinggi sehingga alat - alat yang dibutuhkan pun juga mahal dan perlu dijaga.

4. Risiko Regulasi dan Politik

Regulasi atau dasar hukum terkait pemanfaatan limbah non-B3 FABA sudah diatur pada PP No. 22 tahun 2021. Tetapi regulasi tersebut belum diikuti dengan aturan-aturan turunannya di level pemerintahan daerah. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang menjadi poin penting bagi pelaku usaha dalam kegiatan investasi di bidang pemanfaatan limbah FABA dalam hal kemudahan pengolahan dan distribusi limbah non-B3 ini. Ketentuan perpajakan dalam pemanfaatan produk FABA semestinya diperjelas dengan aturan khusus demi menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan aturan pajak yang ringan dan bila perlu adanya subsidi dari pemerintah terkait ikut andil dalam program pemanfaatan limbah non-B3 FABA perlu dimunculkan.

5. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan berhubungan erat dengan masalah perhitungan kelayakan usaha, produksi dan jumlah kebutuhan pasar atas produk perusahaan, yaitu pabrik precast dan batching plant. Bila produksi melebihi dari kebutuhan pasar, maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko ini juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memperkirakan berapa besar kas yang masuk ke perusahaan dan berapa besar jumlah kas yang keluar. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dapat mengakibatkan jalannya bisnis tidak sesuai rencana dan bahkan mengakibatkan kerugian karena target tidak tercapai. Untuk meminimumkan risiko ini, selain menentukan asumsi-asumsi dalam perhitungan OPEX terkait pembangunan pabrik precast dan ready mix juga dibutuhkan ketelitian perhitungan, sehingga diharapkan dapat menampilkan perhitungan yang dapat mendukung manajemen dalam mengambil keputusan investasi. Risiko pembiayaan dan nilai tukar mata uang dipengaruhi indikator makro ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis risiko finansial yaitu terjadinya perubahan perekonomian yang berhubungan dengan moneter, terutama dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah.

6. Risiko Konstruksi dan Pengembangan Usaha

Risiko konstruksi pada saat pembangunan pabrik precast dan batching plant terkait dengan biaya konstruksi yang berbeda dari harga pasar, serta komitmen kontraktor dalam penyelesaian kegiatan pengembangan konstruksi dan usaha precast dan ready mix. Pelaku usaha perlu mengantisipasi saat konstruksi tidak direalisasikan dengan efektif dan efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri.

7. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko-risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi terutama banjir, tanah longsor, gempa bumi dan pandemi yang lain dapat mengakibatkan industri tidak dapat beroperasi secara normal. Adanya ancaman banjir di lokasi Pabrik precast, dan batching plant karena lokasi ini mengalami bencana banjir yang teratur sebagai dampak aliran Sungai Lematang, Muara Enim. Ancaman bencana banjir berdampak pada kerugian fisik dan ekonomi, seperti terendamnya lokasi pabrik precast dan batching plant. Posisi pabrik yang berlokasi di atas perbukitan mempunyai risiko

terhadap terjadinya longsor pada daerah-daerah rawan longsor. Selain itu karena adanya perbukitan di Tanjung Enim maka akan berpotensi terjadi Gempa Bumi, dan terulangnya pandemi di Indonesia pada umumnya.

4.2.3.9. Analisa Kelayakan Usaha Jamur Tiram

4.2.3.9.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha jamur tiram di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha jamur tiram di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa jamur tiram meskipun belum menjadi komoditi unggulan, tetapi pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Muara Enim, jamur tiram termasuk dalam kelompok industri pangan olahan yang menjadi bagian dari industri unggulan
- Komoditi jamur tiram adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku.. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Komoditi jamur tiram adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk

memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

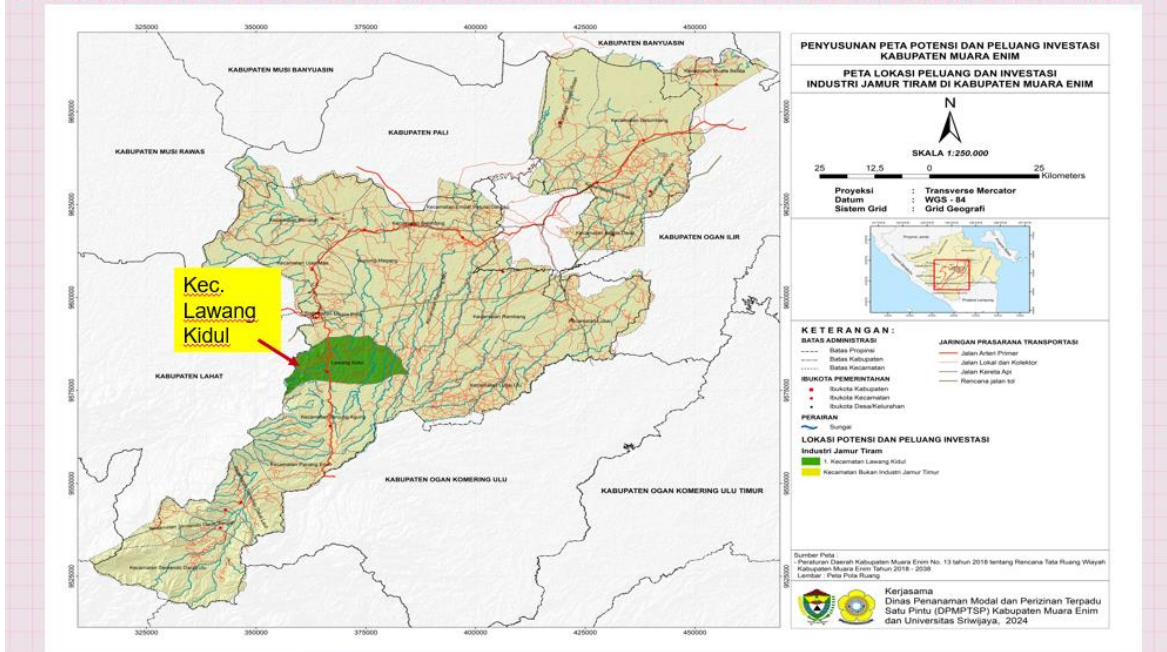
4.2.3.9.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan jamur tiram khususnya pada bagian wilayah dataran tinggi. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari:

- Jamur tiram merupakan salah satu tanaman yang dapat diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah dalam bentuk industri, baik skala besar maupun skala kecil. Sehingga dapat dilakukan oleh semua kelompok pengusaha.
- Lokasi pengusahaan memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik, terhubung lancar dengan wilayah-wilayah konsumen.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai
- Terdapat usaha industri pengolahan menjadi berbagai jenis pangan olahan.
- Kondisi lahan (topografi, geologi, daya dukung, dan daya tampung lahan), status lahan dan harga lahan mendukung untuk pengembangan jamur tiram yang memang merupakan jenis tanaman yang cocok hidup di daerah tropis

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi jamur tiram di Kabupaten Muara Enim, meskipun sebenarnya bisa dilakukan di wilayah mana saja. Hanya saja pada wilayah yang direkomendasikan memiliki kelebihan banyak tersedia SDM yang memiliki pengalaman mengolah jamur tiram, sehingga berpotensi sebagai tenaga kerja. Wilayah yang direkomendasikan tersebut tersaji di Gambar 4.33 (Kecamatan Lawang kidul).

LOKASI PENGEMBANGAN JAMUR TIRAM YG DIREKOMENDASIKAN



Gambar 4.31.

Lokasi Usaha Jamur Tiram yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.9.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha industri jamur tiram di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini :

1. Daya Saing Usaha Jamur Tiram di Kabupaten Muara Enim

Komoditi Jamur Tiram di Kabupaten Muara Enim dapat dilakukan di semua wilayah yang memiliki pangsa pasar, terutama di Kecamatan Lawang Kidul, yang lokasinya relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan industri hilirnya, berupa aneka pangan olahan yang disukai konsumen.

2. Supply dan Market Driven Jamur Tiram

Hasil analisis *supply dan market driven*, usaha jamur tiram memperlihatkan bahwa pengembangan produk hasil olahan jamur tiram di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh permintaan masyarakat terhdap produk-produk olahan jamur tiram yang dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat dari semua

lapisan usia. Artinya permintaan akan produksi jamur tiram ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Jamur Tiram di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi jamur tiram yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk segar dan pangan olahan yang dijual untuk semua kalangan masyarakat. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen.

4.2.3.9.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada usaha jamur tiram didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan dan rumah jamur tiram. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi industri jamur tiram di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 543.500.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.59 berikut ini.

Tabel 4.59.
CAPEX Investasi Jamur Tiram

No.	Komponen	Satuan	Unit	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)	Teknis (Th)	tan/Thn
A.	Investasi :				46.000.000		2.850.000
1.	Perijinan	Paket	1	1.500.000	1.500.000		
2.	Tanah	m2	50	500.000	25.000.000		
3.	Bangunan :				19.500.000		
	-Rumah Jamur	Unit	1	12.000.000	12.000.000	10	1.200.000
	-Rak Kumbung	Unit	5	1.500.000	7.500.000	5	1.500.000
4.	Peralatan lain :						
	-Alat Semprot	Unit	1	250.000	250.000	5	50.000
	-Timbangan	Unit	1	300.000	300.000	5	60.000
	- Termometer dan Higrometer	unit	1	200.000	200.000	5	40.000
B.	Modal kerja (satu bulan) :				5.445.833		
1	Bahan baku :				900.000	-	-

	-Bibit Jamur	botol	30	30.000	900.000		
2.	Bahan pembantu :				2.254.167		
	-Baglog Jaur Tiram	baglog	250	4.500	1.125.000	-	-
	-Media Tanam (Serbuk Gergaji)	kg	167	5.000	833.333		
	-Dedak Halus (bekatul)	kg	17	6.500	108.333		
	-Kapur	kg	6	2.000	12.500		
	-Plastik baglog	pcs	250	250	62.500		
	-Karet pengikat baglog	pcs	250	100	25.000		
	-Alkohol (sterilisasi)	liter	0,5	50.000	25.000		
	-Kertas penutup baglog	lembar	250	250	62.500		
3.	Biaya overhead :				2.291.667		
	-Listrik dan air	bulan	1	300.000	300.000		
	-Tenaga kerja 3 orang	bulan	1	1.500.000	1.500.000		
	-Transportasi	bulan	1	300.000	300.000		
	-Pemeliharaan alat	Unit	1	191.667	191.667		
	Total A dan B				51.445.833	-	-

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial jamur tiram.

Tabel 4.60.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Jamur Tiram

No	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	bulan	12	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	a. Produksi per tahun	kg	1500	
	b. Harga jamur tiram	kg	35.000	
4	Upah tenaga kerja			
	a. Tenaga kerja 3 Orang	Rp/bln	1.500.000	
5	Penggunaan bahan baku			

	Bibit Jamur	botol	30	
	Baglog Jamur Tiram	baglog	3.000	
	Media Tanam (Serbuk Gergaji)	kg	2.000	
	Dedak Halus (bekatul)	kg	200	
	Kapur	kg	75	
	Plastik baglog	pcs	3.000	
	Karet pengikat baglog	pcs	3.000	
	Alkohol (sterilisasi)	liter	6	
	Kertas penutup baglog	lembar	3.000	
6	Discount Factor/suku bunga	%	3,25	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.61.

Tabel 4.61.
Operational Expenditure (OPEX) Jamur Tiram

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Operasional :	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333
a Bahan baku	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000
b Biaya overhead	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
c Penyusutan	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333
Laba operasi (I - II)	224.366.667	224.366.667	224.366.667	224.366.667	224.366.667
	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10
	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333	495.633.333
	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000
	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333	28.833.333
	224.366.667	224.366.667	224.366.667	224.366.667	224.366.667

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (feasible) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.62.
Kelayakan Usaha Industri Jamur Tiram

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	314.498.196
B/C Ratio	8,69
Payback period (tahun)	1,23
Internal Rate of Return (IRR) %	86.67
Profit Index	8,71

4.2.3.9.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada usaha jamur tiram di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya dapat menjadikan usaha jamur tiram sebagai opsi pencaharian. Adapun dari segi budaya, usaha jamur tiram dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industri turunannya yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan usaha jamur tiram yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari usaha jamur tiram di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada usaha ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

4.2.3.9.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha Jamur tiram. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan jamur tiram, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, usaha jamur tiram masuk sebagai komoditi unggulan sektor pertanian yang terkoneksi dengan industri yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan tempat usaha terendam, yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

5. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan usaha jamur tiram adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan pengusaha besar.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.10. Analisa Kelayakan Usaha Kopi Bubuk

4.2.3.9.7. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa komoditi kopi beserta industri hilirnya khususnya kopi bubuk memang merupakan salah satu komoditi unggulan pada sektor perkebunan dan industri di Kabupatean Muara Enim yang telah tertuang dalam RPJP Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 dan juga menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang tertera dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten

Muara Enim, kopi dengan semua industri turunannya menjadi komoditi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten

- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Perkebunan berikut industri hilirnya yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan untuk komoditi perkebunan utama. Salah satu komoditi utama tersebut adalah kopi. Lokasi yang disiapkan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim untuk komoditi kopi yang terhubung dengan industri kopi bubuknya berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat. Untuk industri kopi bubuknya di
- Kopi bubuk adalah industri hilir dari komoditi kopi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi industri unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Kopi bubuk adalah usaha industri yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim, karena produk ini adalah produk industri unggulan di wilayah ini. Hal ini sangat mendukung investasi yang dilakukan pada kopi bubuk, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

- Usaha kopi juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor industri unggulan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa Promosi dan Pemasaran.

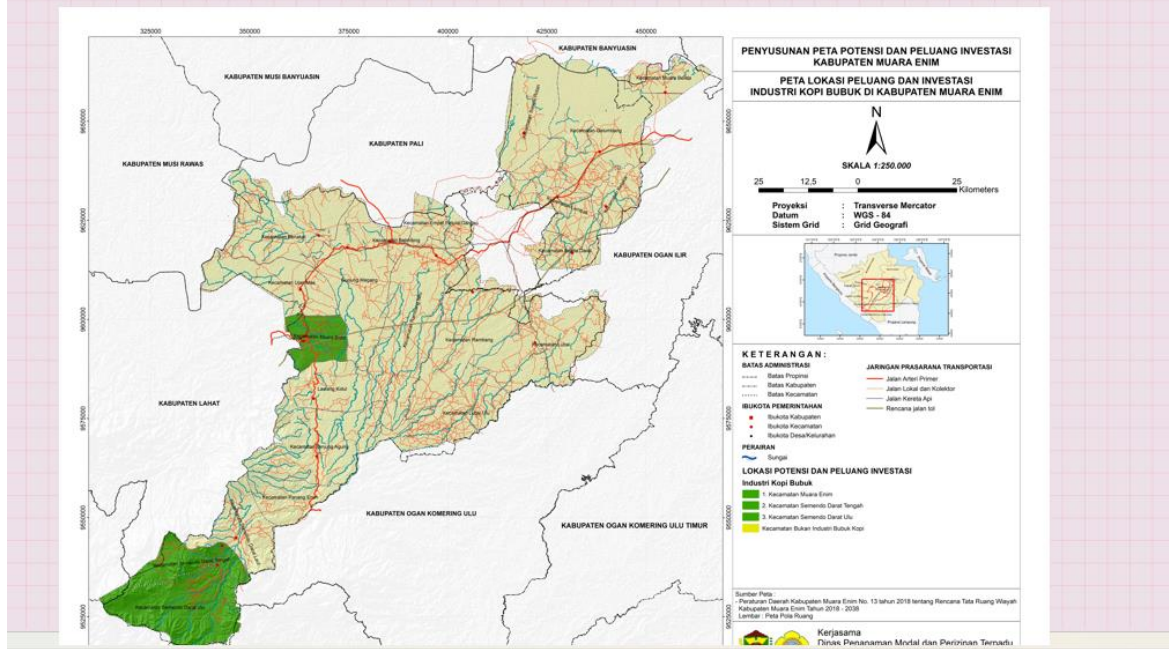
4.2.3.9.8. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan kopi bubuk karena ketersediaan bahan baku kopi yang melimpah yang dihasilkan dari berbagai kecamatan produsen di Kabupaten Muara Enim khususnya pada bagian wilayah dataran tinggi. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi pengusahaan industri kopi bubuk memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik, dan terhubung dengan berbagai wilayah konsumen dan produsen bahan baku.
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai
- Terdapat perkebunan kopi yang menjadi pemasok bahan baku kopi bubuk dalam bentuk kopi biji dengan jenis dan varietas yang bervariasi.
- Kondisi pabrik kopi dan lahan tempat pengusahaan penggiling kopi, status lahan dan harga bahan baku dan produk jual mendukung untuk pengembangan kopi

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.32 berikut ini.

LOKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KOPI BUBUK YG DIREKOMENDASIKAN



Gambar 4.32.
Lokasi Usaha Industri Kopi Bubuk yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.9.9. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Industri Kopi Bubuk di Kabupaten Muara Enim

Industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan di semua wilayah yang memiliki pangsa pasar terutama di Kecamatan Muara Enim, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan industri hilirnya, sehingga dari aspek distribusi memiliki daya saing tinggi. Pada saing lain yaitu cita rasa juga memiliki daya saing tinggi. Cita rasa kopi Muara Enim yang sering juga disebut kopi semendo sudah cukup terkenal di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Banyak faktor yang membuat kopi Muara Enim berdaya saing tinggi. Bukan hanya karena kondisi alam di kawasan pegunungan tempat menanam kopi tersebut memiliki kondisi yang sangat ideal untuk menanam kopi sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas, namun juga karena perlakuan yang diberikan oleh para petani kopi

membuat tanaman kopi di beberapa daerah di Sumatera menjadi lebih khas dan memiliki nilai jual yang tinggi.

2. Supply dan Market Driven Industri Kopi Bubuk

Hasil analisis *supply dan market driven*, industri kopi bubuk memperlihatkan bahwa pengembangan industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh kebutuhan aparat pemerintah untuk penyediaan produk unggulan khas kabupaten dan kebutuhan masyarakat lainnya di dalam maupun luar kabupaten terhadap konsumsi kopi yang memiliki ciri khas daerah. Artinya permintaan akan produksi kopi bubuk ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Industri Kopi Bubuk di Kabupaten Muara Enim

Pasar dalam negeri yang menjadi tujuan utama pemasaran produk kopi dari pelaku-pelaku pemasaran kopi Kabupaten Muara Enim meliputi pasar lokal yaitu area pemasaran kopi di sekitar wilayah produsen, pasar regional yaitu area pemasaran kopi ke wilayah-wilayah lain di luar Sumsel namun dalam jangkauan yang masih berdekatan dengan Sumsel. Pasar nasional yaitu area pemasaran kopi ke wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia.

4.2.3.9.10. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada industri kopi bubuk didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan pabrik dan mesin-mesin yang dibutuhkan. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 336.500.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.63.

Tabel 4.63.
CAPEX Investasi Industri Kopi Bubuk

No.	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
A.	Biaya Investasi				
	1. Tanah dan bangunan	1	paket	200.000.000	200.000.000
	2. Mesin Sangrai	2	Unit	50.000.000	100.000.000

	3. Mesin Penggiling	4	Unit	7.000.000	28.000.000
	4. Mesin Sealer	1	Unit	8.000.000	8.000.000
	5. Peralatan Lain	1	paket	500.000	500.000
				Jumlah A	336.500.000
B.	Modal Kerja				
	1. Gaji Karyawan (3 orang)	3	OB	1.300.000	3.900.000
	2. Listrik (1300 VA, Rp. 500,000/bln)	12	bulan	500.000	6.000.000
	3. Biji Kopi Robusta Premium	700	kg	110.000	77.000.000
	4. Biji Kopi Robusta Biasa (campur)	700	kg	70.000	49.000.000
	5. Biji Kopi Arabika	700	kg	175.000	122.500.000
	6. Biji Kopi Lanang	300	kg	335.000	100.500.000
	7. Biji Kopi Luwak	300	kg	335.000	100.500.000
	8. Biji Kopi Liberika	300	kg	125.000	37.500.000
	9. Pemeliharaan Alat	4	unit	350.000	1.400.000
	10. Telpon + Internet Rp 150.000/bn)	12	bulan	150.000	1.800.000
	11. Gas Kecil (50 kg memerlukan 1 gas, Rp 25.000/gas)	40	tabung	25.000	1.000.000
	12. Packaging	1	paket	12.800.000	12.800.000
				Jumlah B	513.900.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial industri kopi bubuk.

Tabel 4.64.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Kopi Bubuk

No.	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	Hari	360	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi			
	- Kopi bubuk	Kg	Bervariasi	Mengikuti jenis kopi
	- Harga kain	Rp/Kg	Bervariasi	Mengikuti jenis kopi
7	Discount Factor/suku bunga	%	3,5	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.65.

Tabel 4.65.
Operational Expenditure (OPEX) Industri Kopi Bubuk

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Operasional	601.860.000	601.860.000	601.860.000	601.860.000	601.860.000
1. Modal Kerja	513.900.000	513.900.000	513.900.000	513.900.000	513.900.000
2. Pajak	87.960.000	87.960.000	87.960.000	87.960.000	87.960.000
	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10
	601.860.000	601.860.000	601.860.000	601.860.000	601.860.000

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan *capital budgeting*. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat *capital budgeting*-nya, dengan asumsi *discount rate* 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.66.
Kelayakan Usaha Industri Kopi Bubuk

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	3.374.833.526
B/C Ratio	3,23

Payback period (tahun)	4,23
Internal Rate of Return (IRR) %	61,4
Profit Index	4,25

4.2.3.9.11. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada usaha industri kopi bubuk di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, industri kopi bubuk dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industri yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan industri kopi bubuk yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari industri kopi bubuk di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada industri ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

4.2.3.9.12. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan industri kopi bubuk yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan pengusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha industri kopi.

Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan industri kopi, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, industri kopibubuk masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor industri yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan tempat usaha terendam, yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

5. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan industri kopi bubuk adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan pengusaha besar.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.10. Analisa Kelayakan Usaha Serat Nanas

4.2.3.10.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha serat nanas di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha serat nanas di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa nanas memang merupakan salah satu komoditi unggulan, sehingga turunan dari komoditi ini menjadi bagian yang diunggulkan tersebut. Pada dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Muara Enim, serat nanas menjadi salah satu industri unggulan yang dihasilkan dari tanaman nanas.
- Dalam RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028 telah dinyatakan bahwa Kawasan Industri dengan kategori agroindustri yang disiapkan di Kabupaten Muara Enim terkoneksi dengan komoditinya, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan untuk komoditi perkebunan utama.
- Serat nanas merupakan adalah industri yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan yang menjadi industri hilir dari tanaman nanas, artinya sesuai

terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

- Serat nanas adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
- Usaha serat nanas juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor agroindustri. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa Promosi dan Pemasaran.

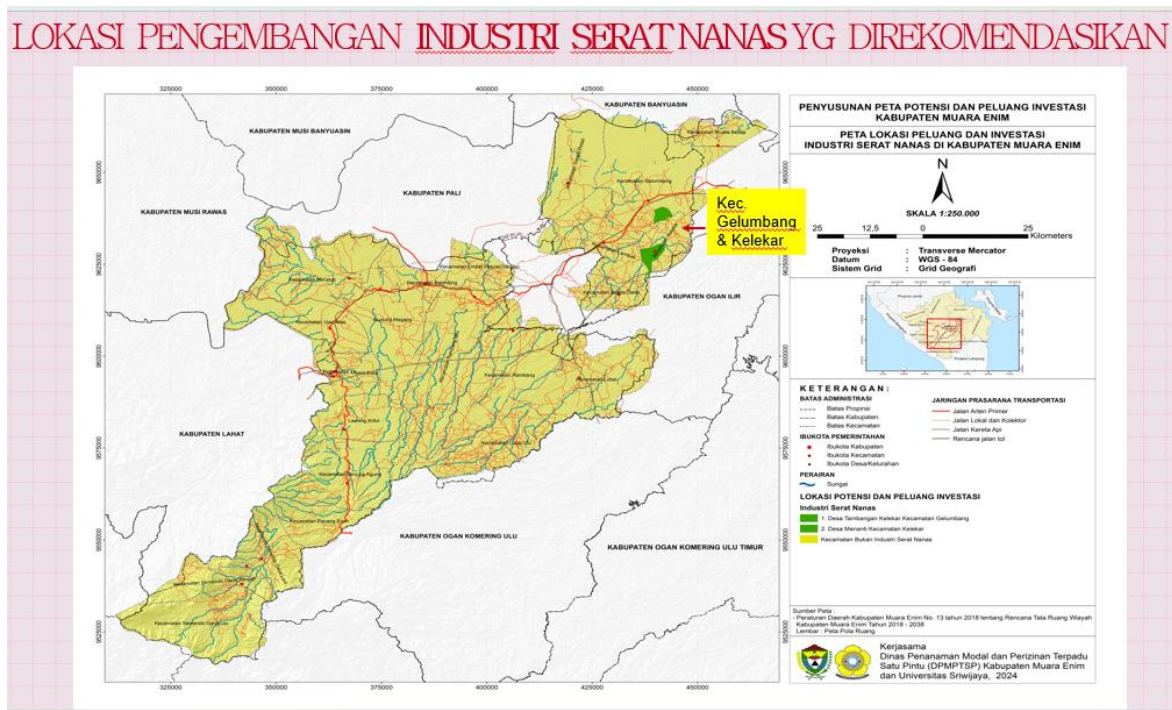
4.2.3.10.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan serat nanas dengan produk lanjutannya karena bahan baku nanas tersedia banyak dan bagian ini berasal dari daun yang selama ini menjadi limbah saja. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari:

- Lokasi kebun nanas yang menghasilkan limbah daun nanas untuk diolah menjadi serat nanas memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik,
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai,
- Tidak hanya fokus pada buah nanasnya akan tetapi melihat potensi pemanfaatan daun nanas yang biasanya hanya menjadi limbah bisa dimanfaatkan menjadi

produk yang bernilai tinggi secara ekonomi jika diolah dengan baik dan benar. Serat daun nanas dapat diolah menjadi bahan tekstil ramah lingkungan (green textile), bahan campuran fiber body mobil hingga pesawat.

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi serat nanas di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.33 (Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Kelekar).



4.2.3.10.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha serat nanas di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Daya Saing Serat Nanas di Kabupaten Muara Enim

Usaha berbasis serat nanas di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan pada wilayah-wilayah yang juga penghasil nanas di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Kelekar, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu,

lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan industri hilirnya, yaitu industri pengolahan serat nanas menjadi bahan pakaian, dan beberapa produk lain berbahan baku serat nanas, yang berada di Kota Prabumulih dan Kota Palembang.

2. Supply dan Market Driven Serat Nanas

Hasil analisis *supply dan market driven*, serat nanas memperlihatkan bahwa pengembangan serat nanas di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah, yang bisa didapat secara gratis. Serat daun buah nanas ini juga memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan serat lain pada umumnya untuk dijadikan bahan tekstil karena terbilang lebih kuat. Serat daun nanas ini termasuk dengan serat alam yang jelas kekuatan daya tariknya yang berbeda dengan proses pemintalan dengan mesin secara industri. Kelebihan ini membuat permintaan serat nanas terus berlanjut dan cenderung stabil bahkan meningkat. Artinya permintaan akan produksi inudstri serta nanas ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Industri Serat Nanas di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi serat nanas yang terjadi di Kabupaten Muara Enim saat ini secara umum baru dilakukan dalam bentuk benang sebagai bahan pembuat tekstil, belum menjadi bahan tekstil yang siap digunakan. Nilai tambah yang diberikan akan lebih tinggi jika produk akhir sudah dalam bentuk tekstil yang dapat dibuat berbagai macam produk pakaian, permintaan konsumen juga tinggi.

4.2.3.10.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada industri serat nanas didasarkan atas biaya yang timbul dari mesin-mesin pembuatan industri serat nanas. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi industri serat nanas di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 160.000.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.67 berikut ini.

Tabel 4.67. CAPEX Investasi Industri Serat Nanas

No.	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)
A.	Biaya Investasi				
	1. Lahan dan bangunan	1	paket	100.000.000	100.000.000
	2. Sumber air dan sarananya	1	paket	10.000.000	10.000.000
	3. Mesin penggiling	1	paket	50.000.000	50.000.000
				Jumlah A	160.000.000
B.	Modal Kerja				
	1. Gaji Karyawan (2 orang)	480	HOK	70.000	33.600.000
	2. Listrik + Solar (1300 VA, Rp. 500,000/bln)	12	bulan	500.000	6.000.000
	3. Pelepah Nanas	48000	KG/tahun	500	24.000.000
	(Harga per kilo = 500 rupiah, 1000 kg/minggu)				
	4. Biaya Antar	12	bulan	150.000	1.800.000

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Berikut asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial industri serat nanas.

Tabel 4.68.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Serat Nanas

No	Uraian	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	Tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	Hari	360	
	- tenaga kerja tetap	Bulan	12	
3	Kapasitas serat nanas	Ha	1	
4	Produksi serat nanas dari 1 hektar perkebunan	Ton/bulan	1,5	
5	Kapasitas pengolahan bahan baku (berupa serat daun nanas) meliputi: 1000 helai (30 kg), 2000 helai (60kg), 3000 helai (90 kg), 4000 helai (120 kg), 5000 helai (240 kg)			
7	Discount Factor/suku bunga	%	3	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.69.

Tabel 4.69.
Operational Expenditure (OPEX) Industri Serat Nanas

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Operasional	66.624.000	73.080.000	73.080.000	73.080.000	73.080.000
1. Modal Kerja	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000
2. Pajak UMKM (pph final 0,5% x omzet)	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 20
Biaya Operasional	73.080.000	73.080.000	73.080.000	73.080.000	73.080.000
1. Modal Kerja	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000
2. Pajak UMKM (pph final 0,5% x omzet)	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000

3. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (*feasible*) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.70.
Kelayakan Usaha Industri Serat Nanas

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	192.009.257
B/C Ratio	1.52
Payback period (tahun)	1,6
Internal Rate of Return (IRR) %	19,73

4.2.3.10.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada usaha industri serat nanas di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota

masyarakat nantinya dapat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, industri serat nanas dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industri yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan industri serat nanas yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari industri serat nanas di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada industri ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

4.2.3.10.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan industri serat nanas yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha industri serat nanas. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan industri serat nanas, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, industri serat nanas masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor industri yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan

diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan tempat usaha terendam, yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

5. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan industri serat nanas adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan pengusaha besar

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

4.2.3.11. Analisa Kelayakan Usaha Ikan Asap (Ikan Sale)

4.2.3.11.1. Kelayakan dari Aspek Hukum, Administrasi, dan Kelembagaan

Pada usaha industri ikan asap di Kabupaten Muara Enim, aspek hukum kelayakan bisnisnya ditinjau dari, yaitu: 1) Legalitas usaha, 2) Ketepatan bentuk badan hukum, 3) Kemampuan bisnis memenuhi persyaratan perizinan, dan 4) Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum kelayakan bisnis, seperti: Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin perusahaan, Akta Pendirian dari Notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek legalitas usaha ini dilihat dari identifikasi atas kesesuaian legalitas dan alur perizinannya, sehingga dalam membuat analisis aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan perlu dibuat daftar perizinan dan kesesuaian peraturan yang berlaku. Pada usaha ikan asap di Kabupaten Muara Enim terlihat bahwa komoditi ini:

- Sesuai dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang terlihat bahwa ikan asap adalah industri turunan dari komoditi perikanan, yang menjadi unggulan pada industri pangan olahan di Kabupaten Muara Enim yang telah tertuang dalam RPIK Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2040.
- Komoditi ikan asap adalah komoditi yang legal, didukung pemerintah untuk dikembangkan, artinya sesuai terhadap peraturan perundangan berlaku, bahkan menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting karena kesesuaian suatu komoditi terhadap peraturan perundang-undangan berlaku dalam menjalankan sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.
- Ikan asap adalah komoditi yang mendapat prioritas untuk perizinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat mendukung investasi pada komoditi ini, karena perizinan adalah hal yang krusial dalam menjalankan usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, diwajibkan untuk memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan

melindungi kepentingan publik. aspek perizinan, saat ini telah terintegrasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini berlaku juga pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

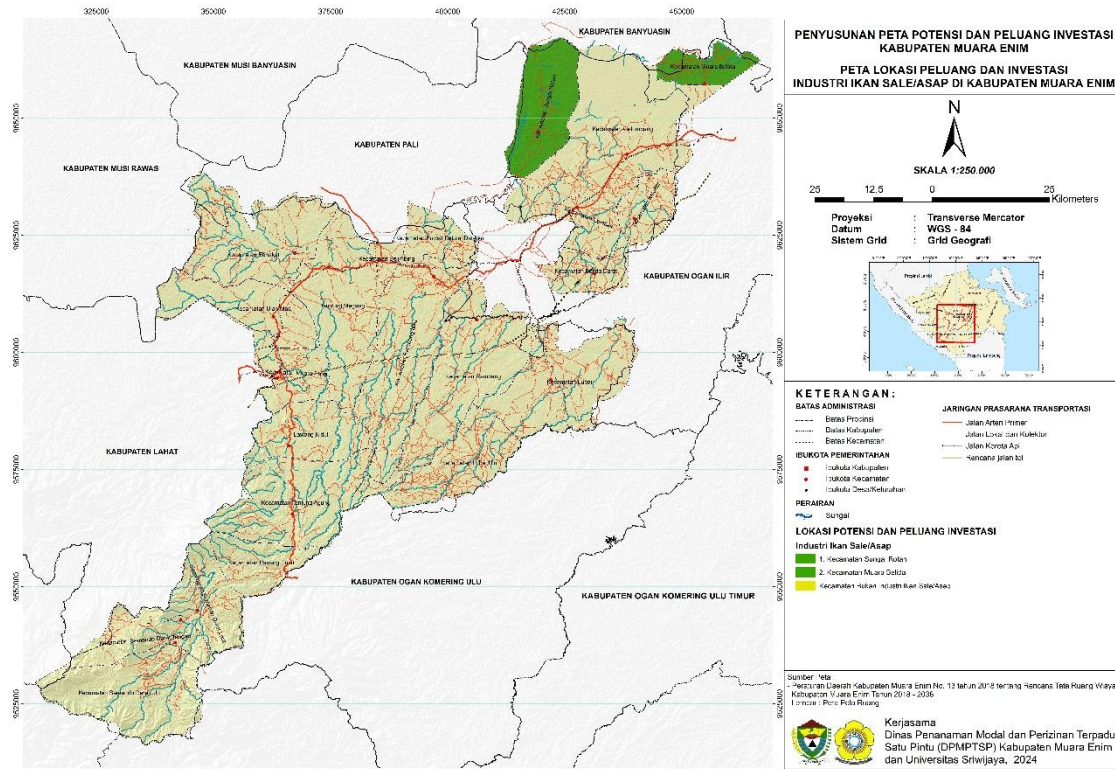
- Ikan asap juga menjadi salah satu usaha yang masuk dalam sektor usaha yang dapat diberikan insentif karena masuk dalam sektor industri pangan olahan. Insentif yang diberikan untuk investor dapat berupa *Tax allowance*, Fasilitas impor, *Super deduction* (pengurangan pajak), diberikan pelatihan manajemen dan teknologi: untuk pengusaha lokal guna meningkatkan daya saing, atau dapat juga insentif berupa Promosi dan Pemasaran.

4.2.3.11.2. Aspek Teknis

Secara teknis, wilayah-wilayah di Kabupaten Muara Enim termasuk cocok untuk pengusahaan ikan asap karena memiliki sumberdaya ikan yang besar. Kelayakan secara teknis ini dapat dilihat dari :

- Lokasi perkebunan kopi memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik,
- Infrastruktur dan utilitas pendukung, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai
- Terdapat budidaya perikanan yang menjadi bahan baku ikan asap.
- Ketersediaan SDM pengelola dan budaya kebiasaan turun menurun pada masyarakat yang mengolah ikan asap yang mendukung untuk pengembangan ikan asap

Kelayakan secara teknis ini terutama pada wilayah-wilayah yang direkomendasikan untuk tempat berinvestasi ikan asap di Kabupaten Muara Enim yang digambarkan pada peta di Gambar 4.36 berikut ini.



Gambar 4.34.

Lokasi Usaha Industri Ikan Asap (Ikan Sale) yang Direkomendasikan untuk Investasi di Kabupaten Muara Enim

4.2.3.11.3. Aspek Pasar

Kelayakan aspek pasar dari usaha ikan asap di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari indikator berikut ini :

1. Daya Saing Ikan Asap di Kabupaten Muara Enim

Ikan Asap di Kabupaten Muara Enim yang direkomendasikan di semua wilayah yang memiliki pangsa pasar terutama di Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida, relatif dekat dengan pusat Kota Muara Enim dan pusat-pusat transportasi darat seperti terminal, kereta api, yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi kabupaten, kota dan provinsi lain. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut dekat dan terhubung dengan bahan bakunya.

2. Supply dan Market Driven Industri Ikan Asap

Hasil analisis *supply dan market driven*, industri ikan asap memperlihatkan bahwa pengembangan ikan asap di Kabupaten Muara Enim ditunjang oleh potensi ikan asap yang sudah sejak lama dikenal sebagai makanan khas dari Muara Enim. Permintaan akan produksi ikan asap ini tergolong besar dan akan berkelanjutan.

3. Kondisi Pemasaran Ikan Asap di Kabupaten Muara Enim

Pemasaran produksi ikan asap yang terjadi di Kabupaten Muara Enim secara umum dilakukan dalam bentuk ikan asap mentah, namun ada juga yang sudah diolah untuk siap makan dalam berbagai bentuk masakan yang dijual untuk semua kalangan masyarakat. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini produsen dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen.

4.2.3.11.4. Aspek Keuangan

1. CAPEX (*Capital Expenditure*)

Kebutuhan atas modal untuk investasi atau biasa disebut dengan *capital expenditure* (Capex) pada industri ikan asap didasarkan atas biaya yang timbul dari pembuatan dan rumah industri ikan asap. Untuk lahan tempat rumah produksi yang dibeli, nilainya akan terus meningkat sesuai dengan harga pasar, sedangkan bangunan dan mesin akan terdepresiasi selama waktu tertentu. CAPEX yang dibutuhkan untuk investasi ikan asap di Kabupaten Muara Enim ini adalah sebesar Rp. 178.100.000,-, dengan rincian pada Tabel 4.71 berikut ini.

Tabel 4.71.
CAPEX Investasi Ikan Asap

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total Biaya (Rp)	Umur Teknis (Th)	Penyusutan
A.	Investasi:				178.100.000		9.400.000
1.	Perizinan	Paket	1	1.500.000	1.500.000		
2.	Tanah dan bangunan	m2	100	1.500.000	150.000.000	30	5.000.000
3.	Mesin/Peralatan Produksi:				22.000.000		
	- Oven Pengasap	unit	2	6.000.000	12.000.000	5	2.400.000
	- Rak Penjemuran	rak	10	500.000	5.000.000	5	1.000.000
	- Mesin Pengemas Vakum	unit	1	5.000.000	5.000.000	5	1.000.000
4.	Peralatan lain:				4.600.000		
	- Timbangan	unit	2	300.000	600.000		
	- Alat pembersih dan pemotong	set	1	1.500.000	1.500.000		
	- Meja Pengolahan Ikan	unit	1	2.500.000	2.500.000		

	- Wadah Penyimpanan	unit	5	400.000	2.000.000		
	- Alat ukur suhu dan kelembaban	unit	1	1.500.000	1.500.000		

2. Asumsi

Asumsi adalah parameter pokok untuk perhitungan biaya dan penerimaan usaha, laba rugi dan kelayakan usaha. Penyusunan parameter asumsi akan sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dibuat. Beberapa parameter utama asumsi meliputi periode proyek/usaha, pola usaha dan kapasitas produksi, harga-harga input dan output, produksi dan penjualan produk, tenaga kerja dan upah, discount rate dan asumsi lain yang diperlukan tergantung komoditi atau usahanya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial industri ikan asap.

Tabel 4.72.
Asumsi Yang Digunakan Dalam Perhitungan Industri Ikan Asap

No.	Asumsi	Satuan	Jumlah/Nilai	Keterangan
1	Periode proyek	tahun	10	Periode 10 tahun
2	Hari kerja selama 1 tahun	bulan	12	
	- tenaga kerja tetap	bulan	12	
3	Produksi dan Harga			
	a. Produksi per tahun	kg	3.600	
	b. Harga ikan asap	Rp/kg	70.000	
4	Upah tenaga kerja			
	a. Tenaga Kerja 3 orang	Rp/bln	1.500.000	
5	Penggunaan bahan baku			
	Ikan Segar (500 kg/bln)	Kg	6.000	
	Garam (50kg/bln)	Kg	600	
	Plastik Kemasan	lembar	600	
	Tempurung Kelapa (2kg untuk 1 kg ikan)	kg	1.000	
6	Discount Factor/suku bunga	%	3,25	

3. Operational Expenditure (OPEX)

Biaya operasional (*operating expenditure/opex*) meliputi biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus dikeluarkan, dengan rincian biaya tersaji pada Tabel 4.73.

Tabel 4.73.
Operational Expenditure (OPEX) Industri Ikan Asap

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Biaya Operasional	31.696.667	31.696.667	31.696.667	31.696.667	31.696.667
Bahan baku	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Bahan pembantu	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
Biaya overhead	6.984.167	6.984.167	6.984.167	6.984.167	6.984.167
Penyusutan	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000

4. Net Present Value

Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Untuk menghitung NPV, harus dibuat perhitungan capital budgeting. Berdasarkan data revenue, beban operasi dan depresiasi maka dapat dibuat capital budgetingnya, dengan asumsi discount rate 3,5 persen. Bila nilai NPV > 0 maka investasi atau proyek dianggap layak (feasible) untuk dilakukan. Dengan menghitung nilai net present value sebelum melakukan investasi, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup positif bagi performa keuangan perusahaan.

Tabel 4.74.
Kelayakan Usaha Industri Ikan Asap

Kriteria Kelayakan	Nilai
Net Present Value (NPV)	1.642.333.650
B/C Ratio	7,95
Payback period (tahun)	1,01
Internal Rate of Return (IRR) %	100,43
Profit Index	11,66

4.2.3.11.5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Manfaat sosial pada usaha industri ikan asap di Kabupaten Muara Enim diperkirakan mampu mengubah struktur sosial dimana sebagian besar anggota masyarakat nantinya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri yang dikembangkan. Adapun dari segi budaya, industri ikan asap dapat membawa perubahan nilai dan pola gaya hidup sesuai dengan perkembangan industri yang terjadi.

Salah satu dampak positif dari keberadaan industri ikan asap yang akan dikembangkan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa unsur yang diharapkan terwujud yaitu kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pendapatan. Kedua faktor ini pula yang akan menjadi keberhasilan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari industri ikan asap di masa depan. Kesempatan kerja/berusaha pada industri ini tentu saja diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja dalam konstruksi dan operasionalnya. Sedangkan, peningkatan pendapatan tidak hanya dari tenaga kerja terserap tetapi juga dari sektor ekonomi makro yang terbentuk.

4.2.3.11.6. Aspek Risiko

1. Risiko Permintaan

Risiko permintaan dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan harga pasar, lingkungan, ekonomi dan sosial yang berimbas pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perubahan lingkungan atau iklim bisa berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan industri ikan asap yang menyebabkan produksi menurun sehingga pendapatan juga menurun. Perubahan permintaan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha.

2. Risiko Perizinan

Salah satu kendala tersebut yaitu status kepemilikan lahan perusahaan yang belum jelas untuk waktu yang cukup lama. Padahal status lahan menjadi landasan fundamental bagi kepastian hukum pengembangan usaha industri ikan asap. Kepastian hukum lahan yang menjadi isu utama sepanjang perencanaan pengembangan industri ikan asap, nantinya mesti diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Risiko Regulasi dan Politik

Berdasarkan kebijakan yang ada, industri ikan asap masuk sebagai komoditi unggulan sub sektor industri yang tertera dalam program kerja pemerintah daerah. Kebijakan ini semestinya menjadi landasan untuk akselerasi pengembangan usaha ini. Kondisi yang menguntungkan ini diharapkan nanti akan diikuti dengan kebijakan turunan di bawahnya. Kepastian peraturan dan izin dalam berinvestasi sangat dibutuhkan oleh para investor agar jalannya investasi dan bisnis dapat terjamin operasional dan keberlangsungannya. Perubahan regulasi akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik dan pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. Faktor ini

akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

4. Risiko Force Majeure dan Lingkungan

Risiko force majeure dan lingkungan adalah risiko–risiko terkait dengan bencana alam, cuaca ekstrem, sosial, ekonomi dan politik. Risiko lingkungan dan bencana alam di lokasi misalnya banjir yang dapat mengakibatkan tempat usaha terendam, yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Risiko ini sebenarnya jarang sekali terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun tetap perlu diantisipasi jika terjadi. Kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah cuaca ekstrem yang saat ini kadang sering melanda bukan saja di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

5. Risiko Outstanding Issue

Isu-isu kritis dalam pengembangan industri ikan asap adalah sebagai berikut:

- Pembentukan regulasi terkait perizinan oleh pemerintah daerah;
- Penyediaan fasilitas umum dan khusus untuk transportasi;
- Pembentukan kemitraan dengan pengusaha besar.

Rencana dan Strategi Penyelesaian Isu-Isu Kritis

Berdasarkan isu-isu kritis di atas, solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang ada sebagai berikut:

- Komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan peraturan perizinan;
- Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
- Komunikasi antara dunia usaha untuk menjaga rantai pasok.

Bab 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil Kajian Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim yang telah dilakukan, tersaji informasi tentang peta potensi dan peluang investasi dari semua sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim dari hulu sampai dengan hilirnya. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terdahulu, serta hasil dari survei lapangan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dari sejumlah 17 sektor usaha di Kabupaten Muara Enim yang dianalisis secara berjenjang menggunakan Metode LQ & DLQ, Shift-Share Analysis, Analisis Tipologi Sektor, Analisis Klassen, dan Analisis Regional dan Makro Penunjang untuk menunjukkan sektor basis ekonomi daerah yang juga disebut sektor unggulan daerah, telah diperoleh hasil 8 sektor yang konsisten berpotensi menjadi investasi unggulan daerah dan akan dapat berkembang secara positif di Kabupaten Muara Enim dalam pembangunan daerah ke depan adalah (a) Sektor Pertambangan dan hasil-hasilnya, (b) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (c) Sektor Industri Pengolahan, (d) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (e) Sektor Pengadaan Air, (f) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta (g) Sektor Jasa Perusahaan, dan (h) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
2. Sektor-sektor unggulan investasi daerah tersebut dalam pengembangannya ke depan akan dapat mendukung secara positif pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan PDRB didukung dengan peningkatan peran faktor demografi dan ketenagakerjaan yang bertumbuh positif, infrastruktur yang memadai, serta letak geografis yang strategis dan pemanfaatan wilayah yang kaya akan beragam sumber daya alam.

3. Peluang investasi spesifik komoditi yang diturunkan untuk periode lima tahun ke depan dari sektor-sektor berpotensi yang dipilih berdasarkan hasil survei lapangan, dukungan data sekunder serta kesepakatan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan OPD dan para pihak terkait, yang diperkuat dengan analisis kelayakan usaha dari berbagai aspek menghasilkan rekomendasi berikut:
 - a. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kentang, Sapi, dan Ikan budidaya.
 - b. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Pertambangan dan Penggalian adalah Produk berbahan baku dari limbah tambang batubara yang dinamakan FABA (*Fly Ash Bottom Ash*) dengan bentuk produk berupa *paving block*, batako yang berdaya tahan tinggi (tidak mudah remuk) dengan biaya yang relatif terjangkau dan cukup ramah lingkungan.
 - c. Komoditi berpotensi investasi dari Sektor Industri Pengolahan adalah Kopi bubuk, Batik, Serat Nanas, Jamur Tiram, Ikan asap dan Ikan asin.Semua komoditi tersebut menunjukkan kelayakan untuk diusahakan sebagai komoditi investasi dari aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan, aspek teknis, aspek pasar, aspek finansial, aspek sosial dan lingkungan serta aspek risiko usaha.
4. Untuk pengembangan potensi dan peluang investasi dari berbagai sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim diperlukan kerjasama dari semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat wilayah) untuk dapat berkontribusi secara proporsional dan konsisten agar potensi dan peluang ini dapat direspon dan ditindaklanjuti secara positif oleh para investor dari dalam maupun luar daerah.
 - a. Peluang investasi perkebunan kelapa sawit ditawarkan kepada para investor sedang dan besar dengan pola kemitraan inti-plasma atau kemitraan *off-taker* dengan petani swadaya ketika investor telah membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Hal yang sama juga dapat ditawarkan kepada investor usaha perkebunan karet dengan prospek pengembangan usaha hilirisasi/pengolahan karet kedepannya.
 - b. Peluang investasi perkebunan kopi dan kentang dapat ditawarkan kepada para investor dengan pola mandiri jika tersedia lahan yang dapat disewa,

- atau lebih dianjurkan bekerja sama/bermitra dengan petani setempat dimana investor dapat berposisi sebagai pengusaha pengolahan hasil.
- c. Peluang investasi pengembangan sapi utamanya adalah untuk sapi potong yang lokasi kandang pemeliharaannya cukup besar tersedia di Kabupaten Muara Enim ini dan dapat pula disertai dengan pembangunan rumah potong hewan (RPH) yang relatif modern dilengkapi dengan fasilitas ruang pembeku daging untuk tujuan menghasilkan daging yang dapat dijual ke luar daerah. Dalam jangka pendek pembangunan RPH sangat dianjurkan untuk dibangun untuk segera dapat melayani pemotongan hewan yang sesuai dengan ketentuan bagi penyediaan pasokan daging pemotongannya mengikuti prosedur pemotongan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
 - d. Potensi peluang investasi pengembangan ikan budidaya dapat ditawarkan kepada individu atau kelompok pengusaha setempat ataupun dari luar daerah karena dalam kesehariannya sudah ada yang mengembangkan bisnisnya, namun masih dihadapkan pada kekurangan modal investasi peningkatan skala usaha.
 - e. Untuk investasi pengembangan usaha produk FABA masih diperlukan koordinasi dan kesepakatan dengan PT. Bukit Asam mengenai penawaran investasi kepada para calon investor, termasuk kerjasama pembinaan aspek lingkungan pada saat pengembangan usaha yang dilakukan.
 - f. Selanjutnya untuk potensi investasi pengembangan usaha di sektor pengolahan hasil, penawaran investasinya bagi penanam modal terbuka bagi siapa saja sebagaimana disampaikan pada pembahasan laporan ini, yang dapat ditelaah pada uraian secara ringkas pada booklet yang merupakan tambahan produk hasil kajian yang dilakukan.
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim sebaiknya terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, melakukan kemudahan dan penyederhanaan izin usaha, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta penerapan pemberian insentif fiskal sebagai turunan yang relevan dari kebijakan pemerintah pusat berupa *tax allowance* dan *tax holiday*, dan menjamin kondisi keamanan, kondisi sosial dan kelancaran kegiatan bisnis bagi investor dan pelaku usaha.